



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3/PERMEN-KP/2014

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2010-2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu ditetapkan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan melalui peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan pendekatan *balanced scorecard* pada sasaran strategis, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.15/MEN/2012 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010 - 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010 -2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 sampai 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 126);
13. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;

14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2010-2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014, yang selanjutnya disebut Renstra KKP, adalah dokumen perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.
2. Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Renja KKP adalah dokumen perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

- (1) Menetapkan Renstra KKP, yang merupakan pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam penyusunan program pembangunan kelautan dan perikanan.
- (2) Renstra KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Renstra KKP, meliputi:

- a. Pendahuluan, yang berisi kondisi umum, potensi, dan permasalahan;
- b. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis; dan
- c. Arah Kebijakan dan Strategi, yang berisi arah kebijakan dan strategi nasional, arah kebijakan dan strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 4

Renstra KKP sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menyusun program, kegiatan, indikator, target dan anggaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Renstra KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam Renja KKP yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

Menteri melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renstra KKP yang dituangkan dalam Renja KKP.

Pasal 7

Program pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan dan dianggarkan pada tahun anggaran 2010 s.d. 2013 tetap mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2012 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014, selanjutnya program pembangunan kelautan dan perikanan pada tahun anggaran 2014 mengacu kepada Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2012 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2014

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3/PERMEN-KP/2014
 TENTANG
 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN
 DAN PERIKANAN TAHUN 2010-2014

BAB I
 PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan empat pilar pembangunan, yaitu *pro-poor* (pengentasan kemiskinan), *pro-job* (penyerapan tenaga kerja), *pro-growth* (pertumbuhan), dan *pro-environment* (pemulihan dan pelestarian lingkungan).

Selama periode tahun 2010-2011, capaian hasil pembangunan kelautan dan perikanan ditandai dengan tercapainya beberapa target Indikator Kinerja Utama (IKU) KKP, yakni:

1. Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan

PDB sub sektor perikanan memegang peranan strategis dalam memberikan kontribusi bukan hanya untuk PDB kelompok pertanian secara umum, tetapi juga pada PDB Nasional. Meskipun kontribusi PDB sub sektor perikanan dari tahun 2010 sampai dengan 2011 mengalami sedikit penurunan, namun dibandingkan dengan PDB sub sektor lain pada kelompok pertanian, PDB sub sektor perikanan mengalami kenaikan yang paling tinggi, yakni mencapai 14,23%.

PDB Sub Sektor Perikanan (Atas Dasar Harga Berlaku)
 Tahun 2010-2011

(Miliar Rupiah)

LAPANGAN USAHA	2010*)	2011*)	Kenaikan (%/thn)
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	985.448,8	1.093.466,0	10.96
• Tanaman Bahan Makanan	482.377,1	530.603,7	10.00
• Tanaman Perkebunan	136.026,8	153.884,7	13.13
• Peternakan dan hasilnya	119.371,7	129.578,3	8.55
• Kehutanan	48.289,8	51.638,1	6.93
• Perikanan	199.383,4	227.761,2	14.23
PDB	6.436.270,8	7.427.086,1	15.39
PDB TANPA MIGAS	5.936.237,8	6.794.373,4	14.46
Persentase kontribusi PDB Subsektor Perikanan :			
Thd PDB Nasional	3,10	3,07	-0.97
Thd PDB Non-migas	3,36	3,35	-0.30

Sumber : BPS, 2011

Ket : * Angka sementara

Mempertimbangkan adanya pengaruh yang sangat besar dari kinerja sub sektor/sector lain, maka Indikator Kinerja Utama kontribusi PDB Perikanan sejak tahun 2012 diubah menjadi Pertumbuhan PDB Perikanan. Pada tahun 2011, pertumbuhan PDB Perikanan mencapai 6,72%. Selanjutnya, kinerja pembangunan kelautan dan perikanan pada tahun 2012 diperkirakan mampu memberikan pertumbuhan PDB Perikanan sebesar 6,95%.

2. Produksi Perikanan

Produksi perikanan nasional meningkat sebesar 6,2% per tahun, yakni dari 11,66 juta ton pada tahun 2010 menjadi 12,38 juta ton pada tahun 2011. Capaian produksi perikanan tersebut didukung oleh kontribusi produksi perikanan budidaya yang terus mengalami kenaikan, yakni mencapai 11,13% per tahun selama periode tahun 2010-2011.

Volume Produksi Perikanan Tahun 2010-2011

(Ton)

Rincian	Tahun		Kenaikan Rata-Rata (%)
	2010	2011	
Perikanan Tangkap	5.348.418	5.409.100	0,46
• Perikanan Laut	5.039.446	5.061.680	0,44
• Perairan Umum	344.972	347.420	0,71
Perikanan Budidaya	6.277.924	7.901.526	11,13
• Budidaya Laut	3.514.702	3.735.585	6,28
• Tambak	1.416.038	1.734.260	22,47
• Kolam	819.809	955.511	16,55
• Karamba	121.271	120.654	-0,51
• Jaring Apung	309.499	331.936	7,25
• Sawah	96.605	98.804	2,28
Jumlah	11.662.342	13.310.626	6,20

Tingginya produksi perikanan budidaya didukung oleh pencapaian produksi rumput laut yang mencapai sekitar 61% dari total produksi perikanan budidaya dan komoditas bandeng dan udang.

Volume Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2010-2011

(Ton)

Rincian	Tahun		Kenaikan Rata-Rata (%)
	2010	2011	
Rumput laut	3.915.017	5.170.201	32,06
Udang	380.972	372.577	2,20
Kerapu	10.398	10.580	1,75
Kakap	5.738	5.236	-8,75
Bandeng	421.757	467.449	10,83
Mas	282.695	332.206	17,51
Nila	464.191	567.449	22,24
Lele	242.811	337.577	39,03
Patin	147.888	229.267	55,03
Gurame	56.889	64.252	12,94
Lainnya	349.568	344.732	-1,38
Jumlah	6.277.923	7.901.526	25,86

Volume Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2010-2011

(Ton)

Rincian	Tahun		Kenaikan Rata-Rata (%)
	2010	2011	
Udang	245.662	247.760	0,85
Tuna	213.796	230.580	7,28
Cakalang	329.949	345.130	4,40
Tongkol	367.320	379.810	3,29
Ikan Lainnya	3.951.454	3.925.230	(0,67)
Lainnya	276.237	280.590	1,55
Jumlah	5.384.418	5.409.100	0,46

Memperhatikan capaian tahun 2010-2011, produksi perikanan pada tahun 2012 diperkirakan mencapai 14,86 juta ton meliputi produksi perikanan tangkap sebesar 5,44 juta ton dan produksi perikanan budidaya sebesar 9,42 juta ton.

Produksi perikanan tangkap dan budidaya menjadi pasokan dalam proses produksi ikan olahan. Selama kurun waktu 2010-2011, volume produk olahan meningkat dari 4,2 juta ton pada tahun 2010 menjadi 4,58 juta ton pada tahun 2011. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya ragam produk olahan bernilai tambah yang dihasilkan Unit Pengolahan Ikan (UPI), baik skala besar maupun UMKM dalam upaya memenuhi preferensi konsumen terhadap diversifikasi produk perikanan yang bermutu, aman dikonsumsi dan memiliki nilai tambah.

Volume Produksi Olahan Tahun 2010–2011

Rincian	Tahun		Kenaikan Rata-rata (%)
	2010	2011	
Volume Produksi Olahan (Ton)	4,20	4,58	9,05

3. Ekspor Hasil Perikanan

Realisasi nilai ekspor hasil perikanan sampai dengan akhir Desember 2011 mencapai US\$ 3,52 miliar, dengan volume 1,16 juta ton. Capaian nilai ekspor ini meningkat 22,95% apabila dibandingkan dengan nilai ekspor hasil perikanan tahun 2010, yakni US\$ 2,86 miliar. Kontribusi nilai ekspor tertinggi adalah dari komoditas udang yakni mencapai 37,2 % dari total nilai ekspor hasil perikanan.

Volume, Nilai Ekspor-Impor dan Neraca Perdagangan

Tahun 2010–2011

Rincian	Tahun		Kenaikan Rata-Rata (%)
	2010	2011	
Volume Ekspor (Ton)	1.103.575	1.159.349	5,05
Volume Impor (Ton)	369.282	431.871	16,95
Nilai Ekspor (US\$1.000)	2.863.830	3.521.091	22,95
Nilai Impor (US\$1.000)	391.815	488.351	24,64
Neraca Perdagangan (US\$1.000)	2.472.016	3.032.740	22,68

Peningkatan ekspor hasil perikanan ini disebabkan oleh arah kebijakan ekspor yang semakin baik meskipun ditengah terjadinya kondisi perekonomian yang memburuk di Eropa, yang ditandai dengan mulai diarahkannya tujuan ekspor dari pasar-pasar tradisional (Jepang, USA dan UE) ke pasar-pasar prospektif (Korea Selatan, China, Malaysia dan Timur Tengah). Di samping itu, peningkatan ekspor tersebut merupakan dampak dari penurunan kasus *Rapid Alert System (RAS)* yang menimpa produk perikanan Indonesia di pasar luar negeri. Selain itu, pemerintah Indonesia telah mendapatkan hak kembali untuk mengajukan *Approval Number (Re-authorized for Approval Number)* baru bagi Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang akan mengekspor ke UE.

Kenaikan ...

Kenaikan nilai ekspor yang lebih tinggi dibandingkan dengan volumenya menunjukkan adanya peningkatan harga rata-rata produk perikanan yang diekspor, yang antara lain disebabkan sebagian besar ekspor telah mengarah pada produk bernilai tambah (*non primary product*). Disamping itu, neraca perdagangan hasil perikanan Indonesia memperlihatkan pertumbuhan surplus yang cukup tinggi dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 22,68% per tahun. Pada tahun 2012, diperkirakan nilai ekspor hasil perikanan mencapai US\$ 4,2 miliar.

4. Konsumsi Ikan

Pada tahun 2011, capaian sementara rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional adalah 31,64 kg/kapita atau meningkat sebesar 4,81% apabila dibandingkan dengan rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional pada tahun 2010, yang besarnya 30,48 kg/kapita.

Rata-Rata Konsumsi Ikan Tahun 2010-2011

Rincian	Tahun		Kenaikan Rata-Rata (%)
	2010	2011	
Konsumsi Ikan (kg/kapita/thn)	30,48	31,64	4,81

Pencapaian rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional tahun 2011 menggambarkan bahwa produk perikanan untuk dikonsumsi tersedia cukup, baik yang berasal dari kegiatan penangkapan ikan maupun budidaya. Selain itu, peningkatan capaian rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional tersebut juga menggambarkan bahwa pelaksanaan kebijakan dan kampanye Gemar Makan Ikan memberikan hasil yang signifikan.

5. Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)

Pada Tahun 2011, capaian Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang ber-Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) adalah 948 UPI atau meningkat sebesar 53,27% dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 sebanyak 505 UPI.

Perkembangan Jumlah UPI yang ber-SKP Tahun 2010-2011

Rincian	Tahun		Kenaikan Rata-Rata (%)
	2010	2011	
Jumlah UPI yang ber-SKP	505	948	53,27

Capaian sebanyak 948 UPI tersebut terdiri dari pembinaan terhadap 505 UPI yang telah ber-SKP dan penerbitan SKP bagi 443 UPI baru. Capaian tersebut diperoleh melalui pembinaan terhadap penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka pemenuhan persyaratan dasar kelayakan pengolahan di UPI.

Jumlah ...

Jumlah UPI yang ber-SKP tahun 2012 diperkirakan sebanyak 1.445 UPI. Untuk mendorong UPI agar mempunyai SKP, telah dilaksanakan sosialisasi pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan serta asistensi penerapan persyaratan kelayakan pengolahan di UPI.

6. Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya Ikan

Berdasarkan hasil perhitungan BPS, NTN tahun 2010 dan 2011 memiliki pola yang hampir sama, namun sepanjang tahun 2011 terdapat dua titik terendah yaitu pada bulan Januari dan bulan Juli, tetapi nilainya masih diatas 105, artinya nelayan masih dapat menyimpan hasil pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penangkapan ikan setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Sementara pada bulan September merupakan titik tertinggi, baik pada tahun 2010 maupun tahun 2011 dan bergerak turun sampai dengan akhir tahun. Angka Nilai Tukar Nelayan (NTN) sampai dengan Desember 2011 sebesar 106,4.

Nilai Tukar Nelayan, 2010-2011

Bulan		Nilai Tukar Nelayan	Perubahannya (%)
2010	JANUARI	105,05	-0.23
	FEBRUARI	105,30	0.24
	MARET	105,42	0.11
	APRIL	105,50	0.08
	MEI	105,46	-0.04
	JUNI	105,31	-0.14
	JULI	105,03	-0.27
	AGUSTUS	105,43	0.38
	SEPTEMBER	106,26	0.79
	OKTOBER	106,25	-0.01
	NOPEMBER	105,95	-0.28
	DESEMBER	105,69	-0.25
RATA-RATA		105,55	
Bulan		Nilai Tukar Nelayan	Perubahannya (%)
2011	JANUARI	105,59	-0,09
	FEBRUARI	105,63	0,04
	MARET	105,86	0,22
	APRIL	106,43	0,54
	MEI	106,63	0,19
	JUNI	106,81	0,17
	JULI	106,67	-0,13
	AGUSTUS	106,50	-0,16
	SEPTEMBER	106,47	-0,03
	OKTOBER	106,28	-0,18
	NOPEMBER	106,14	-0,13
	DESEMBER	105,83	-0,29
RATA-RATA		106,24	

7. Luas Kawasan Konservasi Perairan

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2010 dengan luas target kawasan konservasi perairan 900.000 hektar dapat direalisasikan seluas 1.270.000 hektar atau mencapai 114%. Luas kawasan konservasi perairan laut di Indonesia, saat ini mencapai 15,4 juta hektar.

Luas dan Tipe Kawasan Konservasi Perairan

No	Kawasan Konservasi	Jumlah Kawasan	Luas (Ha)
A	Inisiasi Kementerian Kehutanan	32	4.694.947
	Taman Nasional Laut	7	4.043.541
	Taman Wisata Alam Laut	14	491.248
	Suaka Margasatwa Laut	5	5.678
	Cagar Alam Laut	6	154.480
B	Inisiasi KKP dan Pemda	64	10.720.118
	Taman Nasional Perairan	1	3.521.130
	Suaka Perairan	3	453
	Suaka Alam Perairan	3	445.630
	Taman Wisata Perairan	6	1.541.040
	Daerah Perlindungan Laut/Mangrove	2	2.086
	Kawasan Konservasi Perairan Daerah	56	5.209.778
Jumlah Total		103	15.415.065

Luas dan tipe kawasan konservasi perairan di atas merupakan kumulatif hasil kerjasama pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan kawasan konservasi perairan. Target utama adalah mengelola kawasan konservasi perairan secara efektif berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2011 telah dilakukan upaya-upaya pengelolaan dalam kawasan konservasi tersebut, terdapat 14 kawasan dengan luasan mencapai 2,5 juta hektar atau tercapai 100%, dan jika dibandingkan dengan rencana target sampai 2014 secara agregasi seluas 4,5 juta hektar, maka sudah tercapai 56,50%.

8. Jumlah Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola

Pada tahun 2011 tingkat capaian kinerja telah dilaksanakannya pengelolaan pada 37 pulau-pulau kecil atau mencapai 123%. Jika dibandingkan dengan rencana target sampai akhir Renstra tahun 2014 secara agregasi sebanyak 200 pulau-pulau kecil, maka sampai 2011 secara akumulasi sudah dicapai sejumlah 57 pulau-pulau kecil atau 28,50%.

Jumlah Pulau-Pulau Kecil,
termasuk Pulau Kecil Terluar yang Dikelola Tahun 2011

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah pulau-pulau kecil yang dikelola, termasuk pulau kecil terluar	30 Pulau	37 Pulau	123

Kegiatan yang dilakukan meliputi identifikasi potensi dan pemetaan PPK; fasilitasi penyediaan infrastruktur; rehabilitasi ekosistem dan fasilitasi investasi PPK. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan data untuk menggali dan mengetahui potensi dari pulau-pulau kecil yang meliputi aspek biofisik perairan, flora dan fauna daratan serta kondisi sosial, ekonomi masyarakat terhadap pulau-pulau tersebut.

Untuk pelaksanaan identifikasi dan pemetaan pulau-pulau kecil pada tahun 2011 dilaksanakan oleh pusat maupun provinsi melalui dana dekonsentrasi. Secara keseluruhan telah dilakukan identifikasi potensi dan pemetaan pulau-pulau kecil sebanyak 35 pulau pada tahun 2011. Pencapaian ini disebabkan karena adanya efektifitas pekerjaan yang dilakukan yaitu pelaksanaan identifikasi dan pemetaan potensi pulau-pulau kecil pada lokasi pulau yang berdekatan, sehingga dapat mengidentifikasi lebih dari satu pulau dalam sekali pelaksanaan.

9. Persentase Wilayah Perairan yang Bebas *Illegal Fishing* dan Kegiatan yang Merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Realisasi sasaran perairan Indonesia bebas *illegal fishing* dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan pada tahun 2011 telah tercapai sebesar 39,86% melebihi target yang ditetapkan sebesar 39,00% dengan persentase capaian sebesar 102,21%. Dibandingkan tahun 2010 dengan target persentase luas 34% diselesaikan sebesar 38,24% atau tingkat capaian 112,47%.

Capaian Kinerja Pengawasan SDKP Tahun 2011

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Wilayah Perairan bebas <i>Illegal Fishing</i> dan kegiatan yang merusak SDKP (%)	39%	39,86%	102,21

Dalam rangka penanggulangan *illegal fishing* dilaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, khususnya operasi kapal pengawas baik secara mandiri maupun melalui operasi bersama dengan instansi penegak hukum lainnya (TNI-AL, Bakorkamla, dan Polair) serta negara lain (Australia dan Malaysia).

Selama tahun 2011, operasi kapal pengawas telah berhasil memeriksa sebanyak 3.348 kapal perikanan yang terdiri dari 79 Kapal Ikan Asing (KIA) dan 3.269 Kapal Ikan Indonesia (KII). Dari seluruh kapal yang diperiksa tersebut, sebanyak 106 kapal perikanan terindikasi melakukan pelanggaran dan diadhock ke pelabuhan terdekat, yang terdiri dari 31 KII dan 75 KIA. Jika dibandingkan dengan pencapaian hasil operasi kapal pengawas pada tahun 2010, terjadi peningkatan jumlah kapal yang diperiksa dari 2.253 kapal ikan menjadi 3.348 kapal ikan atau sebesar 48,6%, namun terjadi penurunan jumlah kapal ikan yang ditangkap dari 183 kapal ikan (158 KII & 24 KIA) menjadi 106 kapal ikan (31 KII & 75 KIA).

B. Potensi dan Permasalahan

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki luas laut dan jumlah pulau yang besar. Panjang pantai Indonesia mencapai 104.000 km (Bakosurtanal, 2006) dengan luas wilayah laut berdasarkan UNCLOS 1982 mencapai 284.210,9 km² laut teritorial, 2.981.211 km² ZEEI, dan 279.322 km² laut 12 mil. Potensi tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang dikaruniai sumber daya kelautan yang besar termasuk kekayaan keanekaragaman hayati dan non hayati kelautan terbesar.

Klasifikasi potensi tersebut pada umumnya dibedakan menjadi sumber daya terbarukan (*renewable resources*), seperti sumber daya perikanan (perikanan tangkap dan budidaya), mangrove, terumbu karang, padang lamun, mineral air laut dan air laut dalam, energi gelombang, pasang surut, angin dan OTEC (*Ocean Thermal Energy Conversion*), dan sumber daya tidak terbarukan (*non-renewable resources*), seperti sumber daya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral. Selain dua jenis sumber daya tersebut, juga terdapat berbagai macam jasa lingkungan kelautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan kelautan seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan, dan sebagainya.

Disamping itu terdapat potensi pengembangan untuk (a) perikanan tangkap di laut sebesar 6,5 juta ton dan di perairan umum seluas 54 juta hektar dengan potensi produksi 0,9 juta ton/tahun, (b) budidaya laut seluas 8,3 juta ha terdiri dari budidaya ikan (20%), budidaya kekerangan (10%), budidaya rumput laut (60%) dan lainnya (10%), (c) potensi budidaya air payau (tambak) seluas 1,3 juta ha, (d) budidaya air tawar terdiri dari kolam seluas 526,40 ribu ha, perairan umum (danau, waduk, sungai dan rawa) seluas 158,2 ribu ha, sawah untuk mina padi seluas 1,55 juta ha, serta (e) bioteknologi kelautan untuk pengembangan industri bioteknologi kelautan seperti industri bahan baku untuk makanan, industri bahan pakan alami, benih ikan dan udang, industri bahan pangan serta non pangan yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti untuk industri kesehatan dan kosmetika (farmasetika laut).

Selain itu juga terdapat potensi dan peluang pengembangan meliputi (a) pengembangan pulau-pulau kecil, (b) pemanfaatan Benda Berharga asal Muatan Kapal Tenggelam, (c) pemanfaatan air laut dalam (*deep sea water*), (d) industri garam rakyat, (e) pengelolaan pasir laut, (f) industri penunjang, dan (g) keanekaragaman hayati laut.

Peluang pengembangan usaha kelautan dan perikanan Indonesia masih memiliki prospek yang sangat tinggi. Potensi ekonomi sumber daya kelautan dan perikanan yang berada di bawah lingkup tugas KKP dan dapat dimanfaatkan untuk mendorong pemulihan ekonomi yang diperkirakan sebesar US\$ 82 miliar per tahun.

Disamping adanya potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang besar, terdapat pula potensi kelembagaan, antara lain seperti peranan Komisi Tuna Indonesia, Komisi Udang, Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN), Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (Gappindo), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin), Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI), LSM bidang kelautan dan perikanan, dan lain-lain, diharapkan di masa datang perlu terus disinergikan. Potensi lain adalah potensi sarana dan prasarana yang telah dimiliki, seperti Unit Pelaksana Teknis di daerah yakni Pelabuhan Perikanan, Balai Budidaya, Balai Pengujian Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan, Balai Litbang, Balai Karantina Ikan, dan Sekolah Perikanan.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan dan menjadikan sektor ini sebagai *prime mover* pembangunan ekonomi nasional, diperlukan upaya percepatan dan terobosan dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang didukung dengan kebijakan ekonomi serta iklim sosial politik yang kondusif. Dalam kaitan ini, koordinasi dan dukungan lintas sektor serta para pemangku kepentingan lainnya menjadi salah satu prasyarat yang sangat penting.

Pembangunan kelautan dan perikanan memiliki banyak nilai strategis, antara lain:

1. potensi geografis, ekonomi, sosial, dan ekologi yang sangat besar dan beragam dari perairan laut dan kepulauan di Indonesia, dapat menjadi modal sumberdaya alamiah yang besar bagi pembangunan bangsa Indonesia;
2. sumber daya kelautan dan perikanan dapat menjadi basis pembangunan ekonomi secara berkelanjutan;
3. pengembangan industri kelautan dan perikanan dapat menciptakan *backward* dan *forward linkage* industri yang tinggi.
4. seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dunia, peningkatan permintaan akan produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan kesadaran akan gizi ikan yang lebih sehat dapat menjadi peluang pengembangan pasar bagi komoditas dan produk perikanan Indonesia;
5. melalui penguasaan dan penegakan kedaulatan kelautan, maka pertahanan dan keamanan nasional dan kedaulatan wilayah dapat lebih terjamin;
6. secara sosio-kultural kembali fokus ke pembangunan kelautan dan perikanan merupakan wujud upaya untuk mengembalikan kembali kejayaan maritim Indonesia yang pernah dicapai di masa lalu.

Melihat potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang begitu besar, maka tantangan lain yang timbul adalah maraknya kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) oleh kapal-kapal ikan asing yang berdampak merugikan negara dan mengancam kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Ancaman *illegal fishing* kedepan diperkirakan intensitasnya terus meningkat, hal tersebut sejalan dengan kondisi perikanan global saat ini di beberapa negara yang mengalami penurunan stok ikan dan tingginya permintaan produk perikanan serta pengurangan armada kapal penangkapan ikan oleh berbagai negara akibat menyempitnya peluang izin penangkapan. Hal ini mendorong negara-negara disekitar Indonesia yang memiliki armada besar melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia dengan berbagai modus operandi serta menggunakan teknologi yang lebih canggih dan terkoordinir dengan baik, disisi lain kemampuan pengawasan SDKP di Indonesia masih sangat lemah dan perairan Indonesia sangat terbuka. Melihat ancaman dan tantangan tersebut, pengawasan SDKP perlu ditingkatkan sebagaimana amanat UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, melalui pengembangan sistem pemantauan SDKP, penyediaan sarana dan prasarana pengawasan, pemenuhan regulasi bidang pengawasan dan kelembagaan di tingkat daerah serta kerjasama secara intensif dengan instansi lain dan menggalang komitmen serta dukungan internasional dalam penanggulangan *illegal fishing*.

Permasalahan lain yang dihadapi antara lain terkait dengan masih rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan yang antara lain disebabkan struktur armada yang masih didominasi oleh kapal berukuran kecil, belum terintegrasinya sistem produksi hulu dan hilir, dan masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dibangun. Dalam pengembangan perikanan budidaya, masih dihadapkan pada permasalahan implementasi kebijakan tata ruang, terbatasnya prasarana saluran irigasi, terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul, dan serangan hama dan penyakit ikan/udang serta adanya pencemaran yang mempengaruhi kualitas lingkungan perikanan budidaya. Indonesia juga masih menghadapi beberapa kondisi yang belum sepenuhnya dapat mendukung untuk memenuhi persyaratan mutu produk ekspor hasil perikanan yang semakin ketat dari negara pengimpor, seperti Uni Eropa. Disamping itu, aspek yang mempengaruhi lemahnya daya saing dan produktivitas yang sangat mendasar adalah dalam aspek kualitas SDM dan kelembagaannya. Dimana jumlah SDM yang bergantung pada kegiatan usaha kelautan dan perikanan sangat besar dan dengan pengetahuan, penguasaan teknologi dan kemampuan serta infrastruktur untuk akses informasi yang minim dan tidak merata di seluruh wilayah Indonesia yang berkepulauan. Diperparah oleh minimnya kelembagaan yang menaungi kegiatan usaha mereka dengan posisi tawar dan sistem organisasinya yang lemah.

Dalam rangka pengembangan usaha, permasalahan yang dihadapi adalah masih belum diperolehnya dukungan permodalan usaha dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Dalam kaitan ini, nelayan/pembudidaya ikan masih kesulitan mengakses kredit karena tidak dapat memenuhi persyaratan perbankan.

Aktifitas pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berada di daratan maupun sepanjang pesisir pantai dan di lautan, tidak luput dari tantangan alam dan potensi bencana alam yang dapat terjadi. Bencana alam seringkali menimbulkan berbagai kerusakan mulai dari tingkat ringan hingga berat yang merusak sarana dan prasarana kelautan dan perikanan, perumahan penduduk hingga korban jiwa, yang memerlukan upaya mitigasi yang lebih baik.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan selama ini telah membawa hasil yang cukup menggembirakan. Perubahan tatanan global serta nasional yang berkembang dinamis menuntut percepatan pembangunan kelautan dan perikanan nasional secara nyata untuk mampu menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak cepat tersebut.

Munculnya paradigma untuk menjadikan pembangunan berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak pembangunan nasional, tercermin dalam keputusan politik nasional, sebagaimana terimplementasi dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang salah satu misinya menyatakan: Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

Untuk itu, perlu pelaksanaan konsep *blue economy* dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pengembangan berbagai inovasi yang berorientasi pada pelestarian sumber daya untuk memberikan manfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan. Pengembangan *blue economy* tersebut diharapkan dapat menciptakan daya saing yang lebih tinggi melalui inovasi dan efisiensi yang berkelanjutan, melakukan pembangunan tanpa merusak lingkungan, menciptakan berbagai industri baru di bidang kelautan dan perikanan, serta menciptakan lapangan kerja. Upaya pengembangan *blue economy* perlu pula diiringi upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan dan perikanan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta disertai upaya untuk mengelola wilayah laut nasional secara terintegrasi.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 telah mengamanatkan bahwa tujuan pengelolaan perikanan adalah untuk (1) meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil, (2) meningkatkan penerimaan dan devisa negara, (3) mendorong perluasan kesempatan kerja, (4) meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan, (5) mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan, (6) meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing, (7) meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan, (8) mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan lingkungan sumber daya ikan, dan (9) menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengamanatkan bahwa tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah (1) melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan, (2) menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, (3) memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan, dan (4) meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan kelautan dan perikanan sejak tahun 2010 sampai tahun 2012, diperlukan langkah-langkah terobosan yang bukan merupakan upaya terpisah dari kebijakan lain atau kebijakan sebelumnya, tetapi merupakan upaya terintegrasi yang saling memperkuat dalam rangka percepatan pembangunan kelautan dan perikanan, terutama untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan. Untuk itu, KKP akan mengembangkan industrialisasi kelautan dan perikanan yang akan dimulai sejak tahun 2012, dengan tujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui industrialisasi, para pelaku usaha perikanan mulai dari nelayan, pembudidaya ikan, serta pengolah dan pemasar hasil perikanan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing, sekaligus membangun sistem produksi yang modern dan terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Dengan demikian, industrialisasi perikanan diharapkan mampu mengokohkan struktur usaha perikanan nasional, yang membawa *multiplier effect* sebagai *prime mover* perekonomian nasional.

Disamping itu, KKP mulai tahun 2012 akan melaksanakan beberapa kebijakan baru yakni Program Peningkatan Kehidupan Nelayan yang merupakan bagian dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) dan pengembangan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di 3 Koridor Ekonomi yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan.

Sehubungan dengan hal tersebut, visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010-2014 yang telah ditetapkan sebelumnya dilakukan penyesuaian dan ditetapkan sebagai berikut:

A. Visi

Visi pembangunan kelautan dan perikanan adalah Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Melalui visi tersebut, diharapkan dapat terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang dapat memberikan nilai tambah terhadap produk kelautan dan perikanan sehingga memiliki daya saing yang tinggi, dengan tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

B. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka misi yang diemban adalah:

1. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
3. Memelihara Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

C. Tujuan ...

C. Tujuan

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah:

1. meningkatnya produksi dan produktivitas usaha kelautan dan perikanan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan:
 - a. meningkatnya peran sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional;
 - b. meningkatnya kapasitas sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan;
 - c. meningkatnya pendapatan.
2. berkembangnya diversifikasi dan pangsa pasar produk hasil kelautan dan perikanan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan:
 - a. meningkatnya ketersediaan hasil kelautan dan perikanan;
 - b. meningkatnya *branding* produk perikanan dan *market share* di pasar luar negeri;
 - c. meningkatnya mutu dan keamanan produk perikanan sesuai standar.
3. terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan:
 - a. terwujudnya pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan;
 - b. meningkatnya nilai ekonomi pulau-pulau kecil;
 - c. meningkatnya luas wilayah perairan Indonesia yang diawasi oleh aparaturngawas Kementerian Kelautan dan Perikanan.

D. Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan berdasarkan tujuan yang akan dicapai, dibagi dalam empat perspektif, yakni:

STAKEHOLDER PERSPECTIVE

1. meningkatnya kesejahteraan masyarakat melautan dan merikanan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah:
 - a. nilai tukar nelayan;
 - b. nilai tukar pembudidaya ikan;
 - c. rata-rata pendapatan pengolah & pemasar;
 - d. rata-rata pendapatan petambak garam; dan
 - e. pertumbuhan PDB perikanan.

CUSTOMER PERSPECTIVE

2. Meningkatnya ketersediaan produk kelautan dan perikanan yang bernilai tambah. IKU pencapaian sasaran strategis ini adalah:
 - a. jumlah produksi perikanan tangkap;
 - b. jumlah produksi perikanan budidaya;
 - c. jumlah produk olahan hasil perikanan;
 - d. jumlah produksi garam rakyat; dan
 - e. nilai produk KP non konsumsi pada tingkat pedagang besar.

3. Meningkatnya ...

3. Meningkatnya pemasaran produk kelautan dan perikanan di dalam dan luar negeri. IKU pencapaian sasaran strategis ini adalah:
 - a. nilai ekspor produk perikanan; dan
 - b. konsumsi ikan per kapita.
4. Meningkatnya pengelolaan SDKP secara berkelanjutan. IKU pencapaian sasaran strategis ini adalah:
 - a. proporsi tangkapan perikanan laut berada dalam batasan jumlah tangkapan yang diperbolehkan;
 - b. jumlah jenis ikan yang dikonservasi secara berkelanjutan;
 - c. jumlah pulau-pulau kecil termasuk pulau kecil terluar yang dikelola; dan
 - d. luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan.
5. Meningkatnya kesiapan masyarakat untuk usaha dan kesempatan kerja di bidang KP. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah Jumlah tenaga kerja baru di sektor KP.

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

6. Tersedianya kebijakan kelautan dan perikanan yang implementatif. IKU pencapaian sasaran strategis ini adalah:
 - a. rasio jumlah kajian yang dijadikan bahan kebijakan terhadap total kajian yang dihasilkan; dan
 - b. persepsi masyarakat KP terhadap kebijakan yang diterbitkan KKP (dalam skala likert 1-5).
7. Terselenggaranya modernisasi sistem produksi kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan yang optimal dan bermutu. IKU pencapaian sasaran strategis ini adalah:
 - a. jumlah unit perbenihan yang bersertifikat;
 - b. jumlah unit pembudidayaan ikan tersertifikasi dan memenuhi standar;
 - c. rasio kapal penangkap ikan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap, dan laik simpan;
 - d. utilitas UPI;
 - e. jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra;
 - f. persentase jumlah produksi garam rakyat Kualitas Produksi (KP1) dibandingkan total produksi;
 - g. rasio jumlah peserta yang dididik, dilatih, dan disuluh yang kompeten di bidang KP terhadap total peserta; dan
 - h. jumlah hasil litbang yang inovatif.
8. Terselenggaranya pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah:
 - a. wilayah perairan bebas *IUU fishing* dan kegiatan yang merusak SDKP;
 - b. ketaatan unit usaha perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. persentase jumlah nelayan Indonesia yang diadvokasi.

LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE

9. Tersedianya SDM KKP yang kompeten dan profesional. IKU pencapaian sasaran strategis ini adalah Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III.
10. Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses. IKU pencapaian sasaran strategis ini adalah:
 - a. *Service Level Agreement*; dan
 - b. persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5).
11. Terwujudnya *good governance* dan *clean goverment*. IKU pencapaian sasaran strategis ini adalah:
 - a. opini BPK atas Laporan Keuangan KKP;
 - b. tingkat kualitas akuntabilitas kinerja KKP;
 - c. nilai integritas KKP;
 - d. nilai Inisiatif anti korupsi; dan
 - e. nilai Penerapan RB KKP.
12. Terkelolanya anggaran secara optimal. IKU pencapaian sasaran strategis ini adalah Persentase penyerapan DIPA.

Secara terinci, IKU pembangunan kelautan dan perikanan dari Sasaran Strategis diatas beserta target yang akan dicapai tahun 2013-2014 sebagaimana tersebut pada tabel berikut:

Kode SS	URAIAN IKU		Target 2013	Target 2014
<i>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</i>				
SS1	1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	110	112
	2	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	104	105
	3	Rata-rata pendapatan pengolah & pemasar (KK/bulan)	Rp1,8 juta	Rp2,0 juta
	4	Rata-rata pendapatan petambak garam (KK/bulan)	Rp1,8 juta	Rp2,0 juta
	5	Pertumbuhan PDB Perikanan	7%	7,25%
<i>CUSTOMER PERSPECTIVE</i>				
SS2	6	Jumlah produksi perikanan tangkap (juta ton)	5,86	6,08
	7	Jumlah produksi perikanan budidaya (juta ton)	11,63	13,97
	8	Jumlah produk olahan hasil perikanan (juta ton)	5	5,2
	9	Jumlah produksi garam rakyat (juta ton)	0,545	3,3
	10	Nilai produk kelautan dan perikanan non konsumsi pada tingkat pedagang besar (Rp triliun)	1,5	2
SS3	11	Nilai ekspor produk perikanan (USD miliar)	4,5	5,65
	12	Konsumsi ikan per kapita (kg/kapita)	35,14	38.00
SS4	13	Proporsi tangkapan perikanan laut berada dalam batasan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB)	<100%	<100%
	14	Jumlah jenis ikan yang dikonservasi secara berkelanjutan	12 jenis	15 jenis
	15	Jumlah pulau-pulau kecil termasuk pulau kecil terluar yang dikelola	60	30
	16	Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	3,6 juta ha	4,5 juta ha
SS5	17	Jumlah tenaga kerja baru di sektor KP (orang)	208.002	226.052
<i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</i>				
SS6	18	Rasio jumlah kajian yang dijadikan bahan kebijakan terhadap total kajian yang dihasilkan	23%	33%
	19	Persepsi masyarakat kelautan dan perikanan terhadap kebijakan yang diterbitkan KKP (dalam skala likert 1-5)	3	3
SS7	20	Jumlah unit perbenihan yang bersertifikat (unit)	225	265
	21	Jumlah unit pembudidayaan ikan tersertifikasi dan memenuhi standar (unit)	7.000	8.000

Kode SS	URAIAN IKU		Target 2013	Target 2014
	22	Rasio kapal penangkap ikan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap, dan laik simpan	48,7%	51,0%
	23	Rasio pelabuhan perikanan yang memenuhi standar operasional	70	75
	24	Utilitas Unit Pengolahan Ikan (UPI) (%)	70	75
	25	Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra	≤ 10	≤ 10
	26	Persentase jumlah produksi garam rakyat Kualitas Produksi (KP1) dibandingkan total produksi	50% : 50%	80% : 20%
	27	Rasio jumlah peserta yang dididik, dilatih, dan disuluh yang kompeten di bidang kelautan dan perikanan terhadap total peserta	61,67%	65%
	28	Jumlah hasil litbang yang inovatif	87	90
SS8	29	Wilayah perairan bebas IUU fishing dan kegiatan yang merusak SDKP	41	39
	30	Ketaatan unit usaha perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	87,13%	97,50%
	31	Persentase jumlah nelayan Indonesia yang diadvokasi	100%	100%
<i>LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE</i>				
SS9	32	Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III	60%	50%
SS10	33	Service Level Agreement (SLA)	70%	75%
	34	Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5)	4	4,25
SS11	35	Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP	WTP	WTP
	36	Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja KKP	Nilai AKIP A	Nilai AKIP A
	37	Nilai integritas KKP	6,5	6,75
	38	Nilai inisiatif anti korupsi	7,5	7,75
	39	Nilai penerapan Reformasi Birokrasi KKP	75 (setara Level 4)	80 (setara level 4)
SS12	40	Persentase penyerapan DIPA	> 95%	> 95%

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 diarahkan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian.

Penguatan daya saing perekonomian tersebut, diantaranya ditempuh melalui peningkatan pembangunan kelautan dan sumber daya alam lainnya sesuai dengan potensi daerah secara terpadu serta meningkatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan kelautan meliputi industri kelautan seperti perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumber daya mineral yang dikembangkan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan.

Kerangka pencapaian tujuan RPJMN II tersebut dirumuskan lebih lanjut dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014 (Renstra KKP) yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan agenda pembangunan nasional, serta 11 (sebelas) prioritas pembangunan nasional, yakni (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

Pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010-2014 terkait dengan 5 prioritas pembangunan nasional, yakni:

1. Prioritas 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, dan data kependudukan yang baik.

2. Prioritas 4: Penanggulangan Kemiskinan

Penurunan tingkat kemiskinan nasional absolut dari 14,1% pada 2009 menjadi 8-10% pada 2014 dan perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah.

3. Prioritas 5: Ketahanan Pangan

Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Peningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 3,7% per tahun dan Indeks Nilai Tukar Petani sebesar 115-120 pada 2014.

4. Prioritas 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

Konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim.

5. Prioritas ...

5. Prioritas 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik
Program aksi untuk daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik ditujukan untuk pengutamakan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pasca konflik.

Disamping terkait dengan 5 prioritas pembangunan nasional tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga terkait dengan Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan dan Pembangunan Lintas Bidang, yakni yang terkait dengan Perubahan Iklim Global dan Pembangunan Kelautan Berdimensi Kepulauan.

Pembangunan kelautan dan perikanan berada dalam lingkup Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA-LH). SDA-LH sangat penting dalam pembangunan nasional, baik sebagai penyedia bahan baku bagi pembangunan ekonomi maupun sebagai pendukung sistem kehidupan. Sesuai dengan fungsinya tersebut, SDA-LH perlu dikelola dengan bijaksana agar pembangunan serta keberlangsungan kehidupan manusia dapat terjaga dan lestari saat ini dan di masa yang akan datang. Lingkup pembangunan bidang SDA-LH meliputi (1) revitalisasi pertanian, dan (2) perbaikan pengelolaan SDA dan perbaikan fungsi LH. Pelaksanaan dari kebijakan ini memberikan hasil terhadap meningkatnya peran SDA dan LH dalam perkembangan perekonomian nasional. Hal ini dicerminkan dengan semakin meningkatnya kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor-sektor yang berbasis SDA dan LH terhadap pembentukan PDB nasional selama periode tersebut. Selain itu, sektor-sektor yang berbasis SDA dan LH juga menjadi tumpuan utama bagi sebagian besar tenaga kerja, terutama di perdesaan dan pesisir.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan diimplementasikan dalam keterkaitannya dengan 5 prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Prioritas ke-1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, yang akan dilaksanakan antara lain melalui peningkatan kinerja kementerian dalam pelayanan publik, pengelolaan keuangan negara menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), penataan organisasi, dan peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur dan instansi pemerintah.
2. Prioritas ke-4: Penanggulangan Kemiskinan, yang dalam implementasinya akan dilaksanakan untuk memberikan kontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan nasional, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah, khususnya nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil kelautan dan perikanan, serta petambak garam melalui perluasan jangkauan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kelautan dan Perikanan, Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (klaster 4), pengembangan lembaga pembiayaan kelautan dan perikanan, peningkatan kapasitas skala usaha dan kewirausahaan menjadi usaha yang *bankable*.
3. Prioritas ke-5: Ketahanan Pangan, yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dan melanjutkan revitalisasi perikanan dalam mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan produksi, peningkatan daya saing dan nilai tambah produk perikanan

melalui ...

melalui pengembangan industrialisasi kelautan dan perikanan, pengembangan kawasan minapolitan, peningkatan konsumsi ikan per kapita, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Peningkatan laju pertumbuhan PDB perikanan menjadi 7,25% pada tahun 2014 dan Indeks Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya sebesar 115 pada tahun 2014.

4. Prioritas ke-9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, yang akan dilaksanakan melalui pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan pemanfaatan lingkungan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang keberlanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana melalui pengembangan kapasitas SDM dan riset tentang perubahan iklim dan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan laut.
5. Prioritas ke-10: Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik, yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal dan terdepan/terluar, serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pasca-konflik yang akan diimplementasikan melalui pengelolaan/pemberdayaan pulau-pulau terluar dan pengembangan ekonomi alternatif berbasis sumber daya kelautan dan perikanan.

Terkait dengan pengarusutamaan dan lintas bidang, pembangunan kelautan dan perikanan akan mendukung 3 pilar pembangunan berkelanjutan, yakni: (1) ekonomi, dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan PDB perikanan, dan dampak ekonomi melalui peningkatan kesejahteraan; (2) sosial, tingkat partisipasi masyarakat pelaku pembangunan, partisipasi masyarakat marjinal/minoritas (kaum miskin dan perempuan), dampak terhadap struktur sosial masyarakat, serta tatanan atau nilai sosial yang berkembang di masyarakat; dan (3) lingkungan hidup, dampak terhadap kualitas air, udara dan lahan serta ekosistem dan keanekaragaman hayati.

Disamping itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan strategi pembangunan nasional *pro-poor*, *pro-job*, *pro-growth*, dan *pro-environment*, akan dilakukan melalui:

1. *Pro poor*

Pendekatan *Pro-poor* dilakukan melalui pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan.

2. *Pro job*

Pendekatan *Pro-job* dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan budidaya yang belum tergarap dan penumbuhan wirausaha baru untuk menurunkan tingkat pengangguran nasional. Usaha membuka lapangan kerja diiringi dengan dukungan pengembangan akses terhadap modal dan kepastian berusaha.

3. *Pro growth*

Pendekatan *pro-growth* dilakukan untuk mewujudkan pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan sebagai pilar ketahanan ekonomi nasional melalui transformasi pelaku ekonomi kelautan dan perikanan, dari pelaku ekonomi subsisten menjadi pelaku usaha modern, melalui berbagai dukungan pengembangan infrastruktur, industrialisasi dan modernisasi.

4. *Pro-environment*

Pendekatan *pro-environment* dilakukan melalui upaya pemulihan dan pelestarian lingkungan perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Dalam rangka mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustainable growth*) berdasarkan keadilan, KKP akan mengimplementasikan prinsip-prinsip *blue economy* dalam pembangunan kelautan dan perikanan sebagaimana telah disampaikan Presiden Republik Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Rio+20 di Rio de Janeiro, Brazil untuk mengelola dan melestarikan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan melalui penggunaan sumber daya kelautan dan perikanan secara efisien dan tidak merusak lingkungan, menyinergikan pengelolaan ekosistem laut dengan ketahanan pangan, strategi pembangunan ekonomi dan sosial serta transisi ekonomi, pasar, industri dan masyarakat menuju pola yang lebih berkelanjutan.

Pembangunan kelautan dan perikanan juga dilaksanakan dalam rangka mendukung kerja sama lintas sektor/instansi terkait seperti: pemberdayaan perempuan, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, dan lain sebagainya. Disamping itu, KKP juga melaksanakan beberapa Rencana Aksi Nasional (RAN) diantaranya RAN perubahan iklim, RAN hak asasi manusia, RAN Pemberantasan Korupsi, RAN Kepemudaan dan lain sebagainya.

Menjabarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan, maka arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2013-2014 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan produktivitas, efisiensi, dan nilai tambah produk.
2. Pengembangan dan pengawasan sistem jaminan mutu dan *traceability* (penelusuran) produk hasil perikanan dan jaminan ketersediaan bahan baku industri.
3. Konservasi dan rehabilitasi sumberdaya kelautan dan perikanan serta pengelolaan pulau-pulau kecil dan upaya adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
4. Pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
5. Pengembangan sumberdaya manusia dan iptek kelautan dan perikanan.
6. Peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat perikanan dengan fokus pada Program Peningkatan Kehidupan Nelayan.
7. Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi sektor kelautan dan perikanan, terutama di Koridor Ekonomi Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Maluku-Papua.

Selanjutnya, strategi yang akan dilakukan untuk melaksanakan arah kebijakan nasional dan KKP sebagaimana tersebut di atas adalah melalui:

1. Pengembangan Kawasan

a. Minapolitan

Minapolitan merupakan upaya percepatan pengembangan pembangunan kelautan dan perikanan di sentra-sentra produksi perikanan yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Pengembangan minapolitan bertujuan untuk (i) meningkatkan produksi perikanan, produktivitas usaha, dan meningkatkan kualitas

produk ...

produk kelautan dan perikanan, (ii) meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan yang adil dan merata, serta (iii) mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah dan sentra-sentra produksi perikanan sebagai penggerak ekonomi rakyat. Adapun sasaran pengembangan minapolitan adalah (i) ekonomi rumah tangga masyarakat kelautan dan perikanan skala kecil makin kuat, (ii) usaha kelautan dan perikanan kelas menengah ke atas makin bertambah dan berdaya saing tinggi, serta (iii) sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi nasional.

Pendekatan pengembangan minapolitan dilakukan melalui:

1) Ekonomi Kelautan dan Perikanan Berbasis Wilayah

Mendorong penerapan manajemen hamparan untuk mencapai skala ekonomi, mencegah penyebaran penyakit, meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, sekaligus mengintegrasikan pemenuhan kebutuhan sarana produksi, proses produksi, pengolahan dan pemasaran hasil dan pengelolaan lingkungan dalam suatu kesisteman yang mapan.

2) Kawasan Komoditas Unggulan

Memacu pengembangan komoditas yang memiliki kriteria (i) bernilai ekonomis tinggi, (ii) teknologi tersedia, (iii) permintaan pasar besar, dan (iv) dapat dikembangkan secara massal.

3) Sentra Produksi

Minapolitan berada dalam kawasan pemasok hasil perikanan (sentra produksi perikanan) yang dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakatnya. Seluruh sentra produksi kelautan dan perikanan menerapkan teknologi inovatif dengan kemasan dan mutu terjamin.

4) Unit Usaha

Seluruh unit usaha dilakukan dengan menggunakan prinsip bisnis secara profesional dan berkembang dalam suatu kemitraan usaha yang saling memperkuat dan menghidupi.

5) Penyuluhan

Penguatan kelembagaan dan pengembangan jumlah penyuluh merupakan salahsatu syarat mutlak keberhasilan pengembangan minapolitan. Penyuluh akan berperan sebagai fasilitator dan pendamping penerapan teknologi penangkapan dan budidaya ikan serta pengolahan hasil perikanan.

6) Lintas Sektor

Minapolitan dikembangkan dengan dukungan dan kerjasama berbagai instansi terkait untuk mendukung kepastian usaha antara lain terkait dengan sarana dan prasarana pemasaran produk perikanan, tata ruang wilayah, penyediaan air bersih, listrik, akses jalan, dan BBM.

b. Pengembangan Ekonomi Regional

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Tahun 2011-2025, terdapat 6 (enam) Koridor Ekonomi (KE) yang akan dikembangkan, yakni KE Sumatera,

KE Jawa, KE Kalimantan, KE Sulawesi, KE Bali-Nusa Tenggara, dan KE Papua-Kepulauan Maluku.

Pelaksanaan MP3EI dikoordinasikan oleh Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI), yang diketuai oleh Presiden R.I., dengan Ketua Harian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. KP3EI dibantu oleh Tim Kerja, yang terdiri dari Tim Kerja Regulasi, Tim Kerja Konektivitas, Tim Kerja SDM dan Iptek, serta 6 (enam) Tim Kerja Koridor Ekonomi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) No. 35/M.EKON/08/2011 tentang Tim Kerja pada KP3EI, Menteri Kelautan dan Perikanan ditunjuk sebagai Ketua Tim Kerja Koridor Ekonomi Sulawesi, dimana Koridor Ekonomi Sulawesi akan mengembangkan 5 kegiatan ekonomi utama, yakni pangan, kakao, perikanan, migas, dan nikel.

Kegiatan kelautan dan perikanan tahun 2012-2014 akan mengisi pengembangan KE Sulawesi, KE Bali-Nusa Tenggara, dan KE Papua-Kepulauan Maluku. Beberapa kegiatan yang akan dikembangkan antara lain pengembangan prasarana pelabuhan perikanan, industri rumput laut, industri pengolahan ikan, budidaya ikan dan rumput laut, dan lain-lain.

Dalam kaitan ini, pengembangan akan dilakukan di beberapa lokasi Kawasan Perhatian Investasi (KPI) di setiap Koridor Ekonomi yang akan lebih diprioritaskan bagi masuknya investasi swasta. Diharapkan pada tahun 2014 dapat dicapai peningkatan PDRB di setiap Koridor Ekonomi.

2. Penguatan Kelembagaan, SDM dan Iptek

Kelembagaan yang kuat dan mandiri dengan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang berpengetahuan dan menguasai teknologi akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, SDM dan penguasaan iptek akan menjadi sangat penting, terutama dalam menghadapi persaingan pasar global.

Keberadaan kelompok masyarakat di bidang budidaya, penangkapan ikan, pengolahan, pemasaran dan kelompok pengawasan akan memberikan keuntungan bagi anggota kelompoknya. Melalui kelompok akan terjadi interaksi antar anggota untuk saling tukar pengalaman dan menumbuhkan kesadaran bersama untuk menguatkan posisi tawar, serta kemudahan dalam pembinaan, penyampaian informasi, dan diseminasi teknologi. Kelompok-kelompok yang sudah terbentuk, seperti Pokdakan (kelompok pembudidaya ikan), KUB (Kelompok Usaha Bersama) penangkapan ikan, KUGAR (Kelompok Usaha Garam Rakyat), Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas), dan Pokmas (Kelompok Masyarakat) pengelola terumbu karang, akan terus diupayakan keberadaannya dan ditingkatkan kapasitasnya, sedangkan kelompok-kelompok baru akan ditumbuhkan.

Selain penguatan kelembagaan kelompok masyarakat, diperlukan pula penguatan kelembagaan birokrasi pelaksana pembangunan KP, baik di pusat maupun di daerah. Kondisi ini diharapkan dapat mewujudkan kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terutama peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penguatan SDM KP diterjemahkan sebagai upaya peningkatan kapasitas SDM KP yang dilakukan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan/pendampingan. Sasaran upaya ini adalah masyarakat pelaku kegiatan (pelaku utama dan pelaku usaha) di bidang kelautan dan perikanan serta aparatur yang memfasilitasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Kapasitas yang diberikan merupakan penerjemahan ilmu pengetahuan dan teknologi terekomendasi ke dalam tataran praktis yang akan berimplikasi pada peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha dan produksi di sektor kelautan dan perikanan. Pendekatan pelaksanaannya dilakukan melalui 2 metode, yaitu pendekatan jangka pendek dan pendekatan jangka panjang. Pendekatan jangka pendek diarahkan melalui kegiatan pelatihan KP, untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan teknis para pelaku utama dan penyuluhan KP, sebagai upaya pendampingan yang dilakukan oleh para penyuluh perikanan agar para pelaku dapat melakukan kegiatan usahanya secara baik dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi dan kesejahteraannya, serta kegiatan pendidikan yang bersifat non formal yaitu *community collage* dan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan (Paket Kejarikan). Sedangkan pendekatan jangka panjang dilakukan melalui pendidikan formal yang menghasilkan lulusan terdidik kompeten yang akan mengisi kebutuhan SDM pelaku kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan.

Selanjutnya, penguatan dan penguasaan iptek pada kegiatan usaha masyarakat (penangkapan dan pembudidayaan ikan, pengolahan produk perikanan serta pemasarannya), pengelolaan sumber daya perikanan, dan pemanfaatan sumber daya baru ekonomi kelautan (farmasetika laut, energi laut, air laut dalam, garam dan produk turunannya), serta pengelolaan mitigasi terhadap bencana laut untuk meminimalkan dampak bencana terhadap masyarakat pesisir beserta aktivitasnya menjadi suatu kebutuhan dalam rangka mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang maju dan mandiri serta sejahtera.

Peran penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan dalam penguatan dan penguasaan iptek di masyarakat adalah dengan menyediakan data dan informasi, produk-produk biologi unggul (calon induk dan benih unggul, vaksin, probiotik, dsb), paket teknologi, rekomendasi, dan penerapan pengembangan kawasan yang diimplementasikan dalam bentuk teknologi tepat guna yang inovatif dan adaptif, serta model penerapan iptek di masyarakat. Dalam konteks skala dan pelaku ekonomi yang lebih luas penerapan iptek yang inovatif dan adaptif ditujukan untuk mendorong aktivitas ekonomi berbasis dan berorientasi laut dan perikanan, berdasarkan optimalisasi modal sosial masyarakat terutama kearifan lokal, efisiensi pemanfaatan sumberdaya untuk meminimalisasi limbah serta pengembangan sektor riil yang inovatif untuk kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan kelestarian ekosistem.

3. Pemberdayaan dan Kewirausahaan

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak dasar masyarakat secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan bermartabat, maka dibutuhkan pemberdayaan masyarakat.

Pada prinsipnya, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberi fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan menuju kemandirian dan kesejahteraan. Secara umum, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kultur, penguatan lembaga keuangan mikro, penggalangan partisipasi masyarakat, dan kegiatan usaha ekonomi produktif yang berbasis sumber daya lokal.

Pemberdayaan masyarakat ini dalam jangka panjang diarahkan untuk (a) peningkatan kemandirian masyarakat melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, penguatan modal dan penguatan kelembagaan masyarakat, (b) peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan berkelanjutan sesuai dengan kaidah kelestarian lingkungan, (c) pengembangan kemitraan dengan lembaga swasta dan pemerintah.

Pemberdayaan masyarakat merupakan perwujudan komitmen KKP dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di lingkungan KKP dilaksanakan melalui:

a. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kelautan dan Perikanan

KKP sejak tahun 2009 telah melaksanakan PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri KP) dibawah koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) dan berada dalam kelompok program pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri KP dilaksanakan melalui tiga komponen yaitu Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP), Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), dan Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT).

Tujuan PNPM Mandiri KP adalah meningkatkan kemampuan usaha dan kesejahteraan, pengembangan wirausaha anggota Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan (KUKP), serta meningkatnya kualitas lingkungan. Sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah berkembangnya KUKP di Kabupaten/Kota yang mencakup kegiatan perikanan tangkap, budidaya perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dan usaha garam rakyat serta masyarakat pesisir lainnya.

Melalui pelaksanaan PNPM Mandiri KP diharapkan diperoleh keluaran berupa tersalurkannya Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kepada KUKP, dan terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kelembagaan KUKP melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan, sedangkan hasil yang akan dicapai adalah meningkatnya produksi, pendapatan, dan penumbuhan wirausaha kelautan dan perikanan serta meningkatnya kualitas lingkungan di dalam kelompok mandiri.

b. Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN)

Sejak tahun 2012, Pemerintah telah menetapkan kebijakan baru yakni penerapan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI). Salah satu program terkait dengan KKP yang akan mengisi MP3KI adalah Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) yang merupakan bagian dari program-program pro rakyat/klaster 4. Untuk mengoordinasikan Program PKN, berdasarkan Keputusan Presiden No. 10 Tahun 2011, tanggal

15 April 2011, tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-rakyat, Menteri Kelautan dan Perikanan telah ditunjuk sebagai Ketua Kelompok Kerja Program PKN yang mengoordinasikan 12 K/L terkait, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Badan Pertanahan Nasional, Badan Pusat Statistik, Bappenas, Kementerian ESDM, dan lain-lain.

Dalam kaitan ini, Presiden R.I. telah mengarahkan secara spesifik untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pembuatan rumah sangat murah, pemberian pekerjaan alternatif dan tambahan bagi keluarga nelayan, skema UMK dan KUR, pembangunan SPBU solar, pembangunan *cold storage*, angkutan umum murah, fasilitas sekolah dan puskesmas, dan fasilitas 'bank rakyat'.

Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) dan TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), saat ini jumlah desa pesisir mencapai 10.640 desa, yang merupakan desa miskin dan harus ditangani secara lintas sektor. Sementara itu, dari penduduk miskin sebanyak 31,02 juta orang, sebesar 25,14% atau 7,87 juta orang adalah penduduk miskin di pesisir. Rumah Tangga Sasaran (RTS) di pesisir mencapai 2,13 juta RTS, yang terdiri dari RTS sangat miskin, miskin, dan hampir miskin. Kesemua ini merupakan target Program PKN yang lokasinya akan mengambil basis pada Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang untuk tahun 2011 akan masuk di 100 lokasi PPI, tahun 2012 di 400 lokasi PPI, tahun 2013 di 200 lokasi PPI, dan tahun 2014 di 116 lokasi PPI.

Untuk mengimplementasikan Program PKN tersebut, KKP akan melakukan intervensi langsung pada individu nelayan, kelompok nelayan, dan sarana prasarana PPI. Beberapa kegiatan untuk individu nelayan mencakup pemberian Sertifikasi Hak atas Tanah Nelayan dan bantuan peralatan rantai dingin. Untuk kelompok nelayan akan diberikan bantuan kapal penangkap ikan, bantuan langsung melalui Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan, serta pemberian pendampingan pada kelompok. Sedangkan untuk mendukung pengembangan sarana prasarana di PPI, akan dilakukan pembangunan *cold storage*/pabrik es, pembangunan SPDN (*Solar Packed Dealer* Nelayan), dan kendaraan roda 3 berinsulasi. Di samping itu, terdapat beberapa dukungan lintas sektor yang akan dilakukan pada lokasi Program PKN, antara lain dari Kementerian Perumahan Rakyat yang akan melakukan pembangunan rumah Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) dan Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP), Kementerian ESDM yang akan memberikan listrik sangat murah untuk rumah nelayan, Kementerian Pekerjaan Umum yang akan membangun sarana air bersih di lokasi PPI, Kementerian Perhubungan akan dilaksanakan *Basic Safety Training* (BST) untuk nelayan. Sementara itu, Kementerian Kesehatan akan memberikan pelayanan kesehatan dan penyediaan sarana/prasarana kesehatan, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan bantuan beasiswa dan penyediaan sekolah di lokasi desa nelayan. Diharapkan Program PKN dilakukan melalui kerjasama lintas Kementerian/Lembaga sehingga dapat mendorong terwujudnya percepatan peningkatan kesejahteraan nelayan.

Sementara itu dalam rangka pengembangan kewirausahaan dan peningkatan skala usaha (*entrepreneurship*), pelaksanaannya dilakukan melalui upaya membangun kepercayaan (*trust building*) bagi para pelaku, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan. Jiwa *entrepreneurship* para pelaku tersebut dibangun agar para pelaku dapat memanfaatkan fasilitas guna memperlancar pengelolaan usaha, baik yang diperoleh melalui kredit maupun melalui program-program pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah.

Pengembangan kewirausahaan dilakukan dalam rangka penciptaan lapangan usaha di sektor kelautan dan perikanan bagi sarjana terdidik yang masih menganggur. KKP akan melakukan pembekalan dan motivasi dilanjutkan dengan pelatihan/magang mengenai budidaya perikanan, penangkapan, pengolahan dan pemasaran serta pembuatan proposal.

4. Industrialisasi Kelautan dan Perikanan

Salah satu strategi pembangunan kelautan dan perikanan yang dimulai tahun 2012 adalah industrialisasi kelautan dan perikanan. Industrialisasi kelautan dan perikanan adalah integrasi sistem produksi hulu dan hilir untuk meningkatkan skala dan kualitas produksi, produktivitas, daya saing, dan nilai tambah sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Tujuan industrialisasi kelautan dan perikanan adalah terwujudnya percepatan pendapatan pembudidaya, nelayan, pengolah, pemasar, dan petambak garam. Sasaran yang akan dicapai melalui industrialisasi kelautan dan perikanan adalah meningkatnya skala dan kualitas produksi, produktivitas, daya saing, dan nilai tambah sumberdaya kelautan dan perikanan.

Pendekatan industrialisasi kelautan dan perikanan dilakukan melalui penataan sistem dan manajemen yang mencakup:

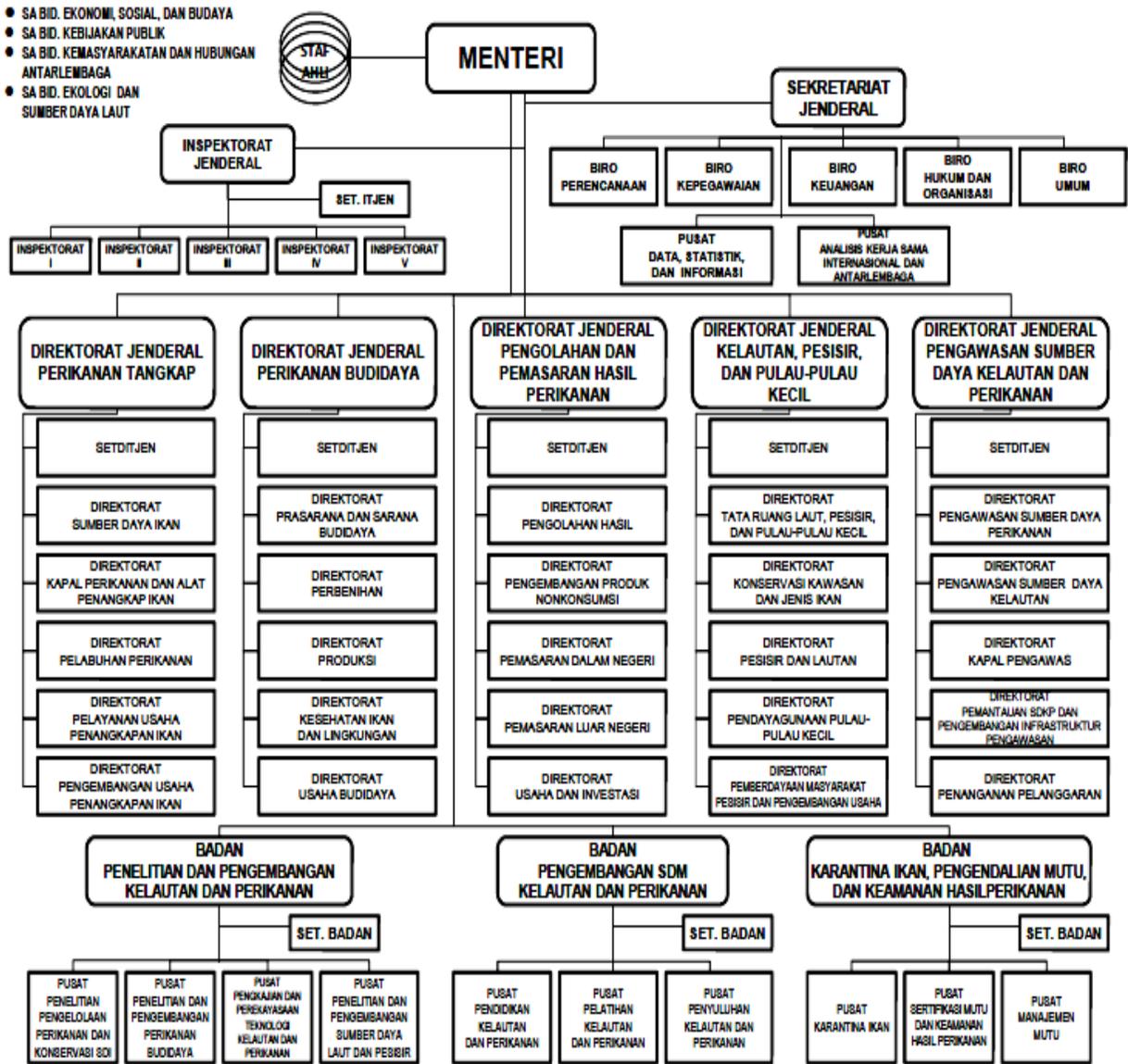
- a. Pengembangan komoditas dan produk unggulan berorientasi pasar;
- b. Penataan dan pengembangan kawasan dan sentra produksi secara berkelanjutan;
- c. Pengembangan konektivitas dan infrastruktur;
- d. Pengembangan usaha dan investasi;
- e. Pengembangan iptek dan sumber daya manusia;
- f. Pengendalian mutu dan keamanan produk;
- g. Penguatan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Langkah operasional pengembangan industrialisasi kelautan dan perikanan akan dijabarkan lebih lanjut dalam peta jalan (*roadmap*) industrialisasi kelautan dan perikanan tahun 2013-2014 untuk setiap komoditas dan lokasi prioritas.

Dengan dilaksanakannya industrialisasi kelautan dan perikanan yang dimulai secara bertahap sejak tahun 2012, maka ditargetkan diperoleh nilai tambah disisi hulu dan hilir. Hal tersebut sangat memerlukan banyak dukungan dari berbagai pihak, terutama dukungan penyediaan prasarana/infrastruktur produksi. Dalam kaitan ini, KKP akan mendorong sinergi lintas K/L, pemerintah daerah, perbankan, pelaku usaha dan masyarakat.

C. Program dan Kegiatan KKP

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kelautan dan perikanan akan diimplementasikan melalui program dan kegiatan, yang sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi sebagai berikut:



1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap

Tujuan program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap adalah meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan berbasis pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan, dengan sasaran peningkatan produksi perikanan tangkap (volume dan nilai), peningkatan pendapatan nelayan, dan peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NTN). Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Pengelolaan Sumberdaya Ikan;
- b. Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawasan Kapal Perikanan;
- c. Pengembangan, Pembangunan, dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan;

d. Pelayanan ...

- d. Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan;
- e. Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil; dan
- f. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Ditjen PT).

Unit kerja penanggung jawab program adalah Ditjen Perikanan Tangkap.

2. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Tujuan program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya adalah meningkatkan produksi perikanan budidaya, dengan sasaran program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil perikanan budidaya (volume dan nilai). Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan;
- b. Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan;
- c. Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan;
- d. Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan;
- e. Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan;
- f. Pengawasan dan Penerapan Teknologi Terapan Adaptif Perikanan Budidaya; dan
- g. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (Ditjen PB).

Unit kerja penanggung jawab program adalah Ditjen Perikanan Budidaya.

3. Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan

Tujuan program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan adalah mewujudkan produk perikanan prima yang berdaya saing di pasar domestik dan internasional, dengan sasaran peningkatan nilai ekspor hasil perikanan, peningkatan volume produk olahan, peningkatan rata-rata konsumsi ikan nasional, peningkatan nilai produk non konsumsi pada tingkat pedagang besar, dan peningkatan nilai investasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan;
- b. Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan;
- c. Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Luar Negeri Hasil Perikanan;
- d. Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan;
- e. Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi; dan
- f. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Ditjen P2HP).

Unit kerja penanggung jawab program adalah Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

4. Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Tujuan program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah mewujudkan tertatanya dan dimanfaatkannya wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari, dengan sasaran antara lain peningkatan luas Kawasan Konservasi Perairan yang dikelola secara berkelanjutan, pengembangan pengelolaan pulau-pulau kecil, dan jumlah produksi garam. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. Pendayagunaan Pesisir dan Lautan;
- c. Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil;
- d. Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis;
- e. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha; dan
- f. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ditjen KP3K).

Unit kerja penanggung jawab program adalah Ditjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.

5. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Tujuan program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah meningkatnya ketaatan dan ketertiban dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan sasaran perairan Indonesia bebas *illegal fishing* serta kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan;
- b. Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan;
- c. Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas;
- d. Peningkatan Operasional Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan;
- e. Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan; dan
- f. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP).

Unit kerja penanggung jawab program adalah Ditjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

6. Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Tujuan program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) serta menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan nasional dengan sasaran meningkatnya prosentase media pembawa yang memenuhi sistim jaminan kesehatan ikan melalui sertifikasi kesehatan ikan ekspor, impor dan antar area, menurunnya jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra, dan meningkatnya jumlah sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di

Unit Pengolahan Ikan sebagai persyaratan ekspor. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Pengembangan dan pembinaan perkarantina ikan;
- b. Pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;
- c. Pengembangan Sistem Manajemen Mutu di Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
- d. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan.

Unit kerja penanggung jawab program adalah Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM).

7. Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan

Tujuan program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan ini adalah menyiapkan ilmu, pengetahuan dan teknologi sebagai basis kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dengan sasaran diadopsinya dan dimanfaatkannya iptek hasil penelitian dan pengembangan oleh para pemangku kepentingan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan;
- b. Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya;
- c. Pengkajian dan Perekayasa Teknologi Kelautan dan Perikanan;
- d. Penelitian dan Pengembangan Kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya Laut dan Pesisir;
- e. Penelitian dan Pengembangan Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan;
- f. Penelitian dan Analisis Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan;
- g. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang Kelautan dan Perikanan).

Unit kerja penanggung jawab program adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.

8. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Tujuan program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan adalah meningkatkan kualitas SDM kelautan dan perikanan dengan sasaran meningkatnya kompetensi SDM kelautan dan perikanan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Pendidikan Kelautan dan Perikanan;
- b. Pelatihan Kelautan dan Perikanan;
- c. Penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
- d. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDMKP).

Unit kerja penanggung jawab program adalah Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan.

9. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP

Tujuan program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP adalah meningkatkan efektifitas peran pengawasan internal dengan sasaran program peningkatan kinerja dan akuntabilitas Aparatur KKP, terwujudnya AKIP yang efektif di KKP, dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Sekretariat Jenderal, BPSDMKP dan BKIPM serta pelaksana pembangunan KP.
- b. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP serta pelaksana pembangunan KP.
- c. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Ditjen Perikanan Budidaya dan Ditjen KP3K serta pelaksana pembangunan KP.
- d. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Ditjen P2HP dan Balitbang KP serta pelaksana pembangunan KP.
- e. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dengan Tujuan Tertentu pada Pelaksana Pembangunan KP dan Pengawasan pada Unit Kerja Inspektorat Jenderal.
- f. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal.

Unit kerja penanggung jawab program adalah Inspektorat Jenderal.

10. Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP

Tujuan program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP adalah meningkatkan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan dengan sasaran meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KKP, kualitas akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan KKP. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monitoring Evaluasi Pembangunan KP;
- b. Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian KKP;
- c. Pembinaan Pelaksanaan dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan KKP;
- d. Pembinaan dan Koordinasi Penyiapan Produk Hukum dan Penataan Organisasi KKP;
- e. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas KKP;
- f. Pengembangan Data, Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan;
- g. Pengembangan dan Pembinaan Kerjasama Internasional dan Antar Lembaga Bidang Kelautan dan Perikanan;
- h. Perumusan dan Pengembangan Kebijakan Kelautan.

Unit kerja penanggung jawab program adalah Sekretariat Jenderal.

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan, serta target pembangunan 2010-2014 menurut program dan kegiatan yang telah terinci dalam *output* dan *outcome*. Pendanaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010-2014 telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang

RPJMN 2010-2014, yakni dengan pagu indikatif sebesar Rp30,42 triliun. Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu yakni periode tahun 2010-2012, maka pendanaan pembangunan kelautan dan perikanan telah dilakukan penyesuaian berdasarkan *resource envelope* yang dialokasikan setiap tahun melalui pagu anggaran KKP tahun 2010-2012. Rincian indikator kinerja program, kegiatan, target, dan kebutuhan pendanaan per program dan per kegiatan tahun 2013-2014 sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran II???.

D. Dukungan Lintas Sektor

Pembangunan kelautan dan perikanan secara utuh memerlukan dukungan instansi terkait serta peran serta masyarakat luas. Adapun beberapa bentuk dukungan kegiatan yang diperlukan dari instansi terkait antara lain sebagaimana tabel berikut:

Dukungan Lintas Sektor yang Diharapkan

No	Kegiatan	Dukungan yang Diharapkan	K/L dan Institusi Terkait
1.	Penyediaan sarana dan prasarana pada kawasan atau sentra produksi perikanan	a. Penyediaan sarana air bersih b. Pembangunan akses jalan dan jalan lingkungan c. Pembangunan saluran irigasi untuk budidaya perikanan d. Penyediaan jaringan listrik e. Penyediaan BBM perikanan dan pasokan untuk SPDN f. Penyediaan sarana, prasarana, dan layanan kesehatan g. Penyediaan sarana, prasarana, dan layanan pendidikan	– Kementerian Pekerjaan Umum – Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral – Kementerian Kesehatan – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Penyediaan permodalan usaha kelautan dan perikanan	a. Skim khusus untuk usaha kelautan dan perikanan b. Penyediaan alokasi dana bergulir melalui mekanisme Badan Layanan Umum (BLU)	– Kementerian Keuangan – Perbankan – Lembaga Keuangan lainnya
3.	Pengendalian impor ikan ilegal	a. Pengawasan impor ikan b. Pengawasan distribusi	– Kementerian Keuangan (Bea Cukai) – Kementerian Perdagangan
4.	Pemberantasan <i>illegal fishing</i>	Operasi pengawasan terpadu pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	– TNI-AL – POLRI – BAKORKAMLA

No	Kegiatan	Dukungan yang Diharapkan	K/L dan Institusi Terkait
5.	Pengembangan Iptek kelautan dan perikanan	a. Penelitian dasar di bidang kelautan dan perikanan b. Penelitian dan Eksplorasi Sumber Daya Laut Dalam dan Dasar Laut c. Kerjasama penelitian dan rekayasa teknologi	– LIPI – BPPT – BMKG – Badan Informasi Geospasial – Perguruan Tinggi

E. Kerjasama Luar Negeri

Kebijakan kerjasama luar negeri bidang kelautan dan perikanan adalah:

1. meningkatkan dan memperkuat kerjasama internasional baik kerjasama bilateral, regional maupun multilateral serta kerjasama antar lembaga nasional dan internasional di bidang kelautan dan perikanan (pemerintah, dunia usaha, asosiasi, *stakeholders*, LSM);
2. meningkatkan peran serta KKP dalam menentukan kebijakan di forum-forum atau organisasi internasional di bidang kelautan dan perikanan; dan
3. meningkatkan kerjasama teknik dengan negara-negara sahabat sebagai sarana untuk percepatan pembangunan kelautan dan perikanan, khususnya dalam penguasaan teknologi.

Sedangkan prinsip-prinsip khusus untuk pengembangan kerjasama luar negeri adalah:

1. mengutamakan pelestarian terhadap sumber daya alam kelautan dan perikanan;
2. memberikan perlindungan terhadap nelayan dan pelaku usaha perikanan;
3. mengupayakan peningkatan pengetahuan dan kapasitas SDM dalam bidang kelautan dan perikanan; dan
4. menjunjung tinggi penegakan kedaulatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam kaitan ini, KKP telah melakukan kerjasama luar negeri, baik kerjasama bilateral, regional, maupun multilateral. Kerjasama bilateral dilaksanakan dengan beberapa negara seperti: Australia, China, Jepang, Korea Selatan, Kanada, Malaysia, Mesir, Norwegia, Perancis, Spanyol, Swedia, Belanda, Thailand, Amerika Serikat, Kenya, Viet Nam, dan Arab Saudi. Kerjasama regional dilaksanakan dalam rangka kerjasama ASEAN, APEC, CTI, IOTC, CCSBT, WCPFC, NACA, BIMP-EAGA, IMT-GT, AFCF, ASWGF, AMAF, SEAFDEC, dan D-8. Sedangkan kerjasama multilateral dilakukan bersama FAO, UNICPOLOS, UNFSA, UNFCCC, UNEP, UNESCO, UNIDO, WTO, ILO, dan IMO.

Dalam rangka penguatan kerjasama luar negeri, KKP akan terus:

1. mendukung perjuangan kepentingan nasional R.I. melalui kerjasama luar negeri;
2. mendukung diplomasi Republik Indonesia di dunia internasional;
3. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui kerja sama luar negeri;

4. menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan global agar tetap bisa digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat R.I.;
5. mendukung upaya penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan institusi kelautan dan perikanan; dan
6. mendapatkan transfer teknologi tepat guna di sektor kelautan dan perikanan guna mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan *Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security* (CTI-CFF) telah dibentuk Sekretariat Nasional CTI-CFF Indonesia, yang akan mengoordinasikan beberapa kegiatan meliputi bentang laut, pengelolaan perikanan berbasis ekosistem, pengembangan Kawasan Konservasi Perairan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dan pengelolaan spesies terancam punah.

Kegiatan tersebut akan dilaksanakan bekerjasama dengan negara-negara anggota CTI-CFF, donor, dan partner serta dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah lokasi pelaksanaan kegiatan.

BAB IV
PENUTUP

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2010-2014 merupakan suatu dokumen yang disusun oleh KKP, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, visi serta misi Presiden terpilih serta program kerja Kabinet Indonesia Bersatu II masa bakti 2009-2014, dan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.

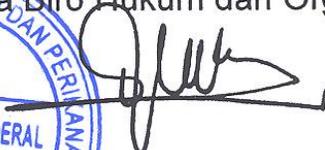
Dengan adanya penyesuaian terhadap visi, misi, tujuan, sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), arah kebijakan dan strategi pembangunan kelautan dan perikanan yang tertuang dalam dokumen Renstra KKP 2010-2014, maka dokumen ini menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) KKP dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) KKP tahun 2013-2014.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan juga dihasilkan berkat adanya dukungan sektor terkait lainnya dan masyarakat luas. Kerja keras dari seluruh jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dan sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk menjadikan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Hanung Cahyono



LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3/PERMEN-KP/
 TENTANG
 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN
 2010-2014

SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA, DAN TARGET TAHUN 2013-2014
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)	
				2013	2014	2013	2014
PROGRAM							
1	Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap					1,810,755	1,894,452
<i>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</i>							
1		Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	1	NTN	110	112	
2			Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	7	7.25		
<i>CUSTOMER PERSPECTIVE</i>							
2		Meningkatnya ketersediaan produk kelautan dan perikanan yang berkualitas dan bernilai tambah	3	Jumlah produksi perikanan tangkap (juta ton)	5.86	6.08	
4			Nilai produksi perikanan tangkap (Rp. Trilyun)	76.59	82.62		
3		Meningkatnya pengelolaan SDKP yang berkelanjutan	5	Proporsi tangkapan perikanan laut berada dalam batasan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) (%)	<100	<100	
6			Rasio alat tangkap yang ramah lingkungan terhadap total alat tangkap (%)	80	100		
7			Rasio antara Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) yang disusun dengan RPP yang diimplementasikan (%)	40	50		
4		Terwujudnya usaha perikanan tangkap yang maju	8	Rata-rata Pendapatan Nelayan (Rp/orang/bulan)	1,594,296	1,820,775	
9			Penyaluran modal usaha perikanan tangkap (Rp)	720	840		
5		Meluasnya kesiapan masyarakat untuk usaha dan kesempatan kerja	10	Jumlah awak kapal perikanan yang meningkat kemampuannya dan tersertifikasi (orang)	210	240	
11			Jumlah pembinaan kenelayanan (lokasi)	43	57		
12			Jumlah pembinaan dan pengelolaan usaha untuk mendukung minapolitan & industrialisasi (lokasi)	33	57		
6		Meningkatnya usaha dan investasi di bidang Perikanan tangkap	13	Nilai investasi usaha perikanan tangkap (Rp trilyun)	16	18	
14			Rasio pemanfaatan lahan industri di pelabuhan perikanan (%)	70	80		
<i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</i>							
7		Tersedianya kebutuhan inovasi teknologi hasil litbang & rekayasa untuk modernisasi sistem penangkapan ikan	15	Rasio teknologi inovasi sarana penangkapan ikan yang dapat dimanfaatkan masyarakat nelayan terhadap jumlah ujiterap (%)	40	50	
8		Tersedianya kebijakan Perikanan Tangkap Sesuai kebutuhan	16	Jumlah kebijakan publik bidang perikanan tangkap (buah)	70	60	
17			Jumlah draft peraturan perundang-undangan bidang perikanan tangkap (buah)	21	21		
9		Terselenggaranya modernisasi Sistem produksi kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan yang optimal dan bermutu	18	Rasio kapal penangkap ikan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap, dan laik simpan (%)	48.7	51.0	
19			Rasio pelabuhan perikanan yang memenuhi standar operasional (%)	70	75		
20			Rasio jumlah produksi perikanan tangkap yang diolah terhadap jumlah produksi perikanan tangkap yang dipasarkan segar (%)	50	52		
21			Persentase usaha penangkapan ikan yang memiliki dan yang bermitra dengan UPI (%)	40	45		
22			Rasio Perairan Umum Daratan (PUD) yang terkelola sumber daya ikannya (%)	60	70		
23	Jumlah kelompok usaha bersama (KUB) yang Mandiri (KUB)	1,600	1,800				
10		Terselenggaranya Pengendalian Usaha Perikanan Tangkap	24	Tingkat ketaatan pelaku usaha yang melaporkan hasil kegiatan usaha sesuai ketentuan yang berlaku (%)	70	75	
25			Tingkat penyelesaian rekomendasi pelanggaran perijinan sesuai ketentuan yang berlaku (%)	100	100		
26			Tingkat ketaatan pemangku kepentingan dalam penyampaian hasil tangkapan (%)	86.0	90.2		
11		Terselenggaranya sistem perijinan penangkapan ikan yang terintegrasi	27	Waktu pelayanan usaha penangkapan ikan (SIUP, SIPI, SIKPI) (hari/dokumen permohonan)	7	7	
<i>LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE</i>							
12		Tersedianya SDM Ditjen Perikanan Tangkap yang kompeten dan profesional di DJPT	28	Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II, III dan IV di DJPT (%)	60	50	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)	
				2013	2014	2013	2014
		13 Tersedianya informasi perikanan tangkap yang valid, handal dan mudah diakses di DJPT	29 <i>Service Level Agreement</i> (SLA) di DJPT (%)	70	75		
			30 Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi di DJPT (skala likert 1-5)	4	4.25		
		14 Terwujudnya <i>good governance</i> dan <i>clean government</i> di DJPT	31 Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di DJPT (%)	100	100		
			32 Tingkat Kualitas Akuntabilitas DJPT	Nilai AKIP A	Nilai AKIP A		
			33 Nilai Integritas DJPT	6.75	7		
			34 Nilai Inisiatif anti korupsi DJPT	7.5	7.75		
			35 Nilai Penerapan RB di DJPT	75 setara level 4)	80 setara level 4)		
		15 Terkelolanya anggaran yang optimal di DJPT	36 Persentase penyerapan DIPA DJPT (%)	> 95	> 95		
KEGIATAN							
A Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)						47,936	60,351
STAKEHOLDER PERSPECTIVE							
		1 Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	1 NTN	110	112		
			2 Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	7	7.25		
CUSTOMER PERSPECTIVE							
		2 Meningkatnya ketersediaan produk perikanan yang berkualitas dan bernilai tambah	3 Jumlah produksi perikanan tangkap (juta ton)	5.86	6.08		
			4 Nilai produksi perikanan tangkap (Rp. Trilyun)	76.59	82.62		
		3 Meningkatnya pengelolaan SD Perikanan yang berkelanjutan	5 Proporsi tangkapan perikanan laut berada dalam batasan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB)	<100	<100		
			6 Rasio antara Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) yang disusun dengan RPP yang diimplementasikan (%)	40	50		
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE							
		4 Tersedianya kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Ikan sesuai kebutuhan	7 Jumlah kebijakan publik bidang pengelolaan SDI (buah)	14	16		
			8 Jumlah draft peraturan perundang-undangan bidang perikanan tangkap (buah)	8	8		
		5 Terselenggaranya Modernisasi Sistem produksi perikanan, yang optimal dan berkelanjutan	9 Rasio jumlah produksi Sumberdaya ikan yang diolah terhadap jumlah produksi perikanan tangkap yang dipasarkan segar melalui Datik, CDS document Scheme, Logbook serta Observer (%)	50	52		
			10 Rasio Perairan Umum Daratan (PUD) yang terkelola sumber daya ikannya (%)	60	70		
			11 Akumulasi kawasan perairan Laut teritorial dan perairan kepulauan yang dpulihkan (ha)	15	20		
			12 Jumlah lembaga pengelola perikanan LPTK	1	2		
		6 Terselenggaranya Pengendalian usaha Perikanan Tangkap	13 Presentasi jumlah lokasi rumah ikan yang terjaga fungsi dan peruntukannya (%)	90	95		
			14 Prosentase rekomendasi FKPPS Naasional yang dilaksanakan dengan yang ditindak lanjuti (%)	50	60		
			15 Tingkat ketaatan pemangku kepentingan dalam penyampaian laporan hasil tangkapan (%)	86.0	90.2		
			16 Rasio Rekomendasi kapal bebas IUU terhadap kapal yang terdaftar di RFMO (%)	100	100		
			17 Rasio kepatuhan Indonesia terhadap Resolusi dan CMM di RFMO	75	80		
			18 Rasio kebijakan pengelolaan SDI di ekosistem PUD yang diimplementasikan (%)	-	25		
			19 Rasio efektivitas kegiatan pemulihan sumberdaya ikan di perairan umum daratan (%)	-	33.3		
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE							
		7 Tersedianya SDM Dit SDI yang kompeten dan profesional	20 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II, III dan IV di SDI (%)	60	50		
		8 Tersedianya informasi perikanan tangkap yang valid, handal dan mudah diakses di Dit SDI	21 <i>Service Level Agreement</i> (SLA) di SDI(%)	70	75		
		9 Terwujudnya <i>good governance</i> dan <i>clean government</i> di Dit SDI	22 Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di SDI	100	100		
			23 Tingkat Kualitas Akuntabilitas Dit. SDI	Nilai AKIP A	Nilai AKIP A		
			24 Nilai Inisiatif anti korupsi DJPT	7.5	7.75		
			25 Nilai Penerapan RB di DJPT	75 setara level 4)	80 setara level 4)		
		10 Terkelolanya anggaran yang optimal di Dit SDI	26 Persentase penyerapan DIPA -SDI	> 95	> 95		
B Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan						268,031	254,294
STAKEHOLDER PERSPECTIVE							
		1 Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	1 NTN	110	112		
			2 Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	7.0	7.25		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)			
				2013	2014	2013	2014		
		CUSTOMER PERSPECTIVE							
		2 Meningkatkan ketersediaan produk kelautan dan perikanan yang berkualitas dan bernilai tambah	3 Jumlah produksi perikanan tangkap (juta ton)	5.86	6.08				
			4 Nilai produksi perikanan tangkap (Rp. Trilyun)	76.59	82.62				
		3 Meningkatnya pengelolaan SDKP yang berkelanjutan	5 Proporsi tangkapan perikanan laut berada dalam batasan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB)	<100	<100				
			6 Rasio alat tangkap yang ramah lingkungan terhadap total alat tangkap (%)	80	100				
		4 Meluasnya kesiapan masyarakat untuk usaha dan kesempatan kerja	7 Jumlah awak kapal perikanan yang meningkat kemampuannya dan tersertifikasi (orang)	210	240				
		INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE							
		5 Tersedianya kebijakan Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan sesuai kebutuhan	8 Jumlah kebijakan publik bidang perikanan tangkap (buah)	4	5				
			9 Jumlah draft peraturan perundang-undangan bidang perikanan tangkap (buah)	4	4				
		6 Terselenggaranya modernisasi Sistem produksi kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan yang optimal dan bermutu	10 Rasio kapal penangkap ikan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap, dan laik simpan (%)	48.7	51,0				
			11 Rasio armada kapal perikanan terhadap kapasitas terpasang total UPI (%)	50	52				
		7 Terselenggaranya Kegiatan Pendaftaran dan Penandaan KP yang valid	12 Rasio kapal > 30 GT yang tertandai terhadap total kapal >30 di WPP-NRI	80	100				
			13 Rasio kapal > 30 GT yang terdaftar terhadap total di WPP-NRI	80	100				
		LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE							
		8 Tersedianya SDM KAPI yang kompeten dan profesional di DJPT	14 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II , III dan IV di Dit. KAPI (%)	60	50				
		9 Tersedianya informasi KAPI yang valid, handal dan mudah diakses	15 <i>Service Level Agreement</i> (SLA) di Dit. KAPI (%)	70	75				
		10 Terwujudnya good governance dan clean government di KAPI	16 Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Dit. KAPI	100	100				
			17 Tingkat Kualitas Akuntabilitas Dit. KAPI	Nilai AKIP A	Nilai AKIP A				
			18 Nilai Inisiatif anti korupsi KAPI	7.5	7.75				
			19 Nilai Penerapan RB di KAPI	75 setara level 4)	80 setara level 4)				
		11 Terkelolanya anggaran yang optimal di KAPI	20 Persentase penyerapan DIPA Dit.KAPI	> 95	> 95				
C	Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan					942,157	1,121,035		
		STAKEHOLDER PERSPECTIVE							
		1 Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	1 NTN	110	112				
			2 Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	7.0	7.25				
		CUSTOMER PERSPECTIVE							
		2 Meningkatkan ketersediaan produk kelautan dan perikanan yang berkualitas dan bernilai tambah	3 Jumlah produksi perikanan tangkap (juta ton)	5.86	6.08				
			4 Nilai produksi perikanan tangkap (Rp Trilyun)	76.59	82.62				
		INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE							
		3 Tersedianya kebijakan pelabuhan perikanan sesuai kebutuhan	5 Jumlah kebijakan publik bidang pelabuhan perikanan (buah)	11	11				
			6 Jumlah draft peraturan perundang-undangan bidang pelabuhan perikanan (buah)	1	1				
		4 Terselenggaranya modernisasi sistem produksi kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan yang optimal dan bermutu	7 Rasio pelabuhan perikanan yang dibangun terhadap rencana induk pelabuhan perikanan nasional (%)	86	87				
			8 Rasio pelabuhan perikanan yang memenuhi standar operasional (%)	70	75				
			9 Jumlah pelabuhan perikanan yang dilakukan pengendalian pembangunan konstruksi (unit)	57	35				
			10 Persentase pelabuhan perikanan yang terpantau dan/atau terevaluasi (%)	100	100				
		5 Terselenggaranya kegiatan operasional yang terkendali di pelabuhan perikanan	11 Rasio jumlah PP yang memiliki Syahbandar terhadap jumlah total pelabuhan perikanan yang operasional (%)	18	20				
		LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE							
		6 Tersedianya SDM Dit. PP yang kompeten dan profesional di Dit.PP	12 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II, III dan IV di Direktorat Pelabuhan Perikanan (%)	60	50				
		7 Tersedianya informasi pelabuhan perikanan yang valid, handal dan mudah diakses di Dit.PP	13 <i>Service Level Agreement</i> (SLA) di Direktorat Pelabuhan Perikanan(%)	70	75				
		8 Terwujudnya good governance dan clean government di Dit.PP	14 Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Direktorat Pelabuhan Perikanan	100	100				
			15 Tingkat Kualitas Akuntabilitas Dit. PP	Nilai AKIP A	Nilai AKIP A				
			16 Nilai Inisiatif anti korupsi di Direktorat Pelabuhan Perikanan	7.5	7.75				
			17 Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi (RB) di Direktorat Pelabuhan Perikanan	75 setara level 4)	80 setara level 4)				
		9 Terkelolanya anggaran yang optimal di Dit.PP	18 Persentase penyerapan DIPA DJPT di Direktorat Pelabuhan Perikanan	> 95	> 95				

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)	
				2013	2014	2013	2014
D	Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan					22,061	22,730
		STAKEHOLDER PERSPECTIVE					
	1	Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	1	NTN	110	112	
			2	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	7	7.25	
		CUSTOMER PERSPECTIVE					
	2	Meningkatnya ketersediaan produk kelautan dan perikanan yang berkualitas dan bernilai tambah	3	Jumlah produksi perikanan tangkap (juta ton)	5.86	6.08	
			4	Nilai produksi perikanan tangkap (Rp. Trilyun)	76.59	82.62	
	3	Meningkatnya pengelolaan SDKP yang berkelanjutan	5	Proporsi tangkapan perikanan laut berada dalam batasan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) (%)	<100	<100	
			6	Rasio alat tangkap yang ramah lingkungan terhadap total alat tangkap (%)	80	100	
	4	Terwujudnya Good governance dan Clean Government di DJPT	7	Indeks Kepuasan Masyarakat di DJPT	6.75	7	
		INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE					
	5	Tersedianya kebijakan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap Sesuai kebutuhan	8	Jumlah kebijakan publik bidang pelayanan usaha perikanan tangkap	5	5	
			9	Jumlah draft peraturan perundang-undangan bidang pelayanan usaha perikanan tangkap	1	1	
	6	Terselenggaranya modernisasi sistem produksi kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan yang optimal dan bermutu	10	Persentase usaha penangkapan ikan yang memiliki dan yang bermitra dengan UPI (%)	40	45	
			11	Persentase jumlah realisasi kapal dari alokasi dalam SIUP (%)	70	80	
	7	Terselenggaranya Pengendalian Usaha Perikanan Tangkap	12	Tingkat ketaatan pelaku usaha yang melaporkan hasil kegiatan usaha sesuai ketentuan yang berlaku (%)	70	80	
			13	Tingkat penyelesaian rekomendasi pelanggaran perijinan sesuai ketentuan yang berlaku (%)	100	100	
	8	Terselenggaranya sistem perijinan penangkapan ikan yang terintegrasi	14	Waktu pelayanan usaha penangkapan ikan (SIUP, SIPI, SIKPI) (hari/dokumen permohonan)	7	7	
		LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE					
	9	Tersedianya SDM Dit. PUP yang kompeten dan profesional	15	Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II, III dan IV di Dit. PUP (%)	60	50	
	10	Tersedianya informasi perikanan tangkap yang valid, handal dan mudah diakses di PUP	16	Service Level Agreement (SLA) di Dit. PUP (%)	70	75	
	11	Terwujudnya good governance dan clear government di dit. PUP	17	Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Dit. PUP (%)	100	100	
			18	Prosentase penanganan keluhan pelanggan (%)	100	100	
			19	Tingkat Kualitas Akuntabilitas Dit. PUP	Nilai AKIP A	Nilai AKIP A	
			20	Nilai Inisiatif anti korupsi Dit. PUP	7.5	7.75	
			21	Nilai Penerapan RB Dit. PUP	75 setara level 4)	80 setara level 4)	
	12	Terkelolanya anggaran yang optimal di Dit. PUP	22	Persentase penyerapan DIPA Dit. PUP (%)	> 95	> 95	
E	Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil					362,820	252,496
		STAKEHOLDER PERSPECTIVE					
	1	Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	1	NTN	110	112	
			2	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	7.0	7.25	
		CUSTOMER PERSPECTIVE					
	2	Meningkatnya ketersediaan produk kelautan dan perikanan yang berkualitas dan bernilai tambah	3	Jumlah produksi perikanan tangkap (juta ton)	5.86	6.08	
			4	Nilai produksi perikanan tangkap (Rp. Trilyun)	76.59	82.62	
	3	Terwujudnya usaha perikanan tangkap yang maju	5	Rata-rata Pendapatan Nelayan (Rp/orang/bulan)	1,594,296	1,820,775	
			6	Penyaluran modal usaha perikanan tangkap (Rp)	720	840	
	4	Meluasnya kesiapan masyarakat untuk usaha dan kesempatan kerja	7	Jumlah pembinaan kenelayanan (lokasi)	43	57	
			8	Jumlah pembinaan dan pengelolaan usaha Untuk mendukung minapolitan & industrialisasi (lokasi)	33	57	
	5	Meningkatnya usaha dan investasi di bidang Perikanan tangkap	9	Nilai investasi usaha perikanan tangkap (Rp trilyun)	16	18	
		INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE					
	6	Tersedianya kebijakan Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil sesuai kebutuhan	10	Jumlah kebijakan publik bidang pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil (buah)	7	7	
			11	Jumlah draft peraturan perundang-undangan bidang pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil (buah)	0	2	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)					
				2013	2014	2013	2014				
		7 Terselenggaranya modernisasi Sistem produksi kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan yang optimal dan bermutu	12 Jumlah kelompok usaha bersama (KUB) yang Mandiri (KUB)	1,600	1,800						
			13 Jumlah KUB Penerima BLM PUMP Perikanan Tangkap (KUB)	3,000	2,000						
			14 Jumlah lokasi Pembinaan dan Pengelolaan Usaha	43	57						
			15 Jumlah lokasi pengembangan Minapolitan Perikanan Tangkap	43	57						
			16 Jumlah lokasi Peningkatan Akses Modal Usaha Nelayan	43	57						
			17 Jumlah Kemitraan Usaha Penangkapan Ikan	5	5						
			18 Jumlah kawasan pengembangan investasi usaha perikanan tangkap di lokasi industrialisasi perikanan tangkap	43	57						
		8 Terselenggaranya Pengendalian Kegiatan PUI dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil Perikanan Tangkap	19 Persentase KUB penerima PUMP yang terevaluasi tingkat produksi dan pendapatannya (%)	60	70						
		LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE									
		9 Tersedianya SDM Direktorat PUI yang kompeten dan profesional di Dit. PUI	20 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II, III dan IV pada Dit. PUI (%)	60	50						
		10 Tersedianya informasi perikanan tangkap yang valid, handal dan mudah diakses di Dit PUI	21 <i>Service Level Agreement</i> (SLA) di Dit. PUI (%)	70	75						
		11 Terwujudnya good governance dan clean government di Dit PUI	22 Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Dit. PUI (%)	100	100						
23 Tingkat Kualitas Akuntabilitas Dit. PUI	Nilai AKIP A		Nilai AKIP A								
24 Nilai Inisiatif anti korupsi DJPT	7.5		7.75								
25 Nilai Penerapan RB di DJPT	75 setara level 4)	80 setara level 4)									
12 Terkelolanya anggaran yang optimal di Dit PUI	26 Persentase penyerapan DIPA Dit. PUI	> 95	> 95								
F	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap					167,748	183,543				
		CUSTOMER PERSPECTIVE									
		1 Tersedianya SDM DJPT yang kompeten dan profesional	1 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II, III dan IV di DJPT (%)	60	50						
		2 Tersedianya informasi perikanan tangkap yang valid, handal dan mudah diakses di DJPT	2 <i>Service Level Agreement</i> (SLA) di DJPT (%)	70	75						
			3 Persepsi user terhadap kemudahan akses Informasi di DJPT (skala likert 1-5)	4	4.25						
		3 Terwujudnya good governance & clean government di DJPT	4 Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di DJPT (%)	100	100						
			5 Tingkat ketaatan terhadap SAP DJPT (%)	100	100						
			6 Tingkat kepatuhan terhadap SPI DJPT (%)	100	100						
			7 Kecukupan pengungkapan BAS dalam LK DJPT	cukup	cukup						
			8 Nilai perencanaan Kinerja DJPT	27	27.5						
			9 Nilai Pengukuran Kinerja DJPT	15.5	15.5						
			10 Nilai Pelaporan Kinerja DJPT	11.5	12						
			11 Nilai Evaluasi Internal (Program dan Akuntabilitas) DJPT	4	4.5						
			12 Nilai Pencapaian Kinerja DJPT	15.5	16						
			13 Nilai Inisiatif Anti Korupsi DJPT	7.5	7.75						
		14 Nilai Penerapan RB DJPT	75 setara level 4)	80 setara level 4)							
		4 Terkelolanya anggaran secara optimal di DJPT	15 Persentase penyerapan DIPA DJPT (%)	> 95	> 95						
		5 Terwujudnya kerja sama dalam dan luar negeri di bidang perikanan tangkap yang implementatif	16 Jumlah perjanjian yang telah diimplementasikan di bidang perikanan tangkap	1	1						
			17 Persentase realisasi komitmen lintas K/L (%)	60	75						
		INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE									
		6 Terintegrasinya sistem informasi di DJPT	18 Persentase Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) yang terintegrasi dibanding total TIK yang ada (%)	25	40						
			19 Rasio jumlah pemberitaan yang negatif dibanding total pemberitaan tentang DJPT (%)	20	10						
		7 Terselenggaranya RB sesuai roadmap RB DJPT	20 Persentase rencana aksi RB di DJPT yang telah terpenuhi (%)	100	100						
		8 Terselenggaranya perencanaan program Perikanan Tangkap yang efektif	21 Persentase bahan kebijakan dan program yang disusun sesuai kebutuhan (%)	100	100						
			22 Persentase bahan dokumen anggaran yang disusun sesuai ketentuan(%)	100	100						
		9 Terselenggaranya pengelolaan anggaran yang optimal	23 Persentase Pengendalian Dokumen Anggaran (%)	100	100						
			24 Persentase Ketepatan Pencatatan Transaksi Keuangan Dan BMN (%)	100	100						
			25 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian LK (bulanan, triwulanan, semester dan tahunan) (%)	100	100						

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)			
				2013	2014	2013	2014		
		10	Terlaksananya kerja sama dalam dan luar negeri di bidang perikanan tangkap sesuai perjanjian kerja sama	26	Rasio jumlah ruang lingkup kerja sama internasional yang berhasil dilaksanakan terhadap total ruang lingkup kerja sama di bidang perikanan tangkap (%)	50	50		
				27	Rasio jumlah ruang lingkup kerja sama antar lembaga yang berhasil dilaksanakan terhadap total ruang lingkup kerja sama di bidang perikanan tangkap (%)	50	50		
<i>LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE</i>									
		11	Tersedianya SDM Setditjen PT yang kompeten dan profesional	28	Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II, III dan IV Lingkup Setditjen PT (%)	60	50		
		12	Tersedianya informasi lingkup Setditjen PT yang valid, handal dan mudah diakses	29	<i>Service Level Agreement</i> Setditjen PT (%)	70	75		
				30	Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi Setditjen PT (Skala likert 1-5)	4	4.25		
		13	Terwujudnya good governance & clean government lingkup Setditjen PT	31	Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Setditjen PT (%)	100	100		
				32	Tingkat Kualitas Akuntabilitas Setditjen PT	Nilai AKIP A	Nilai AKIP A		
				33	Nilai Inisiatif anti korupsi Setditjen PT	7.5	7.75		
				34	Nilai Penerapan RB Setditjen PT	75 setara level 4)	80 setara level 4)		
		14	Terkelolanya anggaran Setditjen PT secara optimal	35	Persentase penyerapan DIPA Setditjen PT (%)	> 95	> 95		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)	
				2013	2014	2013	2014
PROGRAM							
2	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya					1,247,663	1,035,206
STAKEHOLDER PERSPECTIVE							
1 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan		1	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	104	105		
		2	Pertumbuhan PDB Perikanan	7.00%	7.25%		
CUSTOMER PERSPECTIVE							
2 Meningkatnya ketersediaan produk kelautan dan perikanan yang bernilai tambah		3	Jumlah produksi perikanan budidaya (Juta Ton)	11.63	13.97		
		4	Nilai produksi perikanan budidaya (miliar rupiah)	96,778	124,300		
3 Meluasnya kesiapan masyarakat dan kesempatan kerja di bidang kelautan dan perikanan		5	Jumlah tenaga kerja baru bidang perikanan budidaya	132,865	146,282		
		6	Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yang memenuhi standar kelembagaan (kelompok)	1,957	2,400		
4 Meningkatnya usaha dan investasi di bidang perikanan budidaya		7	Jumlah unit usaha pembenihan ikan yang operasional (unit)	33,303	40,250		
		8	Jumlah rumah tangga pembudidaya ikan (RTP) (unit)	1,751,000	1,842,000		
		9	Jumlah investasi yang mendukung kegiatan usaha perikanan budidaya (Miliar Rupiah)	21,799	19,348		
INTERNAL PROCESS PERSPEKTIVE							
5 Tersedianya kebutuhan inovasi teknologi hasil litbang dan rekayasa untuk modernisasi sistem produksi budidaya perikanan		10	Jumlah teknologi inovatif budidaya hasil perekayasaan (paket)	14	14		
		6 Tersedianya kebijakan Perikanan Budidaya sesuai kebutuhan		11	Jumlah RSNi 3 yang disusun		
12	Jumlah kebijakan publik perikanan budidaya yang diselesaikan			30	35		
13	Jumlah draft peraturan perundang-undangan perikanan budidaya			3	3		
7 Terselenggaranya modernisasi sistem produksi KP, pengolahan, dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu		14	Jumlah unit perbenihan yang bersertifikat (unit)	165	225		
		15	Jumlah unit pembudidayaan ikan yang disertifikasi (unit)	7,000	8,000		
		16	Rasio kawasan perikanan budidaya yang terfasilitasi sarana dan prasarana sesuai dengan perencanaan tahunan (persen)	20	30		
		17	Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi anjuran perikanan budidaya (kelompok)	132	132		
8 Terselenggaranya pengendalian usaha perikanan budidaya		18	Jumlah laboratorium Uji yang Memenuhi Standar Teknis (Laboratorium Kualitas Air, Laboratorium HPI dan Laboratorium Residu)	43	45		
		19	Tingkat kepuasan publik terhadap prosedur layanan perizinan (skala likert A - D)	A	A		
9 Terwujudnya sistem kesehatan ikan dan lingkungan perikanan budidaya yang memadai		20	Tingkat ketaatan pemangku kepentingan dalam penyampaian data perikanan budidaya (persen)	100	100		
		21	Prosentase produk perikanan budidaya yang bebas residu atau dibawah ambang batas residu yang diperbolehkan sesuai dengan perminataan pasar (persen)	96%	96%		
		22	Jumlah Penyakit Ikan Penting yang Dapat Dikendalikan	15	17		
		23	Jumlah kawasan budidaya yg mendapatkan pengawasan /pengendalian kualitas lingkungan (kawasan)	99	111		
		LEARN AND GROWTH PERSPEKTIVE					
10 Tersedianya SDM Ditjen PB yang kompeten dan profesional		24	Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III, IV dan V lingkup Ditjen PB	60%	50%		
		25	Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat fungsional	60%	50%		
11 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang PB		26	Service Level Agreement di Ditjen PB (persen)	70	75		
		27	Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Ditjen PB (skala likert 1-5)	4	4.25		
12 Terwujudnya good governance & clean government di Ditjen PB		28	Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Ditjen PB (persen)	100%	100%		
		29	Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Ditjen PB	Nilai AKIP A	Nilai AKIP A		
		30	Nilai integritas Ditjen PB	6.75	7		
		31	Nilai Inisiatif anti korupsi Ditjen PB	7.5	7.75		
13 Terkelolanya anggaran secara optimal di Ditjen PB		32	Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Ditjen PB	75 setara level 4)	80 setara level 4)		
		33	Prosentase penyerapan Anggaran Ditjen PB (persen)	> 95	> 95		
KEGIATAN							
A	Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan					77,779	97,681
STAKEHOLDER PERSPECTIVE							
1 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan		1	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	104	105		
		2	Pertumbuhan PDB Perikanan	7.00%	7.25%		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)	
				2013	2014	2013	2014
CUSTOMER PERSPECTIVE							
2	Meningkatnya ketersediaan produk kelautan dan perikanan yang bernilai tambah	3	Jumlah produksi perikanan budidaya (Juta Ton)	11.63	13.97		
		4	Jumlah Produksi Ikan Hias Budidaya (juta)	1,100	1,100		
3	Meningkatnya usaha di bidang perikanan budidaya	5	Jumlah rumah tangga pembudidaya ikan (RTP) (unit)	1,751,000	1,842,000		
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE							
4	Tersedianya bahan kebijakan di bidang produksi Perikanan Budidaya yang sesuai kebutuhan	6	Jumlah draft kebijakan publik di bidang produksi perikanan budidaya yang diselesaikan	30	35		
		7	Jumlah draft peraturan perundang-undangan di bidang produksi perikanan budidaya	1	1		
		8	Jumlah RSNI 3 bidang produksi yang disusun	16	18		
5	Terselenggaranya sistem produksi KP, Pengolahan dan Pemasaran Produk KP yang optimal dan bermutu	9	Jumlah unit pembudidayaan ikan yang disertifikasi (unit)	7,000	8,000		
		10	Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi anjuran perikanan budidaya (kelompok)	132	132		
6	Terselenggaranya pengendalian usaha produksi perikanan budidaya	11	Tingkat kepuasan publik terhadap prosedur layanan Pendaftaran Pakan Ikan (skala likert A - D) bahan baku dan pakan ikan	A	A		
		12	Tingkat ketaatan pemangku kepentingan dalam penyampaian data produksi perikanan budidaya (persen)	100	100		
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE							
7	Tersedianya SDM Dit. Produksi yang kompeten dan profesional	13	Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III, IV dan V lingkup Dit. Produksi Budidaya	60%	50%		
		14	Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat fungsional	60%	50%		
8	Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang Produksi Budidaya	15	Service Level Agreement di Dit. Produksi Budidaya (persen)	70%	75%		
		16	Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Dit. Produksi Budidaya (skala likert 1-5)	4	4.25		
9	Terwujudnya good governance & clean government di Dit. Produksi	17	Rasio rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Dit. Produksi Budidaya (persen)	100%	100%		
		18	Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Dit. Produksi Budidaya	Nilai AKIP A	Nilai AKIP A		
		19	Nilai integritas Dit. Produksi Budidaya	6.75	7		
		20	Nilai Inisiatif anti korupsi Dit. Produksi Budidaya	8	9		
		21	Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Dit. Produksi Budidaya	80 (setara level 4)	90 (setara level 4)		
10	Terkelolanya anggaran secara optimal di Dit. Produksi Budidaya	22	Prosentase penyerapan Anggaran Dit. Produksi (persen)	>95%	>95%		
B	Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan					92,121	67,023
STAKEHOLDER PERSPECTIVE							
1	Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	1	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	104	105		
		2	Pertumbuhan PDB Perikanan	7.00%	7.25%		
CUSTOMER PERSPECTIVE							
2	Meningkatnya ketersediaan produk kelautan dan perikanan	3	Jumlah produksi perikanan budidaya (Juta Ton)	11.63	13.97		
3	Meningkatnya usaha di bidang perbenihan perikanan budidaya	4	Jumlah unit usaha pembenihan ikan yang operasional (unit)	33,303	40,250		
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE							
4	Tersedianya kebijakan Perbenihan Perikanan Budidaya sesuai kebutuhan	5	Jumlah draft kebijakan publik perbenihan perikanan budidaya yang diselesaikan	1	1		
		6	Jumlah draft peraturan perundang-undangan perbenihan perikanan budidaya	1	1		
		7	Jumlah RSNI 3 bidang perbenihan yang disusun	20	22		
5	Terselenggaranya sistem produksi KP pengolahan, dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu	8	Jumlah unit perbenihan yang bersertifikat (unit)	165	225		
		9	Jumlah benih dengan mutu terjamin (milyar ekor)	60.7	61		
		10	Jumlah Produksi Induk unggul (juta ekor)	12.6	13		
6	Terselenggaranya pengendalian usaha perikanan budidaya di bidang perbenihan	11	Jumlah bibit rumput laut (ribu ton)	750	750		
		12	Tingkat kepuasan publik terhadap prosedur pelayanan perijinan induk dan benih (skala likert A-D)	A	A		
13		13	Tingkat ketaatan pemangku kepentingan dalam penyampaian data perbenihan perikanan	100	100		
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE							
7	Tersedianya SDM Dit. Perbenihan yang kompeten dan profesional	14	Indeks kesejangan kompetensi pejabat eselon II, III, dan IV lingkup Dit Perbenihan (persen)	60	50		
8	Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang Perbenihan	15	Service level Agreement di Dit Perbenihan (persen)	70	75		
		16	Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Dit Perbenihan (skala likert 1 - 5)	4	4.25		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)	
				2013	2014	2013	2014
		9 Terwujudnya good governance & clean government di lingkup Dit. Perbenihan	17 Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi yang diberikan di Dit. Perbenihan (persen)	100	100		
			18 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Dit. Perbenihan	Nilai AKIP A	Nilai AKIP A		
			19 Nilai integritas Dit. Perbenihan	6.75	7		
			20 Nilai Inisiatif anti korupsi Dit. Perbenihan	8	9		
			21 Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Dit. Perbenihan	80	90		
		10 Terkelolanya anggaran secara optimal di Dit. Perbenihan	22 Penyerapan Anggaran Dit. Perbenihan (persen)	>95%	>95%		
C	Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan					52,805	68,134
		STAKEHOLDER PERSPECTIVE					
		1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan	1 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	104	105		
			2 Pertumbuhan PDB Perikanan	7.00%	7.25%		
		CUSTOMER PERSPECTIVE					
		2 Meningkatnya ketersediaan produk kelautan dan perikanan yang bernilai tambah	3 Jumlah produksi perikanan budidaya (Juta Ton)	11.63	13.97		
		INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE					
		3 Tersedianya kebijakan bidang kesehatan ikan dan lingkungan yang sesuai kebutuhan	4 Jumlah draft kebijakan publik bidang kesehatan ikan dan lingkungan yang diselesaikan	5	7		
			5 Jumlah draft peraturan perundang-undangan bidang kesehatan ikan dan lingkungan	1	1		
			6 Jumlah RSNI-3 bidang Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang dihasilkan	20	22		
		4 Terselenggara-nya modernisasi sistem produksi KP, pengolahan, dan pemasaran, produk KP yang optimal dan bermutu	7 Jumlah Sentra Produksi Budidaya yang Terkendali dan Terehabilitasi Perairannya	71	91		
			8 Jumlah dan Jenis Obat Ikan, Bahan Kimia dan Biologi yang sesuai Ketentuan	233	242		
		5 Terselenggara-nya sistem produksi KP, pengolahan, dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu	9 Jumlah laboratorium uji yang memenuhi standar teknis (Laboratorium Kualitas Air, Laboratorium HPI dan Laboratorium Residu)	43	45		
		6 Terselenggaranya pengendalian usaha perikanan budidaya bidang kesehatan ikan dan lingkungan	10 Tingkat kepuasan publik terhadap prosedur layanan perizinan obat ikan (skala likert A - D)	A	A		
			11 Tingkat ketaatan pemangku kepentingan dalam penyampaian data di bidang Kesehatan Ikan dan Lingkungan (persen)	100%	100%		
		7 Terwujudnya sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perikanan Budidaya yang memadai	12 Prosentase produk perikanan budidaya yang bebas residu atau dibawah ambang batas residu yang diperbolehkan sesuai dengan permintaan pasar (persen)	96%	96%		
		8 Tersedianya SDM DJPB yang kompeten dan profesional di bidang Kesehatan Ikan dan Lingkungan	13 Jumlah Penyakit Ikan Penting yang dapat dikendalikan	15	17		
		LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE					
		9 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang Kesehatan Ikan dan Lingkungan	14 Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III dan IV Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan	60%	50%		
			15 Service Level Agreement di Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan (persen)	70%	75%		
			16 Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan (skala likert 1-5)	4	4.25		
			17 Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan (persen)	100%	100%		
			18 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Nilai AKIP A	Nilai AKIP A		
		10 Terwujudnya good governance & clean government di Direktorat. Kesehatan Ikan dan Lingkungan	19 Nilai integritas Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan	6.75	7		
			20 Nilai Inisiatif anti korupsi Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan	8	9		
		11 Terkelolanya anggaran secara optimal di Direktorat Kesehatan Ikan dan Lingkungan	21 Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan	80 (setara level 4)	90 (setara level 4)		
			22 Prosentase penyerapan Anggaran Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan	>95%	>95%		
D	Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan					312,784	311,585
		STAKEHOLDER PERSPECTIVE					
		1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan	1 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	104	105		
			2 Pertumbuhan PDB Perikanan	7.00%	7.25%		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)			
				2013	2014	2013	2014		
		CUSTOMER PERSPECTIVE							
		2 Meningkatkan ketersediaan produk kelautan dan perikanan yang bernilai tambah	3 Jumlah produksi perikanan budidaya (juta ton)	11.63	13.97				
		3 Meluasnya kesiapan masyarakat usaha dan kesempatan kerja di bidang kelautan dan perikanan	4 Jumlah tenaga kerja perikanan budidaya (orang)	6,343,300	7,765,600				
			5 Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yang memenuhi standar kelembagaan (kelompok)	1,957	2,400				
		4 Meningkatkan usaha dan investasi di bidang perikanan budidaya	6 Jumlah investasi yang mendukung kegiatan usaha perikanan budidaya (Miliar Rupiah)	21,799	21,799				
			7 Jumlah pemberdayaan kelompok pembudidaya melalui pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP) (kelompok)	4,000	5,000				
		INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE							
		5 Tersedianya kebijakan Perikanan Budidaya yang sesuai kebutuhan di Lingkup Dit Usaha Budidaya	8 Jumlah draft kebijakan publik perikanan budidaya yang diselesaikan di Lingkup Dit Usaha Budidaya	3	35				
			9 Jumlah draft peraturan perundang-undangan perikanan budidaya terkait Lingkup Dit Usaha Budidaya	3	3				
		6 Terselenggaranya Sistem Usaha Budidaya yang optimal dan bermutu	10 Jumlah Informasi dan promosi usaha perikanan budidaya (paket)	33	33				
			11 Tingkat keberhasilan wirausahawan dibidang pembudidayaan ikan	60%	65%				
		7 Tersedianya pengendalian usaha perikanan budidaya	12 Tingkat kepuasan publik terhadap prosedur layanan perizinan (skala likert A-D)	A	A				
			13 Tingkat ketaatan pemangku kepentingan dalam penyampaian data terkait Dit Usaha Budidaya (persen)	100%	100%				
			14 Unit usaha yang memperoleh layanan dan yang beraktifitas sesuai dengan ketentuan (unit)	580	600				
		LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE							
		8 Tersedianya SDM Dit Usaha Budidaya yang kompeten dan profesional	15 Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III,IV dan V lingkup Dit Usaha Budidaya	60%	50%				
		9 Tersedianya informasi Dit Usaha Budidaya yang valid dan handal serta mudah diakses	16 Service Level Agreement di Lingkup Dit Usaha Budidaya (persen)	70%	75%				
			17 Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Dit Usaha Budidaya (skala likert 1-5)	4	4.25				
		10 Terwujudnya good governance & clean government Lingkup Dit Usaha Budidaya	18 Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Dit Usaha Budidaya (persen)	100%	100%				
			19 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Dit Usaha Budidaya	Nilai AKIP A	Nilai AKIP A				
			20 Nilai integritas Dit Usaha Budidaya	6.75	7				
			21 Nilai Inisiatif anti korupsi Dit Usaha Budidaya	8	9				
		11 Terkelolanya anggaran secara optimal di Lingkup Dit Usaha Budidaya	22 Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Dit Usaha Budidaya	80	90				
			23 Presentase penyerapan Anggaran Dit Usaha Budidaya	95%	95%				
E	Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan					485,363	265,900		
		STAKEHOLDER PERSPECTIVE							
		1 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat KP	1 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	104	105				
			2 Pertumbuhan PDB Perikanan	7.00%	7.25%				
		CUSTOMER PERSPECTIVE							
		2 Meningkatkan Ketersediaan Produk Kelautan dan Perikanan	3 Jumlah produksi perikanan budidaya (Juta Ton)	11.63	13.97				
		INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE							
		3 Tersedianya Kebijakan Lingkup Prasarana & Sarana Budidaya sesuai kebutuhan	4 Jumlah RSNI 3 Bidang Prasarana dan Sarana budidaya yang disusun	8	13				
			5 Jumlah draft kebijakan publik bidang prasarana dan sarana perikanan budidaya yang diselesaikan	10	10				
			6 Jumlah draft peraturan perundang-undangan terkait prasarana dan sarana perikanan budidaya	1	1				
		4 Terselenggaranya sistem produksi KP, pengolahan, dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu	7 Rasio kawasan perikanan budidaya yang difasilitasi sarana dan prasarana sesuai dengan perencanaan tahunan (persen)	20					
			8 Jumlah Kelompok Pengelola Saluran Tambak secara partisipatif	20	30				
			9 Jumlah kawasan yang teridentifikasi potensi dan pemanfaatan lahannya untuk kegiatan perikanan budidaya	130	135				
			10 Jumlah Kawasan yang teridentifikasi kebutuhan dan standarisasi prasarana dan sarannya	449	541				
			11 Jumlah kawasan minapolitan yang berkembang (kabupaten/kota)	65	70				

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)	
				2013	2014	2013	2014
		5 Terselenggaranya pengendalian usaha perikanan budidaya bidang prasarana dan sarana	12 Tingkat ketaatan pemangku kepentingan dalam penyampaian data prasarana & sarana perikanan budidaya (persen)	100	100		
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE							
		6 Tersedianya SDM Dit. Prasarana & Sarana Budidaya yang kompeten dan profesional	13 Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III dan IV Dit. Prasarana & Sarana Budidaya	60%	50%		
		7 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang Prasarana & Sarana Budidaya	14 Service Level Agreement di Dit. Prasarana & Sarana Budidaya	70%	75%		
			15 Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Dit. Prasarana & Sarana (skala likert 1-5)	4	4.25		
		8 Terwujudnya good governance & clean government di Dit. Prasarana & Sarana Budidaya	16 Rasio rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Dit. Prasarana dan Sarana Budidaya (persen)	60%	50%		
			17 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Dit. Prasarana & Sarana Budidaya	Nilai AKIP A	Nilai AKIP A		
			18 Nilai integritas Dit. Prasarana & Sarana Budidaya	6.75	7		
			19 Nilai Inisiatif anti korupsi Dit. Prasarana & Sarana Budidaya	8	9		
			20 Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Dit. Prasarana & Sarana Budidaya	80 (setara level 4)	90 (setara level 4)		
		9 Terkelolanya anggaran secara optimal di Dit. Prasarana & Sarana Budidaya	21 Prosentase penyerapan Anggaran Dit. Prasarana & Sarana Budidaya (persen)	>95%	>95%		
F	Pengawasan dan Penerapan Teknologi Terapan Adaptif Perikanan Budidaya					8,890	11,501
STAKEHOLDER PERSPECTIVE							
	1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan	1	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	104	105		
		2	Pertumbuhan PDB Perikanan	7.00%	7.25%		
CUSTOMER PERSPECTIVE							
	2 Meningkatnya ketersediaan produk kelautan dan perikanan	3	Jumlah produksi perikanan budidaya (juta ton)	13.02	16.89		
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE							
	3 Tersedianya kebutuhan inovasi teknologi hasil litbang dan rekayasa untuk modernisasi sistem produksi budidaya budidaya laut	4	Jumlah teknologi inovatif budidaya hasil perekayasaan (paket)	14	16		
		4 Tersedianya kebijakan bidang budidaya sesuai kebutuhan	5	Jumlah bahan RSNI bidang perikanan budidaya	58	65	
	5 Terselenggaranya modernisasi sistem produksi KP, Pengolahan dan Pemasaran Produk KP yang optimal dan bermutu		6	Jumlah bahan kebijakan teknis perikanan budidaya	28	29	
		7	Jumlah Benih bermutu oleh UPT	131,796,800	145,437,667		
		8	Jumlah calon induk/Induk unggul oleh UPT	304,050	498,490		
		9	Jumlah diseminasi teknologi dalam rangka pengembangan kawasan budidaya	71	71		
		10	Jumlah daerah dalam pengawasan /pendampingan kawasan Minapolitan	41	44		
		11	Jumlah tenaga teknis binaan	1600	1600		
	6 Terselenggaranya pengendalian kualitas lingkungan usaha perikanan budidaya laut	12	Prosentase pemenuhan PNBP (%)	92.5%	95%		
		13	Jumlah kawasan budidaya yg mendapatkan pengawasan /pengendalian kualitas lingkungan (kawasan)	99	111		
		14	Jumlah pelayanan pemeriksaan sampel Uji di Lab. Keskanling	6500	6500		
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE							
	7 Tersedianya SDM yang kompeten dan profesional	15	Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III,IV dan V lingkup UPT (%)	60%	50%		
		16	Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat fungsional	60%	50%		
	8 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses	17	Service Level Agreement di lingkup UPT (persen)	70%	75%		
		18	Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di lingkup UPT (skala likert 1-5)	4	4.25		
	9 Terwujudnya good governance & clean government	19	Rasio rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di UPT (persen)	100%	100%		
		20	Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja UPT	Nilai AKIP A	Nilai AKIP A		
		21	Nilai Inisiatif anti korupsi UPT	8	9		
		22	Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi UPT	80 setara level 4)	90 setara level 4)		
	10 Terkelolanya anggaran secara optimal	23	Prosentase penyerapan Anggaran di UPT (persen)	> 95 %	> 95%		
G	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen. Perikanan Budidaya					217,917	213,379
CUSTOMER PERSPECTIVE							
	1 Tersedianya SDM Ditjen PB yang kompeten dan	1	Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III,IV dan V lingkup Ditjen PB	60%	50%		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)	
				2013	2014	2013	2014
			2 Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat fungsional	60%	50%		
		2 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang PB	3 Service Level Agreement di Ditjen PB (persen)	70%	75%		
			4 Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Ditjen PB (skala likert 1-5)	4	4.25		
		3 Terwujudnya good governance & clean government	5 Tingkat ketaatan terhadap SAP DJPB	100%	100%		
			6 Tingkat kepatuhan terhadap SPI DJPB	100%	100%		
			7 Kecukupan pengungkapan BAS dalam LK DJPB	cukup	cukup		
			8 Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di DJPB	100%	100%		
			9 Nilai perencanaan Kinerja DJPB	27	27.5		
			10 Nilai Pengukuran Kinerja DJPB	15.5	15.5		
			11 Nilai Pelaporan Kinerja DJPB	11.5	12		
			12 Nilai Evaluasi Program DJPB	4	4,5		
			13 Nilai Pencapaian Kinerja DJPB	15.5	16		
			14 Nilai Penerapan RB DJPB	80 (setara level 4)	90 setara level 4)		
		15 Persentase jumlah asset BMN yang dimanfaatkan dibanding dengan jumlah asset BMN yang ada	70%	80%			
		4 Terkelolanya anggaran secara optimal di Ditjen PB	16 Persentase penyerapan Anggaran Ditjen PB (persen)	> 95%	> 95%		
		5 Terwujudnya kerja sama bidang PB di dalam dan luar negeri yang implementatif	17 Persentase jumlah kerja sama yang di implementasikan	70%	80%		
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE							
		6 Terintegrasinya sistem informasi Ditjen Perikanan Budidaya	18 Persentase data dan informasi yang ditampilkan dalam website KKP dibandingkan dengan data yang dikirim dari Ditjen PB	100%	100%		
		7 Terselenggaranya pengelolaan anggaran yang optimal	19 Persentase kesesuaian rencana belanja dengan bagan akun standar	100%	100%		
			20 Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pengadaan B/J sesuai jadwal	100%	100%		
			21 Persentase ketepatan waktu penyampaian LK (bulanan, triwulanan, semester, tahunan)	100%	100%		
		8 Terselenggaranya RB Ditjen PB sesuai roadmap RB KKP	22 Persentase rencana aksi RB di Ditjen PB yang telah terpenuhi (%)	100%	100%		
		9 Terlaksananya kerja sama internasional dan antar lembaga sesuai ruang lingkup perjanjian kerja sama bidang PB	23 Rasio jumlah ruang lingkup kerja sama yang berhasil dilaksanakan terhadap total ruang lingkup kerja sama	80%	85%		
		10 Terselenggaranya perencanaan program perikanan budidaya yang efektif	24 Rasio jumlah anggaran yang dibutuhkan dibanding dengan jumlah anggaran yang diterima	80%	85%		
			25 Konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap rencana kerja pemerintah	80%	85%		
			26 Rasio hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti dalam perencanaan	80%	85%		
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE							
		10 Tersedianya SDM Setditjen PB yang kompeten dan profesional	27 Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III, IV dan V lingkup Setditjen PB	60%	50%		
			28 Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat fungsional lingkup Setditjen PB	60%	50%		
		11 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang PB	29 Service Level Agreement di Setditjen PB (persen)	70%	75%		
			30 Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Setditjen PB (skala likert 1-5)	4	4,25		
		12 Terwujudnya good governance & clean government di Ditjen PB	31 Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Setditjen PB (persen)	100%	100%		
			32 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Setditjen PB	Nilai AKIP A	Nilai AKIP A		
			33 Nilai integritas Setditjen PB	6.75	7		
			34 Nilai Inisiatif anti korupsi Setditjen PB	8	9		
			35 Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Setditjen PB	80	90		
		13 Terkelolanya anggaran Setditjen PB secara optimal	36 Persentase penyerapan Anggaran Setditjen PB (persen)	> 95%	> 95%		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)	
				2013	2014	2013	2014
PROGRAM							
3	Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan					653,736	590,917
		STAKEHOLDER PERSPECTIVE					
	1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat KP	1 Rata-rata pendapatan pengolah & pemasar (KK/bulan)	Rp.1,8 juta	Rp.2,0 juta		
			2 Pertumbuhan PDB perikanan	7.00%	7.25%		
	CUSTOMER PERSPECTIVE						
	2	Meningkatnya ketersediaan produk KP yang bernilai tambah	3 Jumlah produk olahan hasil perikanan (Juta Ton)	5	5.2		
			4 Nilai produk KP nonkonsumsi pada tingkat pedagang besar (Rp Triliun)	1.5	2		
	3	Meningkatnya pemasaran produk kelautan dan perikanan di dalam dan luar negeri	5 Konsumsi ikan per kapita (Kg/Kapita)	35.14	38.00		
			6 Nilai ekspor produk perikanan (USD miliar)	4.5	5.65		
	4	Berkembangnya industri pengolahan	7 Unit Pengolahan Ikan yang ber-Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	1,995	2,570		
	5	Meningkatnya usaha dan investasi di bidang P2HP	8 Nilai investasi bidang P2HP (Rp. Triliun)	2.5	3		
	6	Meluasnya kesiapan masyarakat untuk usaha dan kesempatan kerja di bidang P2HP	9 Jumlah tenaga kerja pengolah dan pemasar baru hasil perikanan	56,837	62,520		
	INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE						
	7	Terlaksananya inovasi produk dan teknologi hasil pengujian penerapan hasil perikanan untuk modernisasi sistem pengolahan	10 Jumlah inovasi produk dan teknologi P2HP hasil pengujian penerapan hasil perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing (Ragam)	34	35		
	8	Tersedianya kebijakan P2HP sesuai kebutuhan	11 Jumlah kebijakan bidang P2HP	5	5		
			12 Jumlah draft peraturan perundang-undangan bidang P2HP	4	4		
	9	Terselenggaranya modernisasi sistem produksi KP, pengolahan, dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu	13 Utilitas Unit Pengolahan Ikan (%)	70	75		
			14 Pasar ikan di dalam negeri yang dibina menuju standar (pasar)	7,000	7,000		
			15 Peningkatan jumlah negara tujuan ekspor hasil perikanan (Negara)	3	5		
			16 Unit Penanganan Pengolahan Hasil Perikanan Nonkonsumsi (UPPN) yang dibina menuju standar (UPPN)	250	270		
			17 Kelompok pengolah dan pemasar yang meningkat skala usahanya (Poklhasar)	1,500	1,500		
			18 Teknologi Pengolahan dan pemasaran Hasil Perikanan bernilai tambah dan berdaya saing yang diterapkan (Ragam)	34	35		
	10	Terselenggaranya pengendalian impor, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	19 Persentase nilai impor hasil perikanan sesuai standar mutu yang dikendalikan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar dan industri terhadap nilai ekspor (%)	< 20 % terhadap nilai ekspor	< 20 % terhadap nilai ekspor		
	LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE						
	11	Tersedianya SDM P2HP yang kompeten dan profesional	20 Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon II dan III Lingkup DJP2HP	60%	50%		
	12	Tersedianya informasi P2HP yang valid, handal dan mudah diakses	21 Service Level Agreement (SLA) lingkup DJP2HP	70%	75%		
			22 Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi DJP2HP	4	4.25		
	13	Terwujudnya good governance & clean government di DJP2HP	23 Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti oleh DJP2HP	100%	100%		
			24 Nilai akuntabilitas kinerja di DJP2HP	Nilai AKIP A	Nilai AKIP A		
			25 Indeks Kepuasan Masyarakat DJP2HP	7	7.5		
			26 Nilai Inisiatif anti korupsi DJP2HP	8	9		
			27 Nilai penerapan Reformasi Birokrasi (RB) DJP2HP	75 (setara level 4)	90 (setara level 4)		
	14	Terkelolanya anggaran DJP2HP secara optimal	28 Persentase penyerapan DIPA DJP2HP	> 95%	> 95%		
KEGIATAN							
A	Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan					209,307	191,172
		STAKEHOLDER PERSPECTIVE					
	1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat KP	1 Pertumbuhan PDB perikanan	7.00%	7.25%		
	CUSTOMER PERSPECTIVE						
	2	Meningkatnya ketersediaan produk KP yang bernilai tambah	2 Jumlah produk olahan hasil perikanan (Juta Ton)	5	5.2		
	3	Berkembangnya industri pengolahan	3 Unit Pengolahan Ikan yang ber-Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	1,995	2,570		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)			
				2013	2014	2013	2014		
		INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE							
		4 Tersedianya kebijakan bidang pengolahan hasil perikanan sesuai kebutuhan	4	Jumlah kebijakan bidang pengolahan hasil perikanan	1	1			
			5	Jumlah draft peraturan perundang-undangan bidang pengolahan hasil perikanan	1	1			
		5 Terselenggaranya modernisasi sistem produksi KP, pengolahan, dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu	6	Utilitas Unit Pengolahan Ikan (%)	70	75			
			7	Lokasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan yang dikembangkan dan dibina (lokasi)	113	143			
			8	Lokasi pengembangan pengembangan dan pembinaan sentra pengolahan hasil perikanan untuk usaha skala mikro, kecil dan menengah	37	42			
			9	Rancangan Standar Nasional Indonesia yang disusun dan Standar Nasional Indonesia yang diterapkan dalam pengolahan hasil perikanan (RSNI)	5 RSNI	5 RSNI, 160 SNI			
			11	Ragam produk olahan bernilai tambah di lokasi yang dibina (Ragam)	46	60			
			12	Unit Pengolahan Ikan yang bersertifikat kelayakan pengolahan (SKP)	1995	1995			
			13	Unit Pengolahan Ikan yang dikembangkan dan dibina dalam rangka memenuhi standar mutu hasil perikanan (UPI)	219	249			
		LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE							
		6 Tersedianya SDM Dit. PH yang kompeten dan profesional	14	Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon II, III, dan IV Lingkup Dit. PH	60%	50%			
		7 Tersedianya informasi Dit. PH yang valid, handal dan mudah diakses	15	Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi (skala likert 1-5)	4	4.25			
		8 Terwujudnya good governance & clean government di Dit. PH	16	Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal Eksternal Pemerintah yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi yang diberikan	100%	100%			
			17	Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja di Dit. PH	Nilai AKIP A	Nilai AKIP A			
			18	Indeks Kepuasan Masyarakat Dit. PH	7	7.5			
			19	Nilai Inisiatif anti korupsi Dit. PH	8	9			
			20	Nilai Penerapan RB Dit. PH	80 (setara level 4)	90 (setara level 4)			
		9 Terkelolanya anggaran Dit. PH secara optimal	21	Persentase penyerapan DIPA Dit. PH	> 95%	> 95%			
B	Fasilitasi Penguatan Dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan						99,435	93,468	
		STAKEHOLDER PERSPECTIVE							
		1 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat KP	1	Pertumbuhan PDB perikanan	7.00%	7.25%			
		CUSTOMER PERSPECTIVE							
		2 Meningkatkan pemasaran produk KP di dalam dan luar negeri	2	Konsumsi ikan per kapita	35.14	38.00			
		INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE							
		3 Tersedianya kebijakan PDN sesuai kebutuhan	3	Jumlah Kebijakan Bidang PDN	1	1			
			4	Jumlah draft peraturan perundang-undangan bidang PDN	1	1			
		4 Terselenggaranya modernisasi sistem produksi KP, pengolahan, dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu	5	Pasar ikan di dalam negeri yang dibina menuju standar (Pasar)	7,000	7,000			
			6	Lokasi pengembangan dan pembinaan promosi dan kerjasama pemasaran hasil perikanan dalam negeri (provinsi)	33	33			
			7	Optimalisasi distribusi bahan baku hasil perikanan ke UPI (% UPI)	70	75			
		LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE							
		5 Tersedianya SDM Dit PDN yang kompeten dan profesional	8	Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon II, III dan IV Lingkup Dit PDN	60%	50%			
		6 Tersedianya informasi Dit. PDN yang valid, handal dan mudah diakses	9	Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi (skala likert 1-5)	4	4.25			
		7 Terwujudnya good governance & clean government di Dit PDN	10	Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal Eksternal Pemerintah yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi yang diberikan	100%	100%			
			11	Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja di Dit PDN	Nilai AKIP A	Nilai AKIP A			
			12	Indeks Kepuasan Masyarakat Dit PDN	7	7.5			
			13	Nilai Inisiatif anti korupsi Dit PDN	8	9			
			14	Nilai Penerapan RB Dit PDN	80 (setara level 4)	90 (setara level 4)			
		8 Terkelolanya anggaran Dit PDN secara optimal	15	Persentase penyerapan DIPA Dit PDN	> 95%	> 95%			
C	Fasilitasi Penguatan Dan Pengembangan Pemasaran Luar Negeri Hasil Perikanan						23,601	18,263	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)		
				2013	2014	2013	2014	
		STAKEHOLDER PERSPECTIVE						
		1 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat KP	1 Pertumbuhan PDB perikanan	7.00%	7.25%			
		CUSTOMER PERSPECTIVE						
		2 Meningkatkan pemasaran produk kelautan dan perikanan di dalam dan luar negeri	2 Nilai ekspor produk perikanan (USD miliar)	4.5	5.65			
		INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE						
		3 Tersedianya kebijakan bidang pemasaran luar negeri hasil perikanan sesuai kebutuhan	3 Jumlah kebijakan bidang pemasaran luar negeri hasil perikanan	1	1			
			4 Jumlah draft peraturan perundang-undangan bidang pemasaran luar negeri hasil perikanan	1	1			
		4 Terselenggaranya modernisasi sistem produksi KP, pengolahan, dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu	5 Peningkatan jumlah negara tujuan ekspor hasil perikanan (negara)	3	5			
			6 Jumlah eksportir skala UKM yang dibina agar dapat meningkatkan daya saingnya	50	50			
			7 Negara tujuan ekspor yang menurunkan hambatan regulasi tarif	1	1			
			8 Negara yang mengimplementasikan kerjasama pemasaran luar negeri hasil perikanan, serta negara yang memberikan penilaian citra positif terhadap produk perikanan Indonesia	4 7	4 7			
			9 Negara tujuan dan negara pesaing yang terpetakan potensi, daya beli dan daya saing pasarnya dengan data terkini dan akurat	35	40			
		INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE						
		5 Terselenggaranya pengendalian impor, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	10 Persentase nilai impor hasil perikanan sesuai standar mutu yang dikendalikan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar dan industri terhadap nilai ekspor (%)	< 20 % terhadap nilai ekspor	< 20 % terhadap nilai ekspor			
		LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE						
		6 Tersedianya SDM Dit. PLN yang kompeten dan profesional	11 Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon II, III, dan IV Lingkup Dit. PLN	60%	50%			
		7 Tersedianya informasi Dit. PLN yang valid, handal dan mudah diakses	12 Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi (skala likert 1-5)	4	4.25			
		8 Terwujudnya good governance & clean government di Dit. PLN	13 Nilai Penerapan RB Dit. PDN	80 (setara level 4)	90 (setara level 4)			
			14 Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal Eksternal Pemerintah yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi yang diberikan	100%	100%			
			15 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja di Dit. PLN	Nilai AKIP A	Nilai AKIP A			
			16 Indeks Kepuasan Masyarakat Dit. PLN	7	7.5			
			17 Nilai Inisiatif anti korupsi Dit. PLN	8	9			
			18 Nilai Penerapan RB Dit. PLN	80 (setara level 4)	90 (setara level 4)			
		9 Terkelolanya anggaran Dit. PLN secara optimal	19 Persentase penyerapan DIPA Dit. PLN	> 95%	> 95%			
D	Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan					111,983	93,141	
		STAKEHOLDER PERSPECTIVE						
		1 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat KP	1 Rata-rata pendapatan pengolah & pemasar (KK/bulan)	Rp.1,8 juta	Rp.2,0 juta			
			2 Pertumbuhan PDB perikanan	7.00%	7.25%			
		CUSTOMER PERSPECTIVE						
		2 Meningkatkan usaha dan investasi di bidang P2HP	3 Nilai investasi bidang P2HP (Rp. Triliun)	2.5	3			
		3 Meluasnya kesiapan masyarakat untuk usaha dan kesempatan kerja di bidang P2HP	4 Jumlah tenaga kerja pengolah dan pemasar baru hasil perikanan	56,837	62,520			
		INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE						
		4 Tersedianya kebijakan bidang usaha dan investasi P2HP sesuai kebutuhan	5 Jumlah kebijakan bidang usaha dan investasi P2HP	5	5			
			6 Jumlah draft peraturan perundang-undangan bidang usaha dan investasi P2HP	1	1			
		5 Terselenggaranya pelayanan informasi usaha dan Investasi bidang P2HP	7 Jumlah informasi peluang usaha dan investasi bidang P2HP	4 prospektus 8 provinsi yg tercover GIS dan promosi investasi	5 prospektus 8 provinsi yg tercover GIS dan promosi investasi			
			8 Jumlah rekomendasi kebijakan usaha bidang P2HP (Rekomendasi)	4	3			
			9 Pembinaan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB)	1300	1300			
			10 Penguatan nilai permodalan UMKM (Rp Milyar)	250	300			

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)	
				2013	2014	2013	2014
		6 Terselenggaranya modernisasi sistem produksi KP, pengolahan, dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu	11 Kelompok pengolah dan pemasar yang meningkat skala usahanya (Poklhasar)	1,500	1,000		
			12 Jumlah pelaku usaha bidang P2HP yang melakukan kemitraan (Pelaku Usaha)	1,340	1,340		
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE							
		7 Tersedianya SDM Dit. UI yang kompeten dan profesional	13 Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon II, III, dan IV Lingkup Dit. UI	60%	50%		
		8 Tersedianya informasi Dit. UI yang valid, handal dan mudah diakses	14 Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi (skala likert 1-5)	4	4.25		
		9 Terwujudnya good governance & clean government di Dit. UI	15 Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal Eksternal Pemerintah yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi yang diberikan	100%	100%		
			16 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja di Dit. UI	Nilai AKIP A	Nilai AKIP A		
			17 Indeks Kepuasan Masyarakat Dit. UI	7	7.5		
			18 Nilai Inisiatif anti korupsi Dit. UI	8	9		
			19 Nilai Penerapan RB Dit. UI	80 (setara level 4)	90 (setara level 4)		
		10 Terkelolanya anggaran Dit. UI secara optimal	20 Persentase penyerapan DIPA Dit. UI	> 95%	> 95%		
E	Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Nonkonsumsi					47,791	37,491
STAKEHOLDER PERSPECTIVE							
		1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat KP	1 Pertumbuhan PDB perikanan	7.00%	7.25%		
CUSTOMER PERSPECTIVE							
		2 Meningkatnya ketersediaan produk KP yang bernilai tambah	2 Nilai produk KP nonkonsumsi pada tingkat pedagang besar (Rp Triliun)	1.5	2		
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE							
		3 Tersedianya kebijakan bidang pengembangan produk nonkonsumsi hasil perikanan sesuai kebutuhan	3 Jumlah kebijakan bidang pengembangan produk nonkonsumsi hasil perikanan	1	1		
			4 Jumlah draft peraturan perundang-undangan bidang pengembangan produk nonkonsumsi hasil perikanan	1	1		
		4 Terselenggaranya modernisasi sistem produksi KP, pengolahan, dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu	5 Unit Penanganan Pengolahan Hasil Perikanan Nonkonsumsi (UPPN) yang dibina menuju standar (UPPN)	250	270		
			6 Lokasi sarana dan prasarana pengembangan dan pembinaan produk hasil perikanan nonkonsumsi	50	65		
			7 Ragam produk hasil perikanan nonkonsumsi yang dihasilkan dan diterapkan	15	20		
			8 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah produk hasil perikanan nonkonsumsi yang dibina dan dikembangkan	200	50		
			9 Lokasi pengembangan promosi dan jaringan pemasaran ikan hias	33 propinsi, 4 negara	33 propinsi, 5 negara		
			10 Rancangan Standar Nasional Indonesia yang disusun, dan standar Nasional Indonesia yang diterapkan dalam pengembangan produk hasil perikanan nonkonsumsi	5 RSNI, 5 SNI	5 RSNI, 10 SNI		
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE							
		5 Tersedianya SDM Dit. PPN yang kompeten dan profesional	11 Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon II, III, dan IV Lingkup Dit. PPN	60%	50%		
		6 Tersedianya informasi Dit. PPN yang valid, handal dan mudah diakses	12 Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi (skala likert 1-5)	4	4.25		
		7 Terwujudnya good governance & clean government di Dit. PPN	13 Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal Eksternal Pemerintah yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi yang diberikan	100%	100%		
			14 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja di Dit. PPN	Nilai AKIP A	Nilai AKIP A		
			15 Indeks Kepuasan Masyarakat Dit. PPN	7	7.5		
			16 Nilai Inisiatif anti korupsi Dit. PPN	8	9		
			17 Nilai Penerapan RB Dit. PPN	80 (setara level 4)	90 (setara level 4)		
		8 Terkelolanya anggaran Dit. PPN secara optimal	18 Persentase penyerapan DIPA Dit. PPN	> 95%	> 95%		
F	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP					161,617	157,379
CUSTOMER PERSPECTIVE							
		1 Tersedianya SDM DJP2HP yang kompeten dan profesional	1 Indeks kesenjangan kompetensi pejabat Eselon II dan III lingkup DJP2HP	60%	50%		
		2 Tersedianya informasi P2HP yang valid, handal dan mudah diakses	2 Service Level Agreement (SLA) DJP2HP	70%	75%		
			3 Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi DJP2HP	4	4.25		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)						
				2013	2014	2013	2014					
		3 Terwujudnya good governance & clean	4 Tingkat ketaatan terhadap SAP DJP2HP	100%	100%							
			5 Tingkat kepatuhan terhadap SPI DJP2HP	100%	100%							
			6 Kecukupan pengungkapan BAS dalam LK DJP2HP	cukup	cukup							
			7 Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di DJP2HP	100%	100%							
			8 Nilai perencanaan Kinerja DJP2HP	27	27.5							
			9 Nilai Pengukuran Kinerja DJP2HP	15.5	15.5							
			10 Nilai Pelaporan Kinerja DJP2HP	11.5	12							
			11 Nilai Evaluasi Program DJP2HP	4	4.5							
			12 Nilai Pencapaian Kinerja DJP2HP	15.5	16							
			13 Nilai integritas DJP2HP	7	7.5							
			14 Nilai inisiatif anti korupsi DJP2HP	8	9							
			15 Nilai penerapan Reformasi Birokrasi (RB) DJP2HP	80 (setara level 4)	90 (setara level 4)							
			4 Terkelolanya anggaran DJP2HP secara optimal	16 Persentase penyerapan DIPA DJP2HP	> 95 %			> 95%				
			INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE									
			5 Terwujudnya perencanaan dan pengembangan pegawai DJP2HP sesuai kebutuhan	17 Persentase pegawai yang kompeten dan profesional sesuai kebutuhan (%)	60%			65%				
6 Terintegrasinya data dan informasi P2HP	18 Data dan statistik P2HP yang terintegrasi (provinsi)	33	33									
	19 Media informasi dan komunikasi DJP2HP yang valid, handal dan mudah diakses (tampil di media)	270	300									
	20 Persentase informasi manajemen kepegawaian DJP2HP yang terintegrasi	100%	100%									
	21 Persentase data surat dan arsip DJP2HP yang tertib	100%	100%									
7 Terpenuhinya peraturan perundang-undangan bidang P2HP sesuai mandat	22 Persentase dokumen peraturan perundang-undangan bidang P2HP yang ditetapkan sesuai mandat (%)	50%	50%									
	23 Persentase dokumen kebijakan bidang P2HP yang ditetapkan sesuai mandat (%)	100%	100%									
8 Terwujudnya organisasi dan tatalaksana DJP2HP yang efektif	24 Rekomendasi penataan dan pengembangan organisasi dan tatalaksana DJP2HP yang efektif (Rekomendasi)	5	5									
9 Tersedianya dokumen perencanaan, kerjasama dan pelaporan DJP2HP yang berkualitas dan tepat waktu	25 Persentase dokumen perencanaan DJP2HP yang berkualitas dan tepat waktu (%)	100%	100%									
	26 Persentase dokumen pelaporan DJP2HP yang berkualitas dan tepat waktu (%)	100%	100%									
	27 Persentase implementasi kerjasama bidang P2HP (%)	60%	70%									
10 Terselenggaranya pengelolaan Keuangan Negara dan BMN DJP2HP yang akuntabel	28 Persentase Pengelolaan Keuangan DJP2HP yang transparan dan Akuntabel (%)	100%	100%									
	29 Persentase pengelolaan BMN DJP2HP yang akuntabel (%)	100%	100%									
11 Terselenggaranya pengelolaan anggaran yang optimal	30 Persentase kesesuaian rencana belanja dengan bagan akun standar	100%	100%									
	31 Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pengadaan B/J sesuai jadwal	100%	100%									
	32 Persentase ketepatan waktu penyampaian LK (bulanan, triwulanan, semester, tahunan)	100%	100%									
12 Terlaksananya inovasi produk dan teknologi hasil pengujian penerapan hasil perikanan untuk modernisasi sistem pengolahan	33 Jumlah inovasi produk dan teknologi P2HP hasil pengujian penerapan hasil perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing (Ragam)	34	35									
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE												
12 Tersedianya SDM Setditjen P2HP yang kompeten dan profesional	34 Indeks kesenjangan kompetensi pejabat Eselon II dan III lingkup Setditjen P2HP	60%	50%									
13 Tersedianya informasi Setditjen P2HP yang valid, handal dan mudah diakses	35 <i>Service Level Agreement</i> (SLA) Setditjen P2HP	70%	75%									
	36 Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi Setditjen P2HP	4	4.25									
14 Terwujudnya good governance & clean government di Setditjen P2HP	37 Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti oleh Setditjen P2HP	100%	100%									
	38 Nilai akuntabilitas kinerja Setditjen P2HP	Nilai AKIP A	Nilai AKIP A									
	39 Nilai integritas Setditjen P2HP	7	7.5									
	40 Nilai inisiatif anti korupsi Setditjen P2HP	8	9									
	41 Nilai penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Setditjen P2HP	80 Setara Level 4	90 setara Level 4)									
15 Terkelolanya anggaran Setditjen P2HP secara optimal	42 Persentase penyerapan DIPA Setditjen P2HP	> 95 %	> 95%									

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)	
				2013	2014	2013	2014
PROGRAM							
4	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					706,340	710,635
STAKEHOLDER PERSPECTIVE							
1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kelautan Perikanan	1	Rata-rata pendapatan petambak garam rakyat perKK/bulan (per musim)	Rp1,800,000	Rp2,000,000		
2		2	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	7	7.25		
CUSTOMER PERSPECTIVE							
2	Meningkatnya ketersediaan produk Kelautan Perikanan yang bernilai tambah	3	Jumlah produksi garam rakyat (Jt Ton)	0.545	3.3		
4		4	Jumlah ragam produk kelautan non garam yang terfasilitasi pengembangannya (produk)	3	3		
5		5	Jumlah BMKT yang dikelola	2	3		
3	Meningkatnya kemandirian masyarakat KP3K	6	Jumlah pelaku usaha mikro yang mandiri di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil (kelompok/orang)	3,140/5,608	3.210/7,108		
7		7	Jumlah sarana usaha mikro yang beroperasi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil (unit)	85	85		
8		8	Jumlah kelompok yang menerima pemberdayaan usaha garam rakyat/PUGAR (kelompok)	3,347	3,500		
4	Meningkatnya pengelolaan SDKP yang berkelanjutan	9	Jumlah jenis ikan yang dikonservasi secara berkelanjutan (jenis)	12	15		
10		10	Jumlah pulau-pulau kecil termasuk pulau kecil terluar yang dikelola (pulau)	60	30		
11		11	Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (juta Ha)	3.6	4.5		
12		12	Jumlah kawasan pesisir yang terfasilitasi ketahanannya terhadap ancaman kerusakan (kawasan)	25	27		
5	Meluasnya kesiapan masyarakat untuk usaha dan kesempatan kerja di bidang KP	13	Jumlah tenaga kerja (baru) di bidang perikanan pada PUGAR (orang)	16,400	14,800		
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE							
6	Tersedianya kebutuhan inovasi teknologi hasil litbang untuk modernisasi sistem produksi garam	14	Jumlah rekomendasi inovasi teknologi yang dibutuhkan untuk modernisasi sistem produksi garam	3	5		
7	Tersedianya kebijakan di bidang KP3K sesuai kebutuhan	15	Jumlah kebijakan publik bidang KP3K	40	20		
16		16	Jumlah draft peraturan perundang-undangan bidang KP3K	3	3		
8	Terkelolanya wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan	17	Jumlah luasan kawasan di wilayah pesisir rusak yang direhabilitasi (Ha)	110	120		
18		18	Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki perencanaan pengelolaan	60	65		
19		19	Jumlah penambahan kawasan konservasi perairan(Ha)	500.000	300.000		
20		20	Jumlah pulau-pulau kecil yang dikelola melalui kerjasama (pulau)	7	9		
9	Terselenggaranya modernisasi sistem produksi KP, pengolahan, dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu	21	Persentase jumlah produksi garam rakyat Kualitas Produksi (KP1) dibandingkan total produksi (%)	30% : 70%	50% : 50%		
10	Meningkatnya pemanfaatan ekonomi wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan	22	Luasan tambak garam yang dikelola (Ha)	22,043	26,975		
23		23	Persentase luas lahan yang menggunakan inovasi teknologi dibanding total lahan pugar (%)	20	30		
11	Terselenggaranya pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di WP3K	24	Jumlah rekomendasi izin pemanfaatan perairan di WP3K	2	3		
25		25	Jumlah fasilitasi izin lokasi reklamasi	1	2		
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE							
12	Tersedianya SDM DJKP3K yang kompeten dan profesional	26	Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II, III, IV dan V DJKP3K (%)	60	50		
13	Tersedianya informasi DJKP3K yang valid, handal dan mudah diakses	27	Service Level Agreement DJKP3K (%)	70	75		
28		28	Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5)DJKP3K	4	4.25		
14	Terwujudnya good governance & clean government di DJKP3K	29	Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di DJKP3K (%)	100	100		
30		30	Tingkat Kualitas Akuntabilitas Kinerja DJKP3K	Nilai AKIP A	Nilai AKIP A		
31		31	Nilai Integritas DJKP3K	6,5	6,75		
32		32	Nilai Inisiatif Anti Korupsi DJKP3K	7,5	7,75		
33	33	Nilai Penerapan RB DJKP3K	75	80			
15	Terkelolanya anggaran Ditjen KP3K secara optimal	34	Persentase penyerapan DIPA DJKP3K	>95%	>95%		
KEGIATAN							
A	Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis					51,523	83,854
STAKEHOLDER PERSPECTIVE							
1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat KP	1	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	7	7.25		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)				
				2013	2014	2013	2014			
		CUSTOMER PERSPECTIVE								
		2	Meningkatnya pengelolaan SDKP yang berkelanjutan	2	Jumlah jenis ikan yang dikonservasi secara berkelanjutan (jenis)	12	15			
		3		3	Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (Juta Ha)	3.6	4.5			
		INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE								
		3	Tersedianya kebijakan di bidang KKJI sesuai kebutuhan	4	Jumlah kebijakan publik bidang KKJI	8	8			
		4	Terkelolanya wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang terpadu dan berkelanjutan	5	Jumlah penambahan luas kawasan konservasi perairan (Ha)	500,000	300,000			
				6	Jumlah penambahan luas kawasan konservasi perairan yang dilindungi dan dilestarikan secara efektif (Ha)	400,000	900,000			
				7	Jumlah penambahan jenis ikan yang dirancang perlindungannya secara efektif (Jenis)	3	3			
				8	Jumlah penambahan jenis ikan yang dilindungi dan dilestarikan secara efektif (Jenis)	3	3			
				9	Jumlah penambahan luas kawasan konservasi perairan yang dimanfaatkan secara efektif (Ha)	400,000	900,000			
				10	Jumlah penambahan jenis ikan yang dimanfaatkan secara efektif (Jenis)	3	3			
				11	Jumlah penambahan luas kawasan yang jejaringnya diinisiasi untuk mendukung pengelolaan efektif (Ha)	400,000	900,000			
				12	Jumlah penambahan luas kawasan konservasi dan jenis ikan yang data dan informasinya dikelola (Ha) (Jenis)	400,000 dan 3	900,000 dan 3			
		LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE								
		5	Tersedianya SDM Dit. KKJI yang kompeten dan profesional	13	Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon III dan IV Dit. KKJI (%)	60	50			
		6	Tersedianya informasi bidang KKJI yang valid, handal dan mudah diakses	14	Service Level Agreement Dit. KKJI (%)	70	75			
		7	Terwujudnya good governance & clean government di Dit. KKJI	15	Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Dit. KKJI (%)	100	100			
				16	Tingkat Kualitas Akuntabilitas Kinerja Dit. KKJI	Nilai AKIP A	Nilai AKIP A			
				17	Nilai Inisiatif Anti Korupsi Dit. KKJI	7,5	7,75			
				18	Nilai Penerapan RB Dit. KKJI	75	80			
		8	Terkelolanya anggaran Dit. KKJI secara optimal	19	Persentase penyerapan DIPA Dit. KKJI (%)	>95	>95			
B	Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil						47,037	39,244		
		STAKEHOLDER PERSPECTIVE								
		1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat KP	1	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	7	7.25			
		CUSTOMER PERSPECTIVE								
		2	Terwujudnya ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan	2	Jumlah daerah yang terfasilitasi percepatan proses /legalisasi RZWP3K ke dalam PERDA	9	9			
		INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE								
		3	Tersedianya kebijakan di bidang TRLP3K sesuai kebutuhan	3	Jumlah kebijakan publik bidang TRLP3K	2	7			
				4	Jumlah draft peraturan perundang-undangan bidang TRLP3K	1	1			
		4	Terkelolanya wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang terpadu dan berkelanjutan	5	Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki perencanaan pengelolaan	60	65			
		5	Terselenggaranya pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan perikanan di WP3K	6	Jumlah rekomendasi izin pemanfaatan perairan di WP3K	2	3			
		LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE								
		6	Tersedianya SDM TRLP3K yang kompeten dan profesional	7	Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon III dan IV Dit. TRLP3K (%)	60	50			
		7	Tersedianya informasi bidang TRLP3K yang valid, handal dan mudah diakses	8	Service Level Agreement Dit. TRLP3K (%)	70	75			
		8	Terwujudnya good governance & clean government di Dit. TRLP3K	9	Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Dit. TRLP3K (%)	100	100			
				10	Tingkat Kualitas Akuntabilitas Kinerja Dit. TRLP3K	Nilai AKIP A	Nilai AKIP A			
				11	Nilai Inisiatif Anti Korupsi Dit. TRLP3K	7,5	7,75			
				12	Nilai Penerapan RB Dit. TRLP3K	75	80			
		9	Terkelolanya anggaran Dit. TRLP3K secara optimal	13	Presentase penyerapan DIPA Dit. TRLP3K (%)	> 95	> 95			

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)	
				2013	2014	2013	2014
C	Pendayagunaan Pesisir dan Lautan					73,295	109,069
		STAKEHOLDER PERSPECTIVE					
	1	Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	1	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	7	7,25	
		CUSTOMER PERSPECTIVE					
	2	Meningkatnya ketersediaan produk KP yang bernilai tambah	2	Jumlah ragam produk kelautan non garam yang terfasilitasi pengembangannya (produk)	3	3	
			3	Jumlah BMKT yang dikelola	2	3	
	3	Meningkatnya pengelolaan SDKP yang berkelanjutan	4	Jumlah kawasan pesisir yang terfasilitasi ketahanannya terhadap ancaman kerusakan	25	27	
		INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE					
	4	Tersedianya kebijakan di bidang Pesisir dan Lautan sesuai kebutuhan	5	Jumlah kebijakan publik bidang pesisir dan lautan	8	9	
	5	Terkelolanya wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan	6	Jumlah luasan kawasan di wilayah pesisir rusak yang direhabilitasi(Ha)	110	120	
			7	Jumlah kawasan di wilayah pesisir yang terfasilitasi peningkatan ketahanannya terhadap bencana dan perubahan iklim(kawasan)	22	22	
			8	Jumlah kawasan di wilayah pesisir dan laut yang terfasilitasi penanggulangan pencemarannya (kawasan)	3	5	
	6	Terselenggaranya pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan perikanan di WP3K	9	Jumlah fasilitasi izin lokasi reklamasi	1	2	
		LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE					
	7	Tersedianya SDM Pesisir dan Lautan yang kompeten dan profesional	10	Indeks kesenjangan kompetensi eselon III dan IV Dit. PL (%)	60	50	
	8	Tersedianya informasi bidang Pesisir dan Lautan yang valid, handal dan mudah diakses	11	Service Level Agreement Dit.PL (%)	70	75	
	9	Terwujudnya good governance & clean government di bidang pesisir dan lautan	12	Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Dit. PL (%)	100	100	
			13	Tingkat Kualitas Akuntabilitas Kinerja Dit.PL	Nilai AKIP A	Nilai AKIP A	
			14	Indeks Kepuasan Masyarakat Dit.PL	6,5	6,75	
			15	Nilai Inisiatif Anti Korupsi Dit. PL	7,5	7,75	
			16	Nilai Penerapan RB Dit.PL	75	80	
	10	Terkelolanya anggaran Direktorat Pesisir dan Lautan secara optimal	17	Persentase penyerapan DIPA Dit.PL (%)	> 95	> 95	
D	Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil					227,967	179,130
		STAKEHOLDER PERSPECTIVE					
	1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat KP	1	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	7	7,25	
		CUSTOMER PERSPECTIVE					
	2	Meningkatnya Pengelolaan SDKP yang berkelanjutan	2	Jumlah pulau-pulau kecil termasuk pulau kecil terluar yang dikelola (pulau)	60	30	
		INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE					
	3	Tersedianya kebijakan di bidang PPK sesuai kebutuhan	3	Jumlah kebijakan publik bidang PPK	1	4	
			4	Jumlah draft peraturan perundang-undangan bidang PPK	1	1	
	4	Terkelolanya wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang terpadu dan berkelanjutan	5	Jumlah pulau-pulau kecil yang dikelola bekerjasama dengan pihak lain (pulau)	7	9	
		LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE					
	5	Tersedianya SDM Dit. PPPK yang kompeten dan profesional	6	Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon III dan IV di Dit. PPPK (%)	60	50	
	6	Tersedianya informasi bidang PPK yang valid, handal dan mudah diakses	7	Service Level Agreement Dit. PPPK (%)	70	75	
	7	Terwujudnya good governance & clean government di Dit. PPPK	8	Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Dit. PPPK (%)	100	100	
			9	Tingkat Kualitas Akuntabilitas Kinerja Dit. PPPK	Nilai AKIP A	Nilai AKIP A	
			10	Nilai Inisiatif Anti Korupsi Dit. PPPK	7,5	7,75	
			11	Nilai Penerapan RB Dit. PPPK	75	80	
	8	Terkelolanya anggaran Dit. PPPK secara optimal	12	Persentase penyerapan DIPA Dit. PPPK (%)	> 95	> 95	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)	
				2013	2014	2013	2014
E	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha					184,598	184,518
		STAKEHOLDER PERSPECTIVE					
		1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat KP	1	Rata-rata pendapatan petambak garam rakyat perKK/bulan (per musim)	Rp1,800,000	Rp2,000,000
				2	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	7	7.25
		CUSTOMER PERSPECTIVE					
		2	Meningkatnya ketersediaan produk Kelautan dan Perikanan yang bernilai tambah	3	Jumlah produksi garam rakyat (Jt Ton)	0.545	3.33
		3	Meningkatnya kemandirian masyarakat KP3K	4	Jumlah pelaku usaha mikro yang mandiri di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil (kelompok/orang)	3,140/5,608	3,210/7,108
				5	Jumlah sarana usaha mikro yang beroperasi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil (unit)	85	85
				6	Jumlah kelompok yang menerima pemberdayaan usaha garam rakyat/PUGAR (kelompok)	3,347	3,500
		4	Meluasnya kesiapan masyarakat untuk usaha dan kesempatan kerja di bidang KP	7	Jumlah tenaga kerja (baru) di bidang perikanan pada PUGAR (orang)	16,400	14,800
				8	Jumlah wirausaha baru di pesisir (orang)	50	100
				9	Jumlah unit LKM Grameen yang terfasilitasi pendiriannya	10	20
		INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE					
		5	Tersedianya kebutuhan inovasi teknologi hasil litbang untuk modernisasi sistem produksi garam	10	Jumlah rekomendasi inovasi teknologi yang dibutuhkan untuk modernisasi sistem produksi garam	3	5
		6	Tersedianya kebijakan di bidang PMPPU	11	Jumlah kebijakan publik bidang PMPPU	4	5
		7	Terselenggaranya modernisasi sistem produksi KP, pengolahan, dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu	12	Persentase jumlah produksi garam rakyat kualitas produksi (KP1) dibandingkan total produksi (%)	30% : 70%	50% : 50%
				13	Jumlah koperasi pesisir yang terfasilitasi akses permodalannya	10	15
				14	Jumlah unit usaha baru yang terfasilitasi pengembangan usahanya	12	24
		8	Meningkatnya pemanfaatan ekonomi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan	15	Luasan tambak garam yang dikelola (Ha)	22,043	26,975
				16	Persentase luas lahan yang menggunakan inovasi teknologi dibanding total lahan PUGAR (%)	20	30
		9	Terfasilitasinya lembaga masyarakat KP3K dalam mendukung upaya kemandirian berbasis sosial budaya	17	Jumlah lembaga sosial budaya yang melakukan pemberdayaan masyarakat pesisir	30	35
		LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE					
		10	Tersedianya SDM Dit. PMPPU yang kompeten dan profesional	18	Indeks Kesenjangan Kompetensi Eseton III dan IV Dit. PMPPU (%)	60	50
		11	Tersedianya informasi bidang PMPPU yang valid, handal dan mudah diakses	19	Service Level Agreement Dit. PMPPU (%)	70	75
		12	Terwujudnya good governance & clean government di Dit. PMPPU	20	Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Dit. PMPPU (%)	100	100
				21	Tingkat Kualitas Akuntabilitas Kinerja Dit. PMPPU	Nilai AKIP A	Nilai AKIP A
				22	Nilai Inisiatif Anti Korupsi Dit. PMPPU	7,5	7,75
				23	Nilai Penerapan RB Dit. PMPPU	75	80
		13	Terkelolanya anggaran Dit. PMPPU secara optimal	24	Persentase penyerapan DIPA Dit. PMPPU (%)	> 95	> 95
F	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K					121,919	114,818
		CUSTOMER PERSPECTIVE					
		1	Tersedianya SDM KP3K yang kompeten dan profesional	1	Indeks kesenjangan kompetensi eselon II, III, IV dan V DJ KP3K (%)	60	50
		2	Tersedianya informasi KP3K yang valid, handal dan mudah diakses	2	Service Level Agreement (SLA) DJKP3K (%)	70	75
				3	Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi (skala likert 1-5) DJKP3K	4	4.25
				4	Jumlah dokumen data yang dihasilkan untuk penyusunan perencanaan lingkup Ditjen KP3K	3	4
				5	Jumlah bahan publikasi lingkup Ditjen KP3K	5	6
		3	Terwujudnya good governance & clean government lingkup KP3K	6	Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Ditjen KP3K	100%	100%
				7	Tingkat ketaatan terhadap SAP DJ KP3K	100%	100%
				8	Tingkat kepatuhan terhadap SPI DJ KP3K	100%	100%
				9	Kecukupan pengungkapan BAS dalam LK DJ KP3K	cukup	cukup
				10	Tingkat Kualitas Akuntabilitas Kinerja DJ KP3K	Nilai AKIP A	Nilai AKIP A
				11	Nilai Integritas DJ KP3K	6,5	6,75
				12	Nilai Inisiatif Anti Korupsi DJKP3K	8	9
		13	Nilai Penerapan RB DJKP3K	75	80		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)			
				2013	2014	2013	2014		
		4	Terkelolanya anggaran secara optimal di lingkup DJKP3K	14	Persentase penyerapan DIPA Ditjen KP3K (%)	> 95	> 95		
		5	Terwujudnya kerja sama bidang KP3K dalam dan luar negeri yang implementatif	15	Terakomodirnya program dan kegiatan bidang KP3K dalam ruang lingkup perjanjian kerjasama	2	2		
<i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</i>									
		6	Terselenggaranya pengembangan SDM Ditjen KP3K sesuai kebutuhan	16	Jumlah SDM Ditjen KP3K yang memenuhi kualifikasi penilaian assessment	119	119		
		7	Terlaksananya pengelolaan data dan informasi KP3K sesuai kebutuhan	17	Jumlah dokumen pengelolaan data KP3K	3	4		
				18	Jumlah informasi bidang KP3K yang telah dipublikasikan melalui media (per bulan)	24	30		
		8	Terselenggaranya RB sesuai roadmap RB Ditjen. KP3K	19	Persentase rencana aksi RB *) (%)	100	100		
		9	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan Ditjen KP3K yang berkualitas	20	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran yang diselesaikan sesuai ketentuan	5	5		
				21	Jumlah dokumen pelaporan yang diselesaikan sesuai ketentuan	3	3		
		10	Terselenggaranya pengelolaan anggaran yang optimal	22	Persentase pengendalian dokumen anggaran	100%	100%		
				23	Persentase ketepatan pencatatan transaksi keuangan dan BMN	100%	100%		
				24	Persentase ketepatan waktu penyampaian LK (bulanan, triwulanan, semester, tahunan)	100%	100%		
		11	Terlaksananya kerja sama bidang KP3K dalam dan luar negeri sesuai perjanjian kerjasama	25	Jumlah dokumen kerja sama dan perjanjian internasional bidang KP3K yang disiapkan sesuai ketentuan.	8	10		
<i>LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE</i>									
		12	Tersedianya SDM lingkup Setditjen KP3K yang kompeten dan profesional	26	Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II, III dan IV lingkup Setditjen KP3K (%)	60	50		
		13	Tersedianya informasi lingkup Setditjen KP3K yang valid, handal dan mudah diakses	27	Service Level Agreement Setditjen KP3K (%)	95	95		
				28	Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5) Setditjen KP3K	4	4,25		
		14	Terwujudnya good governance & clean government lingkup Setditjen KP3K	29	Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi Setditjen KP3K	100	100		
				30	Tingkat Kualitas Akuntabilitas Kinerja Setditjen KP3K	Nilai AKIP A	Nilai AKIP A		
				31	Nilai Penerapan RB Setditjen KP3K	75	80		
		15	Terkelolanya anggaran Setditjen KP3K secara optimal	32	Persentase penyerapan DIPA Setditjen KP3K (%)	> 95%	> 95%		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)	
				2013	2014	2013	2014
PROGRAM							
5	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					549,043	601,941
		STAKEHOLDER PERSPECTIVE					
	1	Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	1	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	7.00%	7.25%	
		CUSTOMER PERSPECTIVE					
	2	Meningkatnya pengelolaan SDKP yang berkelanjutan	2	Proporsi tangkapan perikanan laut berada dalam batasan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB)	<100%	<100%	
			3	Jumlah jenis ikan yang dikonservasi secara berkelanjutan	12 jenis	15 jenis	
			4	Jumlah pulau-pulau kecil termasuk pulau kecil terluar yang dikelola	60	30	
			5	Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	3,6 juta ha	4,5 juta ha	
		INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE					
	3	Tersedianya kebijakan bidang pengawasan SDKP yang sesuai kebutuhan	6	Jumlah kebijakan publik bidang pengawasan SDKP yang diselesaikan	10 dok	10 dok	
			7	Jumlah Draft Peraturan Perundangan yang diselesaikan	5 dok	3 dok	
	4	Terselenggaranya modernisasi sistem produksi kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan	8	Persentase Ketaatan Implementasi SLIN sesuai peraturan	100%	100%	
			9	Persentase Ketaatan Kemitraan UPI dan Unit usaha Penangkapan ikan yang sesuai ketentuan	30%	80%	
			10	Persentase Ketaatan importasi ikan yang sesuai ketentuan	87%	80%	
	5	Terselenggaranya Pengawasan dan penegakan hukum Pengelolaan SDKP	11	Wilayah perairan bebas IUU fishing dan kegiatan yang merusak SDKP	41%	39%	
			12	Ketaatan unit usaha perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	87.13%	80.00%	
			13	Persentase jumlah nelayan Indonesia yang diadvokasi (substansi Inpres 15 tahun 2011)	80%	80%	
			14	Persentase pemanfaatan SDP yang dapat dipantau	65%	70%	
			15	Persentase pemanfaatan SDK yang dapat dipantau	75%	100%	
		LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE					
	6	Tersedianya SDM Ditjen PSDKP yang kompeten dan profesional	16	Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II, III dan IV di lingkup Ditjen.PSDKP	60%	50%	
	7	Tersedianya informasi pengawasan SDKP yang valid, handal & mudah diakses	17	<i>Service Level Agreement</i>	70%	75%	
			18	Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5)	4.00	4.25	
	8	Terwujudnya <i>good governance & clean government</i> di Ditjen PSDKP	19	Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti di banding total rekomendasi	100%	100%	
			20	Tingkat kualitas Akuntabilitas kinerja Setditjen. PSDKP	A	A	
			21	Nilai Integritas Ditjen. PSDKP	6.5	6.75	
			22	Nilai Inisiatif anti korupsi Ditjen. PSDKP	7.5	7.75	
			23	Nilai Penerapan RB Ditjen PSDKP	75	80	
	9	Pengelolaan anggaran Ditjen. PSDKP yang optimal	24	Persentase penyerapan DIPA	> 95%	> 95%	
KEGIATAN							
A	Peningkatan Operasional Pengawasan sumber Daya Perikanan					30,973	26,261
		STAKEHOLDER PERSPECTIVE					
	1	Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	1	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	7.00%	7.25%	
		CUSTOMER PERSPECTIVE					
	2	Meningkatnya pengelolaan SDKP yang berkelanjutan	2	Proporsi tangkapan perikanan laut berada dalam batasan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB)	<100%	<100%	
		INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE					
	3	Tersedianya kebijakan bidang pengawasan SDP yang sesuai kebutuhan	3	Jumlah kebijakan publik bidang pengawasan SDP yang diselesaikan	2 dok	5 dok	
			4	Jumlah Draft Peraturan Perundangan yang diselesaikan	1 dok	1 dok	
	4	Terselenggaranya Modernisasi Sistem produksi kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan	5	Persentase Ketaatan Implementasi SLIN sesuai peraturan	100%	100%	
			6	Persentase Ketaatan Kemitraan UPI dan Unit usaha Penangkapan ikan yang sesuai ketentuan	30%	80%	
			7	Persentase Ketaatan importasi ikan yang sesuai ketentuan	87.30%	80%	
	5	Terselenggaranya Pengawasan dan penegakan hukum Pengelolaan SDKP	8	Ketaatan unit usaha perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	87.13%	80.00%	
			9	Persentase peran aktif pengawasan berbasis masyarakat (Kelompok Masyarakat Pengawas)	87.13%	80.00%	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)			
				2013	2014	2013	2014		
		LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE							
		6 Tersedianya SDM Dit. Was SDP yang kompeten dan profesional	10 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II, III dan IV di lingkup SDM Dit. Was SDP	60%	50%				
		7 Tersedianya informasi pengawasan SDP yang valid, handal & mudah diakses	11 <i>Service Level Agreement</i>	70%	75%				
		8 Terwujudnya <i>good governance & clean government</i> di Dit. Was SDP	12 Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti di banding total rekomendasi	100%	100%				
			13 Tingkat kualitas Akuntabilitas kinerja Setditjen. PSDKP	A	A				
			14 Nilai integritas Dit. Was SDP	6.5	6.75				
			15 Nilai Inisiatif anti korupsi Dit. Was SDP	7.5	7.75				
			16 Nilai Penerapan RB Dit. Was SDP	75	80				
		9 Pengelolaan anggaran Dit. Was SDP yang optimal	17 Persentase penyerapan DIPA	> 95%	> 95%				
B	Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan						16,598	15,300	
		STAKEHOLDER PERSPECTIVE							
		1 Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	1 Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	7.00%	7.25%				
		CUSTOMER PERSPECTIVE							
		2 Meningkatnya pengelolaan SDKP yang berkelanjutan	2 Jumlah jenis ikan yang dikonservasi secara berkelanjutan	12 jenis	15 jenis				
			3 Jumlah pulau-pulau kecil termasuk pulau kecil terluar yang dikelola	60	30				
			4 Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	3,6 juta ha	4,5 juta ha				
		INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE							
		3 Tersedianya kebijakan bidang pengawasan SDK yang sesuai kebutuhan	5 Jumlah draft kebijakan publik bidang Pengawasan SDK yang diselesaikan	3 Dok	5 dok				
			6 Jumlah draft Peraturan Perundangan Pengawasan SDK yang diselesaikan	1 dok	1 dok				
		4 Terselenggaranya modernisasi sistem produksi kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan	7 Persentase UPI yang melakukan kemitraan yang memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan	1.00%	10.00%				
		5 Terselenggaranya Pengawasan dan penegakan hukum Pengelolaan SDKP	8 Persentase cakupan wilayah pengelolaan perikanan yang terawasi dari kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan	25.00%	37.00%				
		LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE							
		6 Tersedianya SDM Dit. Was SDK yang Kompeten dan Profesional	9 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II, III dan IV di lingkup Dit Was SDK	60.00%	50.00%				
		7 Terwujudnya <i>good governance & clean government</i> di Dit Was SDK	10 Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti di banding total rekomendasi	1	1				
			11 Tingkat kualitas Akuntabilitas kinerja Setditjen. PSDKP	A	A				
			12 Nilai integritas Dit.Was SDK	6.5	6.75				
			13 Nilai Inisiatif anti korupsi Dit.Was SDK	7.5	7.75				
			14 Nilai Penerapan RB Dit.Was SDK	75	80				
		8 Pengelolaan anggaran Dit Was SDK yang optimal	15 Persentase penyerapan DIPA Dit. Was SDK	> 95%	> 95%				
C	Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas						218,959	139,000	
		STAKEHOLDER PERSPECTIVE							
		1 Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	1 Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	7.00%	7.25%				
		CUSTOMER PERSPECTIVE							
		2 Meningkatnya pengelolaan SDKP yang berkelanjutan	2 Proporsi tangkapan perikanan laut berada dalam batasan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB)	<100%	<100%				
		INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE							
		3 Tersedianya kebijakan bidang Kapal Pengawas yang sesuai kebutuhan	3 Jumlah kebijakan publik bidang Kapal Pengawas yang diselesaikan	1 dok	2 dok				
		4 Terselenggaranya modernisasi sistem produksi kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran produk Kelautan dan Perikanan	4 Persentase Kapal Perikanan yang masuk Kemitraan UPI dan Unit usaha Penangkapan ikan yang terawasi	1	1				
		5 Terselenggaranya Pengawasan dan penegakan hukum Pengelolaan SDKP	5 Persentase WPPNRI yang terawasi dari illegal fishing	31%	60%				

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)			
				2013	2014	2013	2014		
		LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE							
		6 Tersedianya SDM Dit. Kapal Pengawas yang kompeten dan profesional	6 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II, III dan IV di lingkup Dit Kapal Pengawas	60%	50%				
		7 Terwujudnya <i>good governance & clean government</i> di Dit. Kapal Pengawas	7 Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti di banding total rekomendasi	1	1				
			8 Tingkat kualitas Akuntabilitas kinerja Setditjen. PSDKP	A	A				
			9 Nilai integritas Dit. Kapal Pengawas	6.5	6.75				
			10 Nilai Inisiatif anti korupsi Dit Kapal Pengawas	7.5	7.75				
			11 Nilai Penerapan RB Dit Kapal Pengawas	75	80				
		8 Pengelolaan anggaran Ditjen. PSDKP yang optimal	12 Persentase penyerapan DIPA Dit. Kapal Pengawas	> 95%	> 95%				
D	Peningkatan Operasional Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan						153,347	290,000	
		STAKEHOLDER PERSPECTIVE							
		1 Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	1 Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	7.00%	7.25%				
		CUSTOMER PERSPECTIVE							
		2 Meningkatnya kinerja sistem pemantauan dan infrastruktur dalam mendukung pengawasan SDKP	2 Jumlah pemenuhan perangkat dan operasional sistem pemantauan SDKP yang terintegrasi dan akuntabel	8	15				
			3 Jumlah pemenuhan infrastruktur pengawasan sesuai kebutuhan yang memadai secara akuntabel dan tepat waktu	32	80				
		INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE							
		3 Tersedianya kebijakan bidang pemantauan SDKP dan PIP sesuai kebutuhan	4 Jumlah kebijakan publik bidang pengawasan SDKP yang diselesaikan	4 dok	4 dok				
		4 Terselenggaranya modernisasi sistem produksi kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan	5 Persentase kapal perikanan yang bermitra dengan UPI yang dapat dipantau	65%	70%				
		5 Terselenggaranya Pengawasan dan penegakan hukum Pengelolaan SDKP	6 Persentase pemanfaatan SDP yang dapat dipantau	65%	70%				
			7 Persentase pemanfaatan SDK yang dapat dipantau	75%	100%				
		LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE							
		6 Tersedianya SDM Dit. Pemantauan SDKP dan PIP yang kompeten dan profesional	8 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon III dan IV di lingkup Dit. Pemantauan SDKP dan PIP	60%	50%				
		7 Tersedianya informasi hasil pemantauan SDKP yang valid, handal & mudah diakses	9 <i>Service Level Agreement</i>	70%	75%				
			8 Terwujudnya <i>good governance & clean government</i> di Dit. Pemantauan SDKP dan PIP	10 Persentase jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti di banding total rekomendasi	100%	100%			
				11 Tingkat kualitas Akuntabilitas kinerja Setditjen. PSDKP	A	A			
			9 Terwujudnya <i>good governance & clean</i>	12 Nilai integritas Dit. Pemantauan SDKP dan PIP	6.5	6.75			
				13 Nilai Inisiatif anti korupsi Dit. Pemantauan SDKP dan PIP	7.5	7.75			
		14 Nilai Penerapan RB Dit. Pemantauan SDKP dan PIP		75	80				
		15 Nilai penguatan kualitas pelayanan publik	80	90					
		10 Pelaksanaan anggaran Dit. Pemantauan SDKP dan PIP yang optimal	16 Persentase penyerapan DIPA Dit. Pemantauan SDKP dan PIP	> 95%	> 95%				
E	Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan						18,238	18,000	
		STAKEHOLDER PERSPECTIVE							
		1 Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	1 Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	7.00%	7.25%				
		CUSTOMER PERSPECTIVE							
		2 Meningkatnya Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	2 Persentase Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Yang Disidik	90%	90%				
			3 Persentase Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal Yang Disidik	90%	90%				
		INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE							
		3 Tersedianya kebijakan bidang penanganan pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang sesuai kebutuhan	4 Jumlah kebijakan publik bidang penanganan pelanggaran Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang diselesaikan	2 doc	2 doc				

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)		
				2013	2014	2013	2014	
		4 Terselenggaranya modernisasi sistem produksi kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan	5 Penyelesaian kasus kapal penangkap ikan yang melakukan kemitraan dengan UPI, yang disidik	90%	90%			
		5 Terselenggaranya Pengawasan dan penegakan hukum Pengelolaan SDKP	6 Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik secara akuntabel dan tepat waktu	73%	80%			
			7 Persentase jumlah nelayan Indonesia yang diadvokasi	80%	80%			
			8 Jumlah PPNs Perikanan yang kompeten	60	60			
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE								
		6 Tersedianya SDM Dit. PP yang kompeten dan profesional	9 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II, III dan IV di lingkup Dit. PP	60%	50%			
		7 Terwujudnya <i>good governance & clean government</i> di Dit. PP	10 Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti di banding total rekomendasi	100%	100%			
			11 Tingkat kualitas Akuntabilitas kinerja Setditjen. PSDKP	A	A			
			12 Nilai integritas Dit. PP	6.75	7			
			13 Nilai Inisiatif Anti Korupsi Dit. PP	7.5	7.75			
		14 Nilai Penerapan RB Dit. PP	75	80				
		8 Pengelolaan anggaran Direktorat PP yang optimal	15 Persentase penyerapan DIPA Dit. PP	> 95%	> 95%			
F	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP						110,925	157,379
CUSTOMER PERSPECTIVE								
	1 Tersedianya SDM Ditjen. PSDKP yang kompeten dan profesional	1 Jumlah pejabat fungsional yang kompeten	75 org	75 org				
			2 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II, III dan IV di lingkup DJPSDKP	60%	50%			
	2 Tersedianya informasi pengawasan SDKP yang valid, handal dan mudah diakses	3 <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	70%	75%				
			4 Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5)	4	4.25			
	3 Terwujudnya <i>good governance & clean government</i> di Ditjen. PSDKP	5 Tingkat ketaatan terhadap SAP DJPSDKP	100%	100%				
			6 Tingkat kepatuhan terhadap SPI DJPSDKP	100%	100%			
			7 Kecukupan pengungkapan BAS dalam LK DJPSDKP	cukup	cukup			
			8 Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di DJPSDKP	100%	100%			
			9 Nilai perencanaan Kinerja DJPSDKP	27	27.5			
			10 Nilai Pengukuran Kinerja DJPSDKP	15.5	15.5			
			11 Nilai Pelaporan Kinerja DJPSDKP	11.5	12			
			12 Nilai Evaluasi Program DJPSDKP	4	4.5			
		13 Nilai Pencapaian Kinerja DJPSDKP	15.5	16				
		14 Nilai Integritas Ditjen. PSDKP	6.5	6.75				
		15 Nilai Inisiatif anti korupsi Ditjen. PSDKP	7.5	7.75				
		16 Nilai Penerapan RB Ditjen PSDKP	75	80				
	4 Pengelolaan anggaran Ditjen. PSDKP yang optimal	17 Persentase penyerapan DIPA Ditjen. PSDKP	> 95%	> 95%				
	5 Terwujudnya kerja sama Bidang Pengawasan SDKP sesuai kebutuhan	18 Jumlah kerjasama yang telah diimplementasikan	5	6				
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE								
	6 Terselenggaranya pengembangan SDM Ditjen. PSDKP sesuai kebutuhan	19 Jumlah SDM Ditjen. PSDKP yang memenuhi kualifikasi	180	120				
	7 Tersedianya dokumen perencanaan, program, kegiatan dan anggaran yang efektif	20 Dokumen perencanaan tahunan dan 5 (lima) tahunan yang diselesaikan secara tepat waktu	3	3				
			21 Dokumen penganggaran yang diselesaikan secara akuntabel dan tepat waktu	2	2			
	8 Terselenggaranya RB sesuai roadmap RB Ditjen. PSDKP	22 Persentase rencana aksi RB di Ditjen. PSDKP yang telah terpenuhi	100%	100%				
	9 Terselenggaranya pengelolaan anggaran dan BMN yang optimal	23 Persentase pengendalian dokumen anggaran.	100%	100%				
			24 Persentase ketepatan pencatatan transaksi keuangan dan BMN	100%	100%			
			25 Persentase ketepatan waktu penyampaian LK (bulanan, triwulanan, semester, tahunan)	100%	100%			
	11 Terlaksananya kerjasama nasional, regional, dan internasional di bidang pengawasan SDKP	26 Jumlah kerja sama Bidang Pengawasan SDKP yang disepakati	5	6				

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)		
				2013	2014	2013	2014	
		LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE						
		12 Tersedianya SDM lingkup Setditjen. PSDKP yang kompeten dan profesional	27 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II, III dan IV di lingkup Setditjen. PSDKP	60%	50%			
		13 Tersedianya informasi lingkup Setditjen. PSDKP yang valid, handal dan mudah diakses	28 <i>Service Level Agreement</i>	70%	75%			
			29 Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5)	4	4.25			
		14 Terwujudnya <i>good governance & clean government</i> di Setditjen. PSDKP	30 Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi	100%	100%			
			31 Tingkat kualitas Akuntabilitas kinerja Setditjen. PSDKP	A	A			
			32 Nilai Penerapan RB Setditjen. PSDKP	75 setara level 4)	80 setara level 4)			
			33 Nilai Inisiatif anti korupsi Setditjen. PSDKP	7.5	7.75			
			34 Nilai Integritas Setditjen. PSDKP	6.5	6.75			
		15 Pengelolaan anggaran Setditjen. PSDKP yang optimal	35 Persentase penyerapan DIPA Setditjen PSDKP	> 95%	> 95%			

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)	
				2013	2014	2013	2014
PROGRAM							
6	Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan					303,698	259,762
		STAKEHOLDER PERSPECTIVE					
	1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat KP	1 Nilai Tukar Nelayan	110	112		
			2 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	104	105		
			3 Rata-rata pendapatan pengolah & pemasar (KK/bulan)	Rp1,8 juta	Rp2,0 juta		
			4 Pertumbuhan PDB Perikanan	7.00%	7.25%		
		CUSTOMER PERSPECTIVE					
	2	Meningkatnya ketersediaan produk KP	5 Jumlah produksi perikanan budidaya (Jt Ton)	11.63	13.97		
			6 Jumlah produk olahan hasil perikanan (Jt Ton)	5	5.2		
	3	Meningkatnya hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan	7 Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan melalui sertifikasi kesehatan ikan ekspor, impor dan antar area	96%	98%		
			8 Jumlah laboratorium dan lembaga inspeksi yang menerapkan sistem manajemen mutu	23 Lab.: 31 LI	33 Lab.: 31 LI		
			9 Jumlah sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan sebagai persyaratan ekspor	1,115	1,125		
			10 Jumlah sertifikat cara karantina ikan yang baik (CKIB)	5	10		
		INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE					
	4	Tersedianya kebijakan perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai kebutuhan	11 Jumlah draft peraturan perundang-undangan bidang perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan	4	5		
			12 Jumlah kebijakan bidang perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan	3	4		
	5	Terselenggara-nya modernisasi sistem produksi KP, pengolahan dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu	13 Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra	≤ 10	≤ 10		
			14 Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui sertifikasi antar area dalam koridor SLIN	96%	98%		
			15 Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui sertifikasi impor hasil perikanan	96%	98%		
			16 Jumlah implementasi standar operasional prosedur teknis operasional perkarantinaan ikan	88	98		
	6	Terselenggara-nya modernisasi sistem produksi KP, pengolahan dan pemasaran produk KP	17 Jumlah Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan negara mitra (Approval Number)	50 UPI	50 UPI		
			18 Persentase sertifikasi kesehatan ikan berbasis <i>in line inspection</i>	15%	20%		
			19 Jumlah instalasi yang sesuai standar dan laboratorium yang terakreditasi	2 IKI, 5 lab	2 IKI, 5 lab		
			20 Jumlah lokasi yang menerapkan aplikasi sistem <i>traceability</i>	2	4		
	7	Terselenggaranya pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan	21 Rasio penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan yang dapat diselesaikan dibanding total kasus yang ditangani	80%	85%		
			22 Rasio penanganan jumlah kasus pelanggaran mutu dan keamanan hasil perikanan di negara mitra yang dapat diselesaikan dibanding total kasus yang ditangani	80%	85%		
		LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE					
	8	Tersedianya SDM BKIPM yang kompeten dan profesional	23 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III di BKIPM	60%	50%		
	9	Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di BKIPM	24 <i>Service Level Agreement</i> di BKIPM	70%	75%		
			25 Persepsi user terhadap kemudahan akses di BKIPM (skala likert 1-5)	4	4.25		
	10	Terwujudnya <i>good governance & clean government</i> di BKIPM	26 Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di BKIPM	100%	100%		
			27 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BKIPM	Nilai AKIP A	Nilai AKIP A		
			28 Indeks kepuasan masyarakat BKIPM	7	7.5		
			29 Nilai inisiatif anti korupsi BKIPM	7.5	7.75		
			30 Nilai Penerapan RB BKIPM	75 (setara level 4)	80 (setara level 4)		
	11	Terkelolanya anggaran BKIPM secara optimal	31 Persentase penyerapan DIPA BKIPM	> 95%	> 95%		
KEGIATAN							
A	Pengembangan dan Pembinaan Perkarantinaan Ikan					12,927	10,670
		STAKEHOLDER PERSPECTIVE					
	1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat KP	1 Nilai Tukar Nelayan	110	112		
			2 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	104	105		
			3 Rata-rata pendapatan pengolah & pemasar per KK/bulan	Rp1,8 juta	Rp 2,0 juta		
			4 Pertumbuhan PDB Perikanan	7.00%	7.25%		
		CUSTOMER PERSPECTIVE					

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)					
				2013	2014	2013	2014				
		2 Meningkatkan ketersediaan produk kelautan dan perikanan	5 Jumlah produksi perikanan budidaya (Jt Ton)	11.63	13.97						
			6 Jumlah produk olahan hasil perikanan (Jt Ton)	5	5.2						
		3 Meningkatnya hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan	7 Jumlah Sertifikat Cara Karantina Ikan yang Baik (SCKIB)	5	10						
			8 Jumlah dokumen evaluasi sistem jaminan kesehatan ikan	0	4						
			9 Jumlah Unit Usaha Pembudidaya Ikan (UUPI) yang telah diregistrasi ke negara tujuan	0	5						
		INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE									
		4 Tersedianya kebijakan perkarantinaan ikan	10 Jumlah draft peraturan perundang-undangan bidang perkarantinaan ikan	3	3						
			11 Jumlah kebijakan bidang perkarantinaan ikan	15	17						
		5 Terselenggaranya sistem produksi KP, pengolahan, dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu	12 Jumlah instalasi karantina ikan (impor) yang ditetapkan	200	210						
			13 Jumlah SOP tata operasional perkarantinaan ikan yang diimplementasikan pada UPT KIPM	88	98						
			14 Jumlah hasil evaluasi penerapan CKIB pada UUPI	0	2						
			15 Jumlah instalasi yang sesuai standar dan laboratorium karantina ikan yang terakreditasi	2 IKI 5 Lab	2 IKI 5 Lab						
		6 Terselenggaranya pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang Karantina Ikan	16 Jumlah instalasi (impor) yang konsisten menerapkan biosecurity sesuai standar	20	25						
			17 Jumlah dukungan penyelesaian kasus pelanggaran di bidang karantina ikan	5	8						
			18 Jumlah kajian analisis risiko media pembawa	3	5						
			19 Jumlah dokumen persyaratan negara tujuan ekspor hasil perikanan Indonesia	3	3						
		LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE									
		7 Tersedianya SDM Puskari yang kompeten dan profesional	15 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II, III dan IV di Puskari	60%	50%						
		8 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di Puskari	16 <i>Service Level Agreement</i> (SLA) di Puskari	70%	75%						
		9 Terwujudnya <i>good governance & clean government</i> di Puskari	17 Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi	100%	100%						
			18 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Puskari	Nilai AKIP A	Nilai AKIP A						
			19 Indeks kepuasan masyarakat di Puskari	7	7.5						
20 Nilai inisiatif anti korupsi Puskari	7.5		7.75								
21 Nilai Penerapan RB Puskari	75 (setara level 4)		80 (setara level 4)								
10 Terkelolanya anggaran Puskari secara optimal	22 Persentase penyerapan anggaran Puskari	> 95%	> 95%								
B	Pengembangan Sistem Manajemen Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan					13,973	9,295				
		STAKEHOLDER PERSPECTIVE									
		1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat KP	1 Nilai Tukar Nelayan	110	112						
			2 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	104	105						
			3 Rata-rata pendapatan pengolah & pemasar per KK/bulan	Rp1,8 juta	Rp 2,0 juta						
			4 Pertumbuhan PDB Perikanan	7.00%	7.25%						
		CUSTOMER PERSPECTIVE									
		2 Meningkatnya Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu	5 Jumlah produksi perikanan budidaya (Jt Ton)	11.63	13.97						
			6 Jumlah produk olahan hasil perikanan (Jt Ton)	5	5.2						
			7 Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu produksi (pra panen dan pasca panen)	24	33						
		3 Meningkatnya hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan	8 Jumlah Laboratorium dan Lembaga Inspeksi yang menerapkan sistem manajemen mutu	23 Lab.; 31 LI	23 Lab.; 31 LI						
		INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE									
		4 Tersedianya kebijakan perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai kebutuhan	9 Jumlah kebijakan bidang karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan	3	4						
		5 Terselenggaranya modernisasi sistem produksi KP, pengolahan dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu	10 Jumlah lokasi yang menerapkan aplikasi sistem Traceability	2	4						
		6 Terselenggaranya pengendalian dan verifikasi Sistem Manajemen mutu	11 Jumlah lembaga inspeksi yang memenuhi persyaratan sebagai Lembaga penerbit sertifikat kesehatan	15	20						
			12 Jumlah laboratorium penguji UPT BKIPM yang memenuhi persyaratan sebagai Lembaga penerbit sertifikat kesehatan	20	25						

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)	
				2013	2014	2013	2014
			13 Jumlah laboratorium pengujian yang diverifikasi dalam rangka penerapan program NRMP	8	10		
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE							
		7 Tersedianya SDM Pusat MM yang kompeten dan profesional	14 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II, III dan IV di lingkungan Pusat MM	60%	50%		
		8 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di Pusat MM	15 <i>Service Level Agreement</i>	70%	75%		
		9 Terwujudnya <i>good governance & clean government</i> di Pusat MM	17 Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi	100%	100%		
			18 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Pusat MM	Nilai AKIP A	Nilai AKIP A		
			19 Indeks kepuasan masyarakat di Pusat MM	7	7.5		
			20 Nilai Inisiatif anti korupsi Pusat MM	7.5	7.75		
			21 Nilai Penerapan RB Pusat MM	75 (setara level 4)	80 (setara level 4)		
		10 Terkelolanya anggaran Pusat Mm secara optimal	22 Persentase penyerapan anggaran Pusat MM	> 95%	> 95%		
C	Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan					22,092	16,484
STAKEHOLDER PERSPECTIVE							
	1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat KP	1 Nilai Tukar Nelayan	110	112			
		2 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	104	105			
		3 Rata-rata pendapatan pengolah & pemasar per KK/bulan	Rp1,8 juta	Rp 2,0 juta			
		4 Pertumbuhan PDB Perikanan	7.00%	7.25%			
CUSTOMER PERSPECTIVE							
	2 Meningkatnya ketersediaan produk KP	5 Jumlah produksi perikanan budidaya (Jt Ton)	11.63	13.97			
		6 Jumlah produk olahan hasil perikanan (Jt Ton)	5	5.2			
	3 Meningkatnya hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan mutu dan keamanan	7 Jumlah sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan sebagai persyaratan ekspor	1,115	1,125			
		8 Jumlah UPI yang bersertifikasi HACCP	520	525			
		9 Jumlah Lokasi yang termonitor residu dan bahan berbahaya	20	20			
		10 Jumlah jenis uji yang terakreditasi	6	7			
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE							
	4 Tersedianya kebijakan mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai kebutuhan	11 Jumlah kebijakan bidang mutu dan keamanan hasil perikanan	3	4			
	5 Terselenggaranya modernisasi sistem produksi KP, pengolahan dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu	12 Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra	≤ 10	≤ 10			
		13 Jumlah Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan negara mitra (<i>Approval Number</i>)	50 UPI	50 UPI			
	6 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan	14 Rasio penanganan jumlah kasus pelanggaran mutu dan keamanan hasil perikanan di negara mitra yang dapat diselesaikan dibanding total kasus yang ditangani	80%	85%			
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE							
	7 Tersedianya SDM Pusat SM yang kompeten dan profesional	15 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II, III dan IV di lingkungan Pusat SM	60%	50%			
	8 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di Pusat SM	16 <i>Service Level Agreement</i>	70%	75%			
	9 Terwujudnya <i>good governance & clean government</i> di Pusat SM	18 Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi	100%	100%			
		19 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Pusat SM	Nilai AKIP A	Nilai AKIP A			
		20 Indeks kepuasan masyarakat di Pusat SM	7	7.5			
		21 Nilai inisiatif anti korupsi Pusat SM	7.5	7.75			
		22 Nilai Penerapan RB Pusat SM	80 (setara level 4)	90 (setara level 4)			
	10 Terkelolanya anggaran Pusat SM secara optimal	23 Persentase penyerapan anggaran Pusat SM	> 95%	> 95%			
D	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM					254,705	223,312
CUSTOMER PERSPECTIVE							
	1 Tersedianya SDM BKIPM yang kompeten dan profesional	1 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III di BKIPM	60%	50%			
		2 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di BKIPM	2 <i>Service Level Agreement</i> (SLA) di BKIPM	70%	75%		
		3 Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi di BKIPM (skala likert 1-5)	4	4.25			

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)					
				2013	2014	2013	2014				
		3 Terwujudnya <i>good governance & clean government</i> di BKIPM	4 Tingkat ketaatan terhadap SAP BKIPM	100%	100%						
			5 Tingkat kepatuhan terhadap SPI BKIPM	100%	100%						
			6 Kecukupan pengungkapan BAS dalam LK BKIPM	cukup	cukup						
			7 Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di BKIPM	100%	100%						
			8 Nilai perencanaan kinerja BKIPM	27	27.5						
			9 Nilai pengukuran kinerja BKIPM	15.5	15.5						
			10 Nilai pelaporan kinerja BKIPM	11.5	12						
			11 Nilai evaluasi program BKIPM	4	4.5						
			12 Nilai pencapaian kinerja BKIPM	15.5	16						
			13 Nilai inisiatif anti korupsi BKIPM	7.5	7.75						
			14 Nilai penerapan reformasi dan birokrasi BKIPM	75 (setara level 4)	80 (setara level 4)						
			4 Terkelolanya anggaran BKIPM secara optimal	15 Persentase penyerapan DIPA BKIPM	> 95%			> 95%			
			5 Terwujudnya kerja sama yang implementatif	16 Jumlah kerjasama yang telah diimplementasikan	4			5			
			INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE								
		6 Terintegrasinya sistem informasi BKIPM	17 Persentase Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) yang terintegrasi dibanding total TIK yang ada	25%	40%						
		7 Terselenggaranya RB sesuai roadmap RB BKIPM	18 Persentase rencana aksi RB yang telah terpenuhi	100%	100%						
		8 Terlaksananya kerja sama antar lembaga yang disepakati	19 Jumlah kerjasama antar lembaga yang disepakati	2	2						
		9 Terselenggaranya pengelolaan anggaran yang optimal	20 Persentase kesesuaian rencana belanja dengan bagan akun standar	100%	100%						
			21 Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pengadaan B/J sesuai jadwal	100%	100%						
			22 Persentase ketepatan waktu penyampaian LK (bulanan, triwulanan, semester, tahunan)	100%	100%						
		LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE									
		10 Tersedianya SDM lingkup Set BKIPM yang kompeten dan profesional	23 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II, III dan IV di Set BKIPM	60%	50%						
		11 Tersedianya informasi lingkup Set BKIPM yang valid, handal dan mudah diakses	24 <i>Service Level Agreement</i> (SLA) di Set BKIPM	70%	75%						
			25 Persepsi user terhadap kemudahan akses di Set BKIPM (skala likert 1-5)	4	4.25						
		12 Terwujudnya <i>good governance & clean government</i> lingkup Set BKIPM	26 Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Set BKIPM	100%	100%						
			27 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Set BKIPM	Nilai AKIP A	Nilai AKIP A						
28 Indeks kepuasan masyarakat di Set BKIPM	7		7.5								
29 Nilai Inisiatif anti korupsi Set BKIPM	7.5		7.75								
	30 Nilai Penerapan RB Set BKIPM	75 (setara level 4)	80 (setara level 4)								
13 Terkelolanya anggaran Set BKIPM secara optimal	31 Persentase penyerapan anggaran Set BKIPM	> 95%	> 95%								

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)	
				2013	2014	2013	2014
PROGRAM							
7	Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan					564,970	500,965
		STAKEHOLDER PERSPECTIVE					
	1 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat KP	1	Nilai Tukar Nelayan	110	112		
		2	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	104	105		
		3	Rata-rata Pendapatan Pengolah & Pemasar (KK/bulan)	Rp. 1,8 juta	Rp. 2,0 juta		
		4	Rata-rata Pendapatan Petambak Garam (KK/bulan)	Rp. 1,8 juta	Rp. 2,0 juta		
		5	Pertumbuhan PDB Perikanan	7.00%	7.25%		
	CUSTOMER PERSPECTIVE						
	2 Meningkatkan pemanfaatan hasil litbang KP oleh Masyarakat KP	6	Jumlah jejaring dan kemitraan Litbang KP	13	16		
		7	Jumlah hasil Litbang KP yang diadopsi oleh masyarakat KP	10	11		
		8	Jumlah Pengguna hasil Litbang KP (Kelompok/Orang)	30/60	76/80		
	3 Meningkatkan pengelolaan SDKP secara berkelanjutan	9	Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	3,6 juta ha	4,5 juta ha		
	INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE						
	4 Tersedianya kebijakan kelautan dan perikanan yang implementatif	10	Rasio jumlah kajian yang dijadikan bahan kebijakan terhadap total kajian yang dihasilkan	23%	33%		
		11	Persepsi masyarakat KP terhadap kebijakan yang diterbitkan KKP (dalam skala likert 1-5)	3	3		
	5 Tersedianya jumlah data dan informasi ilmiah KP	12	Jumlah data dan informasi ilmiah KP	37	49		
		13	Jumlah karya tulis ilmiah	409	398		
	6 Terselenggaranya modernisasi sistem produksi kelautan dan	14	Jumlah hasil litbang yang inovatif *)	83	85		
		15	Jumlah Inovasi yang diusulkan HKI	4	5		
	7 Terselenggaranya pengendalian Litbang KP	16	Proporsi litbang mendukung Program strategis KKP dibandingkan dengan program produk prospektif KP lainnya	60:40	80:20		
	LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE						
	8 Tersedianya SDM Balitbang KP yang kompeten dan profesional	17	Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III	60%	50%		
		18	Jumlah Profesor Riset	3	5		
		19	Proporsi jumlah pegawai fungsional litbang KP dibandingkan dengan total pegawai Balitbang	53.46%	59.00%		
	9 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses lingkup Balitbang KP	20	Service Level Agreement	70%	75%		
		21	Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5)	4	4.25		
	10 Terwujudnya good governance & clean government lingkup Balitbang KP	22	Jumlah rekomendasi aparat pengawas eksternal internal pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi lingkup Balitbang KP	100%	100%		
		23	Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Balitbang KP	Nilai AKIP A	Nilai AKIP A		
		24	Nilai integritas Balitbang KP	6.5	7		
		25	Nilai Inisiatif anti korupsi Balitbang KP	7.5	9		
		26	Nilai Penerapan RB Balitbang KP	75 (setara level 4)	80 (setara level 4)		
	11 Terkelolanya anggaran secara optimal lingkup BalitbangKP	27	Persentase penyerapan DIPA Balitbang KP	>95%	>95%		
KEGIATAN							
A	Penelitian dan Pengembangan IPTEK Perikanan Budidaya					161,105	137,268
		STAKEHOLDER PERSPECTIVE					
	1 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat KP	1	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	104	105		
		2	Pertumbuhan PDB Perikanan	7.00%	7.25%		
	CUSTOMER PERSPECTIVE						
	2 Meningkatkan pemanfaatan hasil litbang perikanan budidaya oleh Masyarakat KP	3	Jumlah jejaring dan kemitraan Litbang Perikanan Budidaya	4	4		
		4	Jumlah hasil Litbang Perikanan Budidaya yang diadopsi oleh Masyarakat KP	6	6		
		5	Jumlah pengguna hasil litbang Perikanan Budidaya (Kelompok/Orang)	22/244	22/244		
	INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE						
	3 Tersedianya kebijakan KP yang implementatif	6	Rasio jumlah hasil kajian litbang perikanan budidaya yang dijadikan bahan kebijakan terhadap total kajian yang dihasilkan	23%	33%		
		7	Jumlah rekomendasi litbang perikanan budidaya	5	5		
	4 Tersedianya data dan informasi ilmiah litbang perikanan budidaya	8	Jumlah data dan informasi ilmiah litbang perikanan budidaya	7	8		
		9	Jumlah karya tulis ilmiah litbang perikanan budidaya	113	113		
	5 Terselenggaranya modernisasi sistem produksi KP, pengolahan, dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu	10	Jumlah komponen teknologi iptek perikanan budidaya	19	15		
		11	Jumlah paket teknologi iptek perikanan budidaya	9	9		
		12	Jumlah produk biologi iptek perikanan budidaya	14	12		
		13	Jumlah model penerapan iptek perikanan budidaya	6	6		
		14	Jumlah Inovasi litbang perikanan budidaya yang diusulkan HKI	1	1		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)	
				2013	2014	2013	2014
		6 Terselenggaranya pengendalian litbang perikanan budidaya	15 Proporsi litbang perikanan budidaya mendukung program strategis KKP dibandingkan dengan program produk prospektif KP lainnya	60:40	80:20		
<i>LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE</i>							
		7 Tersedianya SDM lingkup Puslitbang Perikanan Budidaya yang kompeten dan profesional	16 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III	60%	50%		
			17 Jumlah Profesor Riset Bidang Perikanan Budidaya	1	1		
			18 Jumlah peneliti/perekayasa berpendidikan S3 di P4B	34	34		
			19 Proporsi jumlah pegawai fungsional litbang perikanan budidaya dibandingkan dengan total pegawai di lingkup Puslitbang Perikanan Budidaya	35:60	35:60		
		8 Tersedianya Sarpras yang terakreditasi di lingkup Puslitbang Perikanan Budidaya	20 Jumlah Parameter Uji Litbang Perikanan Budidaya Yang Terakreditasi	1	1		
		9 Terwujudnya good governance & clean government di lingkup Puslitbang Perikanan Budidaya	21 Jumlah rekomendasi aparat pengawas eksternal internal pemerintah (APEIP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di lingkup Puslitbang Perikanan Budidaya	100%	100%		
			22 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Puslitbang Perikanan Budidaya	Nilai AKIP A	Nilai AKIP A		
			23 Nilai Inisiatif anti korupsi Puslitbang Perikanan Budidaya	8	9		
			24 Nilai Penerapan RB Puslitbang Perikanan Budidaya	75 (setara level 4)	80 (setara level 4)		
		10 Terkelolanya anggaran secara optimal di lingkup Puslitbang Perikanan Budidaya	25 Persentase penyerapan DIPA Puslitbang Perikanan Budidaya	>95%	>95%		
B	Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan					153,147	123,759
<i>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</i>							
		1 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat KP	1 Nilai Tukar Nelayan	110	112		
			2 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	104	105		
			3 Rata-rata pendapatan pengolah & pemasar (KK/bulan)	Rp. 1,8 Juta	Rp. 2,0 juta		
			4 Rata-rata pendapatan petambak garam (KK/bulan)	Rp. 1,8 Juta	Rp. 2,0 juta		
			5 Pertumbuhan PDB Perikanan	7.00%	7.25%		
<i>CUSTOMER PERSPECTIVE</i>							
		2 Meningkatkan pemanfaatan hasil Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi KP oleh Masyarakat KP	6 Jumlah jejaring dan kemitraan lingkup P3TKP	4	4		
			7 Jumlah hasil Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi KP yang diadopsi oleh Masyarakat KP	2	2		
			8 Jumlah pengguna hasil Pengkajian dan Perekayasaan (Kelompok/Orang)	2	2		
		3 Meningkatkan pengelolaan SDKP secara berkelanjutan	9 Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	3,6 juta ha	4,5 juta ha		
<i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</i>							
		4 Tersedianya kebijakan kelautan dan perikanan yang implementatif berdasarkan kajian	10 Rasio jumlah kajian yang dijadikan bahan kebijakan terhadap total kajian yang dihasilkan	23%	33%		
			11 Jumlah Rekomendasi P3TKP	2	2		
		5 Tersedianya data dan informasi ilmiah Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan	12 Jumlah data dan informasi ilmiah Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi KP	2	2		
			13 Jumlah karya tulis ilmiah lingkup P3TKP	20	20		
		6 Terselenggara-nya sistem produksi kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan yang optimal dan bermutu	14 Jumlah hasil Pengkajian dan Perekayasaan Paket teknologi	9	9		
			15 Jumlah model penerapan Pengkajian dan Perekayasaan	2	2		
			16 Jumlah Inovasi lingkup P3TKP yang diusulkan HKI	1	1		
		7 Terselenggaranya Pengendalian Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi KP	17 Proporsi pengkajian dan perekayasaan Teknologi KP mendukung Program strategis KKP dibandingkan dengan program produk prospektif KP lainnya	80:20	80:20		
<i>LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE</i>							
		8 Tersedianya SDM yang kompeten dan profesional lingkup P3TKP	18 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III	60%	50%		
			19 Jumlah Peneliti/Perekayasa Berpendidikan S3 lingkup P3TKP	2	2		
			20 Proporsi jumlah pegawai Fungsional litbang P3TKP dibandingkan dengan total pegawai P3TKP	44:123	52:123		
		9 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses lingkup P3TKP	21 <i>Service Level Agreement</i>	70%	75%		
		10 Tersedianya Sarana dan Prasarana yang handal lingkup P3TKP	22 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengkajian dan Perekayasaan yang handal	0	1		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)		
				2013	2014	2013	2014	
		11 Terwujudnya good governance & clean government Lingkup P3TKP	23 Jumlah rekomendasi aparat pengawas eksternal internal pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi	100%	100%			
			24 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja P3TKP	Nilai AKIP A	Nilai AKIP A			
			25 Nilai integritas P3TKP	6.75	7			
			26 Nilai Inisiatif anti korupsi P3TKP	8	9			
			27 Nilai Penerapan RB P3TKP	75 (setara level 4)	80 (setara level 4)			
		12 Terkelolanya anggaran secara optimal lingkup P3TKP	28 Persentase penyerapan DIPA P3TKP	>95%	>95%			
C	Penelitian dan Pengembangan Iptek Kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya Laut dan Pesisir					32,905	30,011	
		STAKEHOLDER PERSPECTIVE						
		1 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat KP	1 Nilai Tukar Nelayan	110	112			
			2 Nilai Tukar Pembudidayaan Ikan	104	105			
			3 Rata-rata pendapatan petambak garam (KK/bulan)	Rp 1,8 juta	Rp. 2,0 juta			
			4 Pertumbuhan PDB Perikanan	7.00%	7.25%			
		CUSTOMER PERSPECTIVE						
		2 Meningkatkan pemanfaatan hasil litbang dinamika, kewilayahan, serta pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir oleh Masyarakat KP	5 Jumlah jejaring dan kemitraan Litbang SDL	4	4			
			6 Jumlah hasil Litbang SDLP yang diadopsi oleh Masyarakat KP	1	1			
			7 Jumlah pengguna hasil litbang SDLP(Kelompok/Orang)	2 Kelompok 5 Orang	2 Kelompok 5 Orang			
		3 Meningkatkan Pengelolaan SDKP yang berkelanjutan	8 Luas kawasan laut dan pesisir yang dikelola secara berkelanjutan	3,6 juta ha	4,5 juta ha			
		INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE						
		4 Tersedianya kebijakan KP yang implementatif berdasarkan kajian	9 Rasio jumlah kajian pengelolaan dan pemanfaatan SDLP yang dijadikan bahan kebijakan terhadap total kajian yang dihasilkan	23%	33%			
			10 Jumlah Naskah Akademik terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir secara berkelanjutan	2	2			
		5 Tersedianya, data dan informasi dinamika, kewilayahan dan pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir	11 Jumlah data dan informasi sumberdaya laut dan pesisir	4	5			
			12 Jumlah karya tulis ilmiah bidang sumberdaya laut dan pesisir	30	30			
			13 Jumlah kawasan pesisir dan WPP yang terpetakan, dinamika, kewilayahan serta pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisirnya	7 SDLP, 2 WPP	s			
		6 Terselenggaranya modernisasi sistem produksi KP, pengolahan, dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu	14 Jumlah model penerapan iptek pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir yang inovatif	3	3			
			15 Jumlah Inovasi berupa model penerapan iptek pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir yang diusulkan HKI	0	1			
		7 Terselenggaranya Pengendalian litbang sumberdaya laut dan pesisir	16 proporsi litbang sumberdaya laut dan pesisir mendukung Program strategis KKP dibandingkan program pengembangan produk prospektif KP lainnya	80:20	80:20			
		LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE						
		8 Tersedianya SDM P3SDLP yang kompeten dan profesional	17 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon III dan IV di P3SDLP	60%	50%			
			18 Jumlah peneliti berpendidikan S3 di P3SDLP	11	13			
			19 Jumlah fungsional peneliti madya di P3SDLP	4	5			
			20 Proporsi jumlah peg fungsional P3SDLP dibanding	55.00%	70.00%			
		9 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di P3SDLP	21 Service Level Agreement di P3SDLP	70%	75%			
		10 Tersedianya sistem akuisisi dan laboratorium SDLP yang yang handal	23 Tingkat akurasi data yang dihasilkan P3SDLP	≥95%	≥95%			
		11 Terwujudnya good governance & clean government di P3SDLP	24 Jumlah rekomendasi aparat pengawas eksternal internal pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di P3SDLP	100%	100%			
			25 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja P3SDLP	Nilai AKIP A	Nilai AKIP A			
			26 Nilai integritas P3SDLP	6.75	7			
			27 Nilai Inisiatif anti korupsi P3SDLP	8	9			
			28 Nilai Penerapan RB P3SDLP	75 (setara level 4)	80 (setara level 4)			
		12 Terkelolanya anggaran secara akuntabel di P3SDLP	29 Persentase penyerapan P3SLP	>95%	>95%			
D	Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan					86,119	105,700	
		STAKEHOLDER PERSPECTIVE						
		1 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat KP	1 Nilai Tukar Nelayan	110	112			
			2 Pertumbuhan PDB Perikanan	7.00%	7.25%			

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)		
				2013	2014	2013	2014	
		CUSTOMER PERSPECTIVE						
		2 Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian pengelolaan perikanan & konservasi SDI oleh Masyarakat KP	3 Jumlah jejaring dan kemitraan P4KSDI	13	16			
			4 Jumlah hasil penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi SDI yang diadopsi oleh masyarakat KP	10	11			
			5 Jumlah Pengguna hasil penelitian pengelolaan perikanan dan konservasi SDI	60/30	76/80			
		3 Meningkatnya Pengelolaan SDKP yang berkelanjutan	6 Jumlah kawasan area yang telah teridentifikasi kerentanan, kelangkaan, dan keterancaman kelestarian SDI dan habitatnya	6	7			
		4 Tersedianya kebijakan KP yang implementatif berdasarkan kajian	7 Jumlah kajian P4KSDI yang dijadikan bahan kebijakan terhadap total kajian yang dihasilkan	23%	33%			
			8 Jumlah Rekomendasi kebijakan pengelolaan perikanan dan konservasi SDI yang diadopsi masyarakat KP	7	5			
		5 Tersedianya jumlah data dan informasi ilmiah SD Perikanan pada wilayah Pengelolaan Perikanan, PUD & Kawasan Konservasi Perairan	9 Jumlah Data dan informasi sumberdaya perikanan perairan umum daratan	2	3			
			10 Jumlah Data dan informasi pemulihan stok dan konservasi sumberdaya perairan	2	3			
			11 Jumlah data dan informasi sumberdaya perikanan di wilayah pengelolaan perikanan laut	3	3			
			12 Jumlah karya tulis ilmiah pengelolaan perikanan & konservasi SDI P4KSDI	118	100			
		INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE						
		6 Terselenggaranya sistem produksi KP, pengolahan dan pemasaran produk KP yg optimal & bermutu	13 Jumlah model penerapan IPTEK pengelolaan perikanan & konservasi SDI yang inovatif	3	4			
			14 Jumlah Inovasi yang diusulkan HKI	-	-			
		7 Terselenggaranya Pengendalian Penelitian Pengelolaan Perikanan & Konservasi SDI	15 Proporsi litbang mendukung. Program (Industrialisasi, Minapolitan, Blue Economy) : pengembangan produk prospektif KP lainnya	60:80	80:20			
		LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE						
		8 Tersedianya SDM lingkup P4KSDI yang kompeten dan profesional	16 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III	30%	20%			
			17 Jumlah Profesor Riset	1	2			
			18 Prosentase jumlah pegawai fungsional peneliti dibandingkan total pegawai di P4KSDI	42	50			
			19 Jumlah Peneliti S3	18	4			
			20 Proporsi Jumlah fungsional litbang dibanding pegawai P4KSDI	1:02	50			
		9 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di lingkup P4KSDI	21 <i>Service Level Agreement</i>	70%	75%			
			22 Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5)	4	4.25			
		10 Tersedianya Saprasi lingkup P4KSDI yg terakreditasi	23 Jumlah laboratorium dan perpustakaan yang terakreditasi di P4KSDI	1	2			
		11 Terwujudnya good governance & clean government pengelolaan perikanan & konservasi SDI	24 Jumlah rekomendasi aparat pengawas eksternal internal pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi	100%	100%			
			25 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja P4KSDI	A	A			
			26 Nilai Inisiatif anti korupsi P4KSDI	8	9			
			27 Tingkat kualitas akuntabilitas kerjas P4KSDI	6.5	7			
			28 Nilai Penerapan RB P4KSDI	75 (setara level 4)	80 (setara level 4)			
		12 Terkelolanya anggaran secara optimal di P4KSDI	29 Persentase penyerapan DIPA P4KSDI	96%	97%			
E	Penelitian dan Pengembangan Iptek Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan						67,859	33,852
		STAKEHOLDER PERSPECTIVE						
		1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat KP	1 Rata-rata pendapatan pengolah & pemasar (KK/bulan)	Rp1,8 juta	Rp2.0 juta			
			2 Pertumbuhan PDB Perikanan	7.00%	7.25%			
		CUSTOMER PERSPECTIVE						
		2 Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP oleh Masyarakat KP	3 Jumlah jejaring dan kemitraan Litbang Pengolahan Produk dan Bioteknologi	8	8			
			4 Jumlah hasil Litbang Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP yang diadopsi oleh Masyarakat KP	10	11			
			5 Jumlah pengguna hasil litbang Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP (Kelompok)	32	16			
		INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE						
		3 Tersedianya kebijakan KP yang implementatif	6 Jumlah kajian pengolahan produk dan bioteknologi yang dijadikan bahan kebijakan	2	2			
		4 Tersedianya data dan Informasi ilmiah pengolahan produk dan bioteknologi	7 Jumlah data dan informasi ilmiah pengolahan produk dan bioteknologi KP	7	8			
			8 Jumlah karya tulis ilmiah bidang pengolahan produk dan bioteknologi KP	55	60			

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)					
				2013	2014	2013	2014				
		5 Terselenggaranya modernisasi sistem produksi KP, pengolahan, dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu	9 Jumlah komponen teknologi bidang pengolahan produk dan bioteknologi KP	7	7						
			10 Jumlah paket teknologi bidang pengolahan produk dan bioteknologi KP	5	8						
			11 Jumlah model penerapan IPTEK bidang pengolahan produk dan bioteknologi KP	8	7						
			12 Jumlah Inovasi pengolahan produk dan bioteknologi yang diusulkan HKI	1	1						
		6 Terselenggaranya Pengendalian Litbang Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP	13 Proporsi litbang pengolahan produk dan bioteknologi KP mendukung Program strategis KKP dibandingkan dengan program produk prospektif KP lainnya	60:40	80:20						
		LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE									
		7 Tersedianya SDM BBP4BKP yang kompeten dan profesional	14 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III	60%	50%						
			15 Jumlah Profesor Riset bidang pengolahan produk dan bioteknologi	1	2						
			16 Proporsi fungsional litbang pengolahan produk dan bioteknologi KP dengan pegawai BBP4BKP	59:104	60:104						
			17 Jumlah peneliti berpendidikan S3	8	13						
		8 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di lingkup BBP4BKP	18 <i>Service Level Agreement</i>	70%	75%						
19 Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5)	4		4.25								
9 Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan produk dan bioteknologi yang terakreditasi	20 Jumlah laboratorium yang terakreditasi	4	5								
10 Terwujudnya good governance & clean government di lingkup BBP4BKP	21 Jumlah rekomendasi aparat pengawas eksternal internal pemerintah (APEIP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi	100%	100%								
	22 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BBP4BKP	Nilai AKIP A	Nilai AKIP A								
	23 Nilai integritas BBP4BKP	6.75	7								
	24 Nilai Inisiatif anti korupsi BBP4BKP	8	9								
	25 Nilai Penerapan RB BBP4BKP	80 (setara level 4)	90 (setara level 5)								
11 Terkelolanya anggaran secara optimal	26 Persentase penyerapan DIPA BBP4BKP	96%	96%								
F	Penelitian dan Perekayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan					19,297	20,478				
		STAKEHOLDER PERSPECTIVE									
		1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat KP	1 Nilai Tukar Nelayan	110	112						
			2 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	104	105						
			3 Rata-rata pendapatan pengolah & pemasar (KK/bulan)	Rp1,8 juta	Rp. 2,0 juta						
			4 Rata-rata pendapatan petambak garam (KK/bulan)	Rp1,8 juta	Rp. 2,0 juta						
			5 Pertumbuhan PDB Perikanan	7.00%	7.25%						
		CUSTOMER PERSPECTIVE									
		2 Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian Sosek KP oleh Masyarakat KP	6 Jumlah jejaring dan kemitraan BBPSEKP	4	4						
			7 Jumlah hasil penelitian Sosial Ekonomi KP yang diadopsi oleh Masyarakat KP	4	4						
			8 Jumlah pengguna hasil penelitian Sosial Ekonomi KP (Kelompok/Orang)	5	6						
		INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE									
		3 Tersedianya kebijakan KP yang implementatif	9 Persentase jumlah Rekomendasi Kebijakan BBPSEKP yang dijadikan bahan kebijakan terhadap total kajian yang dihasilkan	30%	30%						
			10 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sosek KP	4	4						
			11 Persepsi masyarakat KP terhadap kebijakan yang diterbitkan KKP (dalam skala likert 1-5)	4	4.25						
		4 Tersedianya data dan informasi ilmiah Sosial Ekonomi KP	12 Jumlah data dan informasi ilmiah Sosial Ekonomi KP	7	8						
			13 Jumlah karya tulis ilmiah yang dihasilkan BBPSEKP	25	25						
			14 Jumlah Publikasi Sosial Ekonomi di Lingkup BBPSEKP	12	14						
			15 Frekuensi pertemuan ilmiah sosek KP di Lingkup BBPSEKP	4	4						
		5 Terselenggaranya modernisasi sistem produksi KP, pengolahan, dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu	16 Jumlah Model Penerapan Kelembagaan KP yang inovatif *)	4	4						
		6 Terselenggaranya Pengendalian penelitian Sosial Ekonomi KP	17 Proporsi penelitian Sosial Ekonomi KP mendukung program strategis KKP dibandingkan pengembangan produk prospektif KP lainnya	90:10	90:10						
		LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE									
7 Tersedianya SDM BBPSEKP yang kompeten dan profesional	18 Persentase Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III di lingkup BBPSEKP	60%	50%								
	19 Jumlah Professor penelitian di lingkup BBPSEKP	0	1								

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)	
				2013	2014	2013	2014
			20 Jumlah Peneliti S3 di BBPSEKP	7	8		
			21 Persentase jumlah pegawai Fungsional Peneliti Sosial Ekonomi dibandingkan total pegawai di lingkup BBPSEKP	42.05%	48.86%		
		8 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses	22 <i>Service Level Agreement (SLA) di lingkup BBPSEKP</i>	70%	75%		
		9 Terwujudnya good governance & clean government di lingkup BBPSEKP	24 Persentase Rekomendasi aparat pengawas eksternal internal pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi lingkup Balitbang KP	100%	100%		
			25 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BBPSEKP	Nilai AKIP A	Nilai AKIP A		
			26 Nilai Inisiatif anti korupsi BBPSEKP	8	9		
			27 Nilai integritas BBPSEKP	6.75	7		
			28 Nilai Penerapan RB BBPSEKP	75 (setara level 4)	80 (setara level 4)		
		10 Terkelolanya anggaran secara optimal di lingkup BBPSEKP	29 Persentase penyerapan DIPA BBPSEKP	>95%	>95%		
G	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan					44,535	49,877
		<i>CUSTOMER PERSPECTIVE</i>					
	1 Tersedianya SDM Balitbang KP yang kompeten dan profesional	1 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III Balitbang KP	30%	20%			
		2 Jumlah Profesor Riset	4	5			
		3 Proporsi jumlah pegawai fungsional litbang KP dibandingkan dengan total pegawai Balitbang KP	53.46%	59.00%			
	2 Tersedianya informasi di Balitbang KP yang valid, handal dan mudah diakses	4 <i>Service Level Agreement</i>	70%	75%			
		5 Persepsi user terhadap kemudahan akses Informasi Balitbang KP. (skala likert 1-5)	4	4.25			
	3 Terwujudnya good governance & clean government Balitbang KP	6 Tingkat ketaatan terhadap SAP Balitbang KP	100%	100%			
		7 Tingkat kepatuhan terhadap SPI Balitbang KP	100%	100%			
		8 Kecukupan pengungkapan BAS dalam LK Balitbang KP	cukup	cukup			
		9 Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Balitbang KP	100%	100%			
		10 Nilai perencanaan Kinerja Balitbang KP	27	27.5			
		11 Nilai Pengukuran Kinerja Balitbang KP	15.5	15.5			
		12 Nilai Pelaporan Kinerja Balitbang KP	11.5	12			
		13 Nilai Evaluasi Program Balitbang KP	4	4.5			
		14 Nilai Pencapaian Kinerja Balitbang KP	15.5	16			
		15 Indeks kepuasan masyarakat Balitbang KP	6.75	7			
	4 Terkelolanya anggaran Balitbang KP secara optimal	16 Nilai Inisiatif Anti Korupsi	8	9			
		17 Nilai Penerapan RB Balitbang KP	75 (setara level 4)	80 (setara level 4)			
		18 Proporsi litbang mendukung program strategis KKP dibandingkan dengan program pengembangan produk prospektif KP lainnya	60:40	70:30			
	5 Meningkatnya akreditasi saptas Litbang KP	19 Persentase Penyerapan DIPA lingkup Balitbang KP	>95%	>95%			
		20 Jumlah Laboratorium yang terakreditasi	2	1			
	6 Terwujudnya kerja sama litbang kp dalam dan luar negeri yang implementatif	21 Jumlah Kelembagaan yang terakreditasi	2	2			
		22 Jumlah naskah kerjasama litbang KP dalam dan luar negeri yang ditandatangani	24	16			
	<i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</i>						
	7 Terintegrasinya sistem informasi Balitbang KP	23 Prosentase teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang terintegrasi dibandingkan dengan total TIK yang ada	25%	40%			
	8 Terselenggaranya RB Balitbang KP sesuai roadmap RB KKP	24 Prosentase pelaksanaan rencana aksi RB	100%	100%			
	9 Terselenggaranya pengelolaan anggaran yang optimal	25 Persentase pengendalian dokumen anggaran	100%	100%			
		26 Persentase ketepatan pencatatan transaksi keuangan dan BMN	100%	100%			
		27 Persentase ketepatan waktu penyampaian LK (bulanan, triwulanan, semester, tahunan)	100%	100%			
	10 Terselenggaranya pengelolaan sarana dan prasarana sesuai standar akreditasi	28 Prosentase jumlah laboratorium yang terakreditasi dibandingkan dengan jumlah total laboratorium yang dimiliki Balitbang KP	10/12	6/12			
		29 Prosentase jumlah kelembagaan lingkup Balitbang KP yang terakreditasi dibandingkan dengan total kelembagaan Balitbang KP	19.05	23.81			
	11 Terlaksananya kerja sama Litbang KP dalam dan luar negeri sesuai dengan ruang lingkup perjanjian kerjasama	30 Jumlah kerjasama penelitian dan pengembangan dengan instansi penelitian dan pengembangan dalam dan luar negeri	24	16			
		31 Jumlah kerjasama penelitian, pengembangan beserta penerapannya dengan Instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah, Swasta dan Masyarakat	2	2			

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)		
				2013	2014	2013	2014	
		<i>LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE</i>						
		12 Tersedianya SDM Sekretariat Balitbang KP yang kompeten dan profesional	32 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III	60%	50%			
			33 Proporsi jumlah pegawai fungsional non-litbang Sekretariat dibandingkan dengan total pegawai Sekretariat Balitbang KP	53.46%	59.00%			
		13 Tersedianya informasi Set Balitbang KP yang valid, handal dan mudah diakses	34 Service Level Agreement Sekretariat Balitbang KP	70%	75%			
			35 Persepsi user terhadap kemudahan akses Sekretariat Balitbang KP. (skala likert 1-5)	4	4.25			
		14 Terwujudnya good governance & clean government Set Balitbang KP	36 Jumlah rekomendasi aparat pengawas eksternal internal pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi lingkup Sekretariat Balitbang KP	100%	100%			
			37 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Sekretariat Balitbang KP	Nilai AKIP A	Nilai AKIP A			
			38 Indeks kepuasan masyarakat Sekretariat Balitbang KP	6.5	7			
			39 Nilai Inisiatif anti korupsi Sekretariat Balitbang KP	7.5	8			
			40 Nilai penerapan RB Sekretariat Balitbang KP	75 (setara level 4)	80 (setara level 4)			
		15 Terkelolanya anggaran Set Balitbang KP secara optimal	41 Persentase Penyerapan DIPA lingkup Sekretariat Balitbang KP	>95%	>95%			

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)	
				2013	2014	2013	2014
PROGRAM							
8	Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan					491,304	479,344
		STAKEHOLDER PERSPECTIVE					
		1 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat KP	1 Nilai Tukar Nelayan	110	112		
			2 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	104	105		
			3 Rata-rata pendapatan pengolah & pemasar (KK/bulan)	Rp1,8 juta	Rp2,0 juta		
			4 Rata-rata pendapatan petambak garam (KK/bulan)	Rp1,8 juta	Rp2,0 juta		
			5 Pertumbuhan PDB Perikanan	7.00%	7.25%		
		CUSTOMER PERSPECTIVE					
		2 Tersedianya SDM KKP yang Kompeten	6 Rasio jumlah SDM KKP yang meningkat kompetensinya sesuai hasil pemetaan berbanding dengan jumlah total SDM KKP	30%	40%		
		3 Meningkatnya masyarakat KP yang berkontribusi positif terhadap pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan	7 Rasio kelompok pelaku utama yang dapat mengembangkan usaha dan produktivitasnya terhadap jumlah total	50%	60%		
		4 Meluasnya kesiapan masyarakat untuk usaha dan kesempatan kerja di bidang KP	8 Jumlah tenaga kerja baru di sektor KP (orang)	1,900	2,450		
		INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE					
		5 Terselenggaranya pemetaan kelompok pelaku utama/usaha yang tepat	9 Rasio jumlah dan klasifikasi kelompok pelaku utama dan pelaku usaha yang terlibat langsung di sektor KP yang akan di latih dan disuluh	75%	80%		
		6 Terselenggaranya informasi pasar kerja di sektor KP	10 Jumlah lapangan pekerjaan di sektor KP yang dapat diinformasikan kepada masyarakat KP	15,000	20,000		
		7 Terselenggaranya modernisasi sistem produksi kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan yang optimal dan bermutu	11 Rasio jumlah peserta yang dididik, dilatih, dan disuluh yang kompeten di bidang KP terhadap total peserta	61.67%	65%		
		8 Terselenggaranya Pendidikan dan pelatihan Aparatur sesuai kompetensi yang dibutuhkan	12 Rasio jumlah SDM KKP yang dilatih sesuai kompetensinya terhadap jumlah kebutuhan yang akan ditingkatkan	75%	80%		
			13 Rasio jumlah SDM KKP yang melakukan peningkatan jenjang pendidikan formal terhadap jumlah kebutuhan yang akan ditingkatkan	75%	80%		
		9 Terselenggaranya uji kompetensi dan sertifikasi SDM sesuai kebutuhan	14 Rasio Jumlah SDM KP yang lulus uji kompetensi terhadap jumlah SDM KP yang mengikuti uji kompetensi	85%	90%		
		10 Terselenggaranya monitoring dan evaluasi terhadap kompetensi dan pengembangan usaha masyarakat KP yang telah terdikiatluh	15 Rasio kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang tidak dapat mengembangkan usahanya jumlah total yang dilatih dan disuluh	15%	10%		
			16 Rasio peserta didik yang tidak terserap dunia usaha dan dunia industri dibanding total lulusan pendidikan	10%	5%		
		LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE					
		11 Tersedianya SDM di BPSDM KP yang kompeten dan profesional	17 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III di BPSDM KP	60%	50%		
		12 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di BPSDM KP	18 <i>Service Level Agreement</i>	70%	75%		
			19 Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5)	4	4.25		
		13 Terwujudnya good governance & clean government di BPSDM KP	20 Jumlah rekomendasi APIEP yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi yang diberikan	100%	100%		
			21 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BPSDM KP	A	A		
			22 Nilai integritas BPSDM KP	6,5	6,75		
			23 Nilai Inisiatif anti korupsi BPSDM KP	7,5	7,75		
		14 Tersedianya anggaran yang optimal di BPSDM KP	24 Nilai Penerapan RB di BPSDM KP	75	80		
			25 Presentase Penyerapan DIPA BPSDMKP	> 95%	> 95%		
KEGIATAN							
A	Pelatihan Kelautan dan Perikanan					117,013	106,788
		STAKEHOLDER PERSPECTIVE					
		1 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat KP	1 Nilai Tukar Nelayan	110	112		
			2 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	104	105		
			3 Rata-rata pendapatan pengolah & pemasar (KK/bulan)	Rp1,8 juta	Rp2,0 juta		
			4 Rata-rata pendapatan petambak garam (KK/bulan)	Rp1,8 juta	Rp2,0 juta		
			5 Pertumbuhan PDB Perikanan	7.00%	7.25%		
		CUSTOMER PERSPECTIVE					
		2 Tersedianya SDM KKP yang Kompeten dan Profesional	6 Rasio jumlah SDM KKP yang meningkat kompetensinya sesuai hasil pemetaan berbanding dengan jumlah total SDM KKP	30%	35%		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)	
				2013	2014	2013	2014
		3 Meningkatkan masyarakat KP yang berkontribusi positif terhadap pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan	7 Rasio jumlah lulusan pelatihan yang dapat menerapkan hasil pelatihannya terhadap jumlah lulusan pelatihan	30%	50%		
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE							
		4 Meluasnya kesempatan kerja di bidang KP	8 Jumlah tenaga kerja baru di sektor KP (orang)	500	750		
		5 Terselenggaranya pemetaan kebutuhan pelatihan KP bagi SDM KKP dan masyarakat KP yang tepat	9 Rasio jumlah peserta yang akan dilatih dibanding total pemetaan kebutuhan pelatihan bagi SDM KKP dan masyarakat KP	75%	85%		
		6 Terselenggaranya modernisasi sistem produksi KP, pengolahan, dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu	10 Rasio jumlah masyarakat KP yang dilatih dibanding total masyarakat KP berdasarkan hasil pemetaan	61.67%	65%		
		7 Terselenggaranya pelatihan KP bagi SDM KKP sesuai kompetensi yang dibutuhkan	11 Rasio jumlah SDM KKP yang meningkat kompetensinya dari total yang telah melakukan assesment	90%	95%		
		8 Terselenggaranya uji dan sertifikasi kompetensi SDM KKP dan masyarakat KP sesuai kebutuhan	12 Rasio jumlah SDM KP yang lulus uji kompetensi terhadap jumlah masyarakat KP yang mengikuti uji kompetensi	80%	85%		
			13 Rasio jumlah SDM KKP yang lulus uji kompetensi terhadap jumlah SDM KKP yang mengikuti uji kompetensi	90%	95%		
		9 Terselenggaranya monitoring dan evaluasi terhadap kompetensi SDM KKP dan masyarakat KP yang telah mendapatkan pelatihan	14 Rasio jumlah penyelenggaraan pelatihan sesuai standar terhadap jumlah total penyelenggaraan pelatihan	75%	85%		
			15 Rasio kelompok pelaku utama/pelaku usaha lulusan pelatihan tidak dapat mengembangkan usahanya terhadap jumlah total yang dilatih	15%	10%		
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE							
		10 Tersedianya SDM di Puslat KP BPSDM KP yang kompeten dan profesional	16 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon III dan IV di Puslat KP BPSDM KP	60%	50%		
		11 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di Puslat KP BPSDM KP	17 <i>Service Level Agreement</i>	70%	75%		
		12 Terwujudnya good governance & clean government di Puslat KP BPSDM KP	18 Jumlah rekomendasi APIEP yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi yang diberikan	100%	100%		
			19 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Puslat KP BPSDM KP	A	A		
			20 Nilai Inisiatif anti korupsi Puslat KP BPSDM KP	7,5	7,75		
			21 Indeks kepuasan masyarakat	6,75	7		
			22 Nilai Penerapan RB Puslat KP BPSDM KP	75 (setara level 4)	80 (setara level 4)		
			23 Persentase perencanaan kegiatan dan anggaran yang berbasis kinerja di Puslat KP	75	80		
		13 Terkelolanya anggaran yang optimal di Puslat KP BPSDM KP	24 Prosentase penyerapan DIPA RB Puslat KP BPSDM KP	> 95%	> 95%		
B	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan					82,505.0	74,089.0
STAKEHOLDER PERSPECTIVE							
		1 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat KP	1 Nilai Tukar Nelayan	110	112		
			2 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	104	105		
			3 Rata-rata pendapatan pengolah & pemasar (KK/bulan)	Rp1,8 juta	Rp2,0 juta		
			4 Rata-rata pendapatan petambak garam (KK/bulan)	Rp1,8 juta	Rp2,0 juta		
			5 Pertumbuhan PDB Perikanan	7.00%	7.25%		
CUSTOMER PERSPECTIVE							
		2 Meningkatkan peran kelembagaan, ketenagaan dan penyelenggaraan penyuluhan yang kolaboratif dan partisipatif	6 Rasio jumlah kelembagaan penyuluhan pemerintah yang kolaboratif dan partisipatif	30%	35%		
		3 Meningkatkan masyarakat KP yang berkontribusi positif terhadap pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan	7 melaksanakan pemenuhan tenaga penyuluh perikanan dan penyelenggaraan penyuluhan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan kelembagaan penyuluhan pemerintah	50%	60%		
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE							
		4 Terselenggaranya Pemetaan Kelompok Pelaku Utama/Usaha Perikanan yang tepat	8 Prosentasi jumlah dan klasifikasi kelompok pelaku utama /usaha yang terlibat langsung di sektor kelautan perikanan	60%	75%		
		5 Terselenggaranya pemetaan penyuluh perikanan yang tepat	9 Prosentase penyuluh perikanan yang terdata dari jumlah provinsi dan kabupaten/kota dibandingkan dengan penyuluh perikanan di semua provinsi dan kab/kota di Indonesia.	80%	90%		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)	
				2013	2014	2013	2014
		6 Tersedianya bahan regulasi penyuluhan KP sesuai mandat yang mendukung sistem penyuluhan KP	10 Prosentase bahan regulasi yang tersedia dibandingkan dengan bahan sesuai mandat yang harus disediakan	55%	75%		
		7 Terselenggaranya modernisasi sistem produksi kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan yang optimal dan bermutu	11 Rasio kelompok pelaku utama /usaha perikanan yang disuluh dibandingkan dengan jumlah total kelompok pelaku utama/usaha perikanan	61.67%	65%		
		8 Terselenggaranya sinergitas kelembagaan penyuluhan	12 Prosentase pertemuan/koordinasi penyuluhan dengan kelembagaan penyuluhan tingkat Propinsi dibandingkan dengan jumlah total kelembagaan Penyuluhan tingkat Propinsi yang harus dikoordinasikan dalam setahun	75%	80%		
			13 Prosentase pertemuan/koordinasi penyuluhan dengan kelembagaan penyuluhan tingkat kabupaten/kota dibandingkan dengan jumlah total Kelembagaan Penyuluhan tingkat kab/kota yang harus dikoordinasikan dalam setahun	25%	30%		
		9 Penyelenggaraan Penyuluhan yang Partisipatif	14 Prosentase jumlah metode penyuluhan yang digunakan oleh Pusluh KP dibandingkan jumlah metode penyuluhan yang ada	25%	35%		
			15 Prosentase materi penyuluhan yang disusun oleh Pusluh KP dibandingkan dengan jenis materi penyuluhan untuk mendukung program prioritas KKP	25%	35%		
		10 Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi terhadap kompetensi dan pengembangan usaha masyarakat KP yang telah disuluh secara terukur	16 Rasio kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang tidak dapat mengembangkan usahanya	15%	10%		
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE							
		11 Tersedianya SDM di Pusat Penyuluhan KP BPSDM KP yang kompeten dan profesional	17 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon III dan IV	60%	50%		
		12 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di Pusat Penyuluhan KP BPSDM KP	18 <i>Service Level Agreement</i>	70%	75%		
		13 Terwujudnya good governance & clean government di Pusat Penyuluhan KP BPSDM KP	19 Jumlah rekomendasi APIEP yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi yang diberikan	100%	100%		
			20 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Pusat Penyuluhan KP BPSDM KP	A	A		
			21 Nilai Inisiatif anti korupsi Pusat Penyuluhan KP	7,5	7,75		
			22 Indeks kepuasan masyarakat	6,75	7		
			23 Nilai Penerapan RB Pusat Penyuluhan KP	75 (setara level 4)	80 (setara level 4)		
		14 Terkelolanya anggaran yang optimal di Pusluh KP BPSDM KP	24 Prosentase perencanaan kegiatan dan anggaran yang berbasis kinerja di Pusluh KP	75	80		
			25 Prosentase penyerapan DIPA RB Pusat Penyuluhan KP	> 95%	> 95%		
C	Pendidikan Kelautan dan Perikanan					250,559	252,938
STAKEHOLDER PERSPECTIVE							
	1 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat KP	1 Nilai Tukar Nelayan	110	112			
		2 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	104	105			
		3 Rata-rata pendapatan pengolah & pemasar (KK/bulan)	Rp1,8 juta	Rp2,0 juta			
		4 Rata-rata pendapatan petambak garam (KK/bulan)	Rp1,8 juta	Rp2,0 juta			
		5 Pertumbuhan PDB Perikanan	7.00%	7.25%			
CUSTOMER PERSPECTIVE							
	2 Tersedianya SDM KKP yang Kompeten melalui pendidikan formal	6 Rasio jumlah SDM KKP yang menyelesaikan pendidikan melalui tugas belajar dan ijin belajar	25%	30%			
	3 Meningkatnya masyarakat KP yang berkontribusi positif terhadap pelaksanaan pembangunan KP	7 Rasio peserta didik yang berasal dari anak pelaku utama	35%	40%			
	4 Meluasnya kesiapan masyarakat untuk usaha dan kesempatan kerja di bidang KP	8 Jumlah tenaga kerja dari lulusan pendidikan KP (Orang)	1400	1700			
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE							
	5 Terselenggaranya pemetaan yang mencerminkan kebutuhan tenaga kerja KP	9 Rasio jumlah dan klasifikasi anak usia sekolah; kebutuhan kompetensi du/di KP; lapangan kerja sektor KP	10%	20%			
	6 Terselenggaranya informasi pasar kerja di sektor KP	10 Rasio jumlah layanan informasi pekerjaan di sektor KP	50%	75%			

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)	
				2013	2014	2013	2014
		7 Terselenggaranya program pendidikan vokasi di bidang KP dengan pendekatan <i>teaching factory</i>	11 Jumlah peserta didik vokasi bidang KP dengan pendekatan <i>teaching factory</i>	4557	4855		
			12 Rasio peserta didik yang terserap di dunia usaha dan dunia industri dibanding total lulusan pendidikan	90%	95%		
		8 Terselenggaranya Pendidikan Aparatur sesuai kompetensi yang dibutuhkan	13 jumlah SDM KKP yang melakukan peningkatan jenjang pendidikan formal (Orang)	200	250		
			14 Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang meningkat kompetensinya (Orang)	325	340		
		9 Terselenggaranya monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan KP serta alumni satuan pendidikan KP	15 Rasio peserta didik yang tidak terserap di dunia usaha dan dunia industri dibanding total lulusan pendidikan	10%	5%		
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE							
		10 Tersedianya SDM yang kompeten dan profesional di Pusdik KP	16 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon III dan IV di PUSDIK KP	60%	50%		
		11 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di Pusdik KP	17 <i>Service Level Agreement</i> di Pusdik KP	70%	75%		
		12 Terwujudnya good governance & clean government di Pusdik KP	18 Jumlah rekomendasi APIEP yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi yang diberikan di Pusdik KP	100%	100%		
			19 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Pusdik KP	A	A		
			20 Nilai Inisiatif anti korupsi Pusdik KP	7,5	7,75		
			21 Indeks kepuasan masyarakat	6,75	7		
			22 Nilai Penerapan RB di Pusdik KP	75 setara level 4)	80 setara level 4)		
		23 Persentase perencanaan program dan anggaran yang berbasis kinerja di Pusdik KP	75%	80%			
		13 Terkelolanya anggaran yang optimal di Pusdik KP	24 Presentase Penyerapan DIPA Pusdik KP	> 95%	> 95%		
D	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BPSDMKP					41,225	45,527
CUSTOMER PERSPECTIVE							
		1 Tersedianya SDM aparatur di BPSDM KP yang kompeten dan profesional	1 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III di BPSDM KP	60%	50%		
		2 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di BPSDM KP	2 <i>Service Level Agreement</i> di BPSDMKP	70%	75%		
			3 Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5) di BPSDMKP	4	4.25		
		3 Terwujudnya good governance & clean government di BPSDM KP	4 Tingkat ketaatan terhadap SAP BPSDM KP	100%	100%		
			5 Tingkat kepatuhan terhadap SPI BPSDM KP	100%	100%		
			6 Kecukupan pengungkapan BAS dalam LK BPSDM KP	cukup	cukup		
			7 Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di BPSDM KP	100%	100%		
			8 Nilai perencanaan Kinerja BPSDM KP	27	27.5		
			9 Nilai Pengukuran Kinerja BPSDM KP	15.5	15.5		
			10 Nilai Pelaporan Kinerja BPSDM KP	11.5	12		
			11 Nilai Evaluasi Program BPSDM KP	4	4.5		
		12 Nilai Pencapaian Kinerja BPSDM KP	15.5	16			
		13 Nilai Integritas BPSDM KP	6.75	7			
		14 Nilai Inisiatif Anti Korupsi BPSDM KP	7,5	7,75			
		15 Nilai Penerapan RB di BPSDM KP	75 (setara level 4)	80 (setara level 4)			
		4 Terkelolanya anggaran yang optimal di BPSDM KP	16 Presentase Penyerapan DIPA BPSDM KP	>95%	>95%		
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE							
		5 Terselenggaranya perencanaan anggaran dan kerjasama pengembangan SDM KP sesuai kebutuhan diklatlul	17 Persentase ketepatan dokumen anggaran dengan rencana kerja tahunan yang diusulkan	75%	80%		
			18 Rasio jumlah kerjasama yang diimplementasikan dibanding total kerjasama yang disepakati	75%	80%		
		6 Terselenggaranya pengelolaan anggaran, pengelolaan BMN, serta perkantoran yang optimal	19 Persentase dokumen pengendalian anggaran	100%	100%		
			20 Persentase ketepatan pencatatan transaksi keuangan dan BMN	100%	100%		
			21 Persentase ketepatan waktu penyampaian LK (bulanan, triwulanan, semester, tahunan)	100%	100%		
			22 Rasio jumlah pemanfaatan BMN dari jumlah BMN total	65%	70%		
			23 Presentase kesesuaian tertib administrasi perkantoran dengan peraturan perundang-undangan	90%	95%		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)					
				2013	2014	2013	2014				
		7 Terselenggaranya fasilitasi manajemen aparatur BPSDM KP sesuai peraturan perundangan	24 Presentase jumlah pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatannya di banding jumlah total pegawai untuk eselon IV kebawah	45%	50%						
			25 Persentase penurunan ketidaktaatan pegawai BPSDM KP terhadap peraturan yang berlaku di KKP	40%	35%						
			26 Persentase jumlah legislasi yang telah diimplementasikan pada lingkup BPSDM KP	75%	80%						
		8 Terselenggaranya monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang terukur	27 Presentase jumlah penyusunan rekomendasi yang dihasilkan terhadap output program pengembangan SDM KP di banding jumlah total output	80%	85%						
			28 Presentase kualitas Laporan sesuai peraturan yang berlaku	90%	95%						
		LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE									
		9 Tersedianya SDM aparatur di Sekretariat BPSDM KP yang kompeten dan profesional	29 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon III dan IV di Sekretariat BPSDM KP	60%	50%						
		10 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di Sekretariat BPSDM KP	30 Service Level Agreement di Sekretariat BPSDMKP	70%	75%						
			31 Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1 - 5)	4	4,25						
		11 Terwujudnya good governance & clean government di Sekretariat BPSDM KP	32 Jumlah rekomendasi Aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan	100%	100%						
			33 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Sekretariat BPSDM KP	A	A						
			34 Nilai Inisiatif Anti Korupsi Sekretariat BPSDM KP	7,5	7,75						
35 Indeks kepuasan masyarakat	6,75		7								
36 Nilai Penerapan RB di Sekretariat BPSDM KP	75 (setara level 4)		80 (setara level 4)								
12 Terkelolanya anggaran yang optimal di Sekretariat BPSDM KP	37 Persentase perencanaan program dan anggaran yang berbasis kinerja di Sekretariat BPSDM KP	75%	80%								
	38 Presentase Penyerapan DIPA Sekretariat BPSDM KP	>95%	>95%								

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)	
				2013	2014	2013	2014
PROGRAM							
9	Pengawasan dan peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP					59,118	50,532
		<i>CUSTOMER PERSPECTIVE</i>					
		1	Terwujudnya good governance dan clean government	1	Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal dan Internal dari total anggaran	1%	1%
				2	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	6	6,2
				3	Indeks integritas KKP	6.5	6.75
				4	Nilai Inisiatif anti korupsi KKP	7,5	7,75
				5	Nilai Evaluasi atas Implementasi RB KKP	75	80
		<i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</i>					
		2	Tersedianya kebijakan pengawasan pengawasan internal berbasis resiko	6	Persentase kegiatan pengawasan internal berbasis resiko	100%	100%
		3	Terselenggaranya pengawasan internal KKP yang efektif dan efisien	7	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja	70%	80%
				8	Berkurangnya materialitas TATD (Temuan audit yang tidak dapat ditindaklanjuti)	10%	8%
				9	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko, Pelayanan Publik, SAKIP, RB, LK KKP, dan PBJ lingkup KKP	70%	80%
		4	Terselenggaranya pengawasan internal KKP yang efektif dan efisien	10	Persentase pelaksanaan penugasan yang memenuhi standar pelaksanaan pengawasan	80%	90%
				11	Persentase jumlah laporan pengawasan yang memenuhi standar pelaporan	80%	90%
		<i>LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE</i>					
		5	Tersedianya SDM Itjen KKP yang kompeten dan profesional	12	Indeks Kesenjangan Kompetensi pegawai Itjen	60%	50%
		6	Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses lingkup Itjen	13	Service Level Agreement di Itjen	70%	75%
				14	Persepsi user terhadap kemudahan akses di Itjen (skala Likert 1-5)	4	4.25
		7	Terwujudnya good governance dan clean government lingkup Itjen	15	Jumlah rekomendasi aparat pengawas eksternal dan internal yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan	100%	100%
				16	Nilai AKIP Itjen	A	A
				17	Nilai integritas di Itjen KKP	6.5	6.75
				18	Nilai Inisiatif anti korupsi di Itjen	7.5	7.75
				19	Nilai Penerapan RB di Itjen KKP	75 (setara Level 4)	80 (setara level 4)
		20	Nilai Evaluasi SPI di Itjen	75	80		
		8	Terkelolanya anggaran secara optimal lingkup Itjen	21	Persentase penyerapan DIPA di Itjen	>95%	>95%
KEGIATAN							
A	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Sekretariat Jenderal (Setjen), BPSDMKP dan BKIPM serta Pelaksana Pembangunan KP					5,568	4,730
		<i>CUSTOMER PERSPECTIVE</i>					
		1	Terwujudnya good governance dan clean government	1	Batas toleransi materialitas temuan BPK, BPKP, dan Itjen dari total anggaran lingkup Setjen, BKIPM, dan BPSDM	1%	1%
				2	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja lingkup Setjen, BKIPM, dan BPSDM	6	6,2
				3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Setjen, BKIPM, dan BPSDM	6.5	6.75
				4	Nilai Inisiatif anti korupsi Setjen, BKIPM, dan BPSDM	7,5	7,75
				5	Nilai evaluasi atas implementasi RB lingkup Setjen, BKIPM, dan BPSDM	75	80

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)			
				2013	2014	2013	2014		
		<i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</i>							
		2 Tersedianya SDM Inspektorat I yang kompeten dan profesional	6	Persentase kegiatan pengawasan internal berbasis risiko lingkup Setjen, BKIPM, dan BPSDM	100%	100%			
		3 Terselenggaranya pengawasan internal KKP lingkup Setjen, BPSDM KP, dan BKIPM serta pengawasan SPI lingkup KKP yang berkualitas	7	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Setjen, BKIPM, dan BPSDM	70%	80%			
			8	Berkurangnya materialitas TATD (Temuan audit yang tidak dapat ditindaklanjuti) lingkup Setjen, BKIPM, dan BPSDM	10%	5%			
			9	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko lingkup KKP yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi	70%	80%			
			10	Nilai temuan material BPK pada Satker Setjen, BKIPM, dan BPSDM yang telah diaudit oleh Itjen	1%	1%			
		4 Terselenggaranya pengendalian pengawasan internal yang efektif lingkup Inspektorat I	11	Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan yang memenuhi standar pelaksanaan pengawasan lingkup Setjen, BKIPM, dan BPSDM	80%	90%			
			12	Persentase jumlah laporan pengawasan yang memenuhi standar pelaporan pengawasan lingkup Setjen, BKIPM, dan BPSDM	80%	90%			
		<i>LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE</i>							
		5 Tersedianya SDM Inspektorat I yang kompeten dan profesional	13	Indeks Kesenjangan Kompetensi pegawai Inspektorat I	60%	50%			
		6 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses lingkup Inspektorat I	14	Service Level Agreement di Inspektorat I	70%	75%			
			15	Persepsi user terhadap kemudahan akses di Inspektorat I (skala Likert 1-5)	4	4.25			
		7 Terwujudnya good governance dan clean government lingkup Inspektorat I	16	Jumlah rekomendasi aparat pengawas eksternal dan internal yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan lingkup Inspektorat I	100%	100%			
			17	Nilai AKIP Inspektorat I	A	A			
			18	Nilai integritas Inspektorat I	6.5	6.75			
			19	Nilai Inisiatif anti korupsi Inspektorat I	7.5	7.75			
			20	Nilai Penerapan RB Inspektorat I	75 (Setara Level 4)	80 (setara level 4)			
		21	Nilai Evaluasi SPI Inspektorat I	75	80				
		8 Terkelolanya anggaran secara optimal lingkup Inspektorat I	22	Persentase penyerapan DIPA Inspektorat I	>95%	>95%			
B	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP serta Pelaksana Pembangunan KP						6,561	5,300	
		<i>CUSTOMER PERSPECTIVE</i>							
		1 Terwujudnya good governance dan clean goverment	1	Batas toleransi materialitas temuan BPK, BPKP, dan Itjen dari total anggaran lingkup DJPT & DJPSDKP	1%	1%			
			2	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja lingkup DJPT & DJPSDKP	6	6,2			
			3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap DJPT & DJPSDKP	6.5	6.75			
			4	Nilai Inisiatif anti korupsi DJPT dan DJPSDKP	7,5	7,75			
			5	Nilai evaluasi atas implementasi RB lingkup DJPT dan DJPSDKP	75	80			
		<i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</i>							
		2 Tersedianya pedoman pengawasan internal yang implementatif	6	Persentase kegiatan pengawasan internal berbasis risiko lingkup DJPT dan DJPSDKP	100%	100%			

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)					
				2013	2014	2013	2014				
		3 Terselenggaranya pengawasan internal KKP lingkup DJPT dan DJPSDKP serta pengawasan pelayanan publik lingkup KKP yang berkualitas	7 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPT dan DJPSDKP	70%	80%						
			8 Berkurangnya materialitas TATD (Temuan audit yang tidak dapat ditindaklanjuti) lingkup DJPT dan DJPSDKP	10%	5%						
			9 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan pelayanan publik lingkup KKP yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi	70%	80%						
			10 Nilai temuan material BPK pada Satker DJPT dan DJPSDKP yang telah diaudit oleh Itjen	1%	1%						
		4 Terselenggaranya pengendalian pengawasan internal yang efektif lingkup Inspektorat II	11 Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan yang memenuhi standar pelaksanaan pengawasan lingkup DJPT dan DJPSDKP	80%	90%						
			12 Persentase jumlah laporan pengawasan yang memenuhi standar pelaporan pengawasan lingkup DJPT dan DJPSDKP	80%	90%						
		LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE									
		5 Tersedianya SDM Inspektorat II yang kompeten dan profesional	13 Indeks Kesenjangan Kompetensi pegawai Inspektorat II	60%	50%						
		6 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses lingkup Inspektorat II	14 <i>Service Level Agreement</i> di Inspektorat II	70%	75%						
			15 Persepsi user terhadap kemudahan akses di Inspektorat II (skala Likert 1-5)	4	4.25						
	7 Terwujudnya good governance dan clean government lingkup Inspektorat II	16 umlah rekomendasi aparat pengawas eksternal dan internal yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan lingkup Inspektorat II	100%	100%							
		17 Nilai AKIP Inspektorat II	A	A							
		18 Nilai integritas Inspektorat II	6.5	6.75							
		19 Nilai Inisiatif anti korupsi Inspektorat II	7.5	7.75							
		20 Nilai Penerapan RB Inspektorat II	75 (Setara Level 4)	80 (setara level 4)							
	21 Nilai Evaluasi SPI Inspektorat II	75	80								
	8 Terkelolanya anggaran secara optimal lingkup Inspektorat II	22 Persentase penyerapan DIPA Inspektorat II	>95%	>95%							
	C	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Ditjen Perikanan Budidaya dan Ditjen KP3K serta Pelaksana Pembangunan KP						6,121	5,220		
			CUSTOMER PERSPECTIVE								
			1 Terwujudnya good governance dan clean goverment	1 Batas toleransi materialitas temuan BPK, BPKP, dan Itjen dari total anggaran lingkup DJPB dan DJKP3K	1%			1%			
				2 Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja lingkup DJPB dan DJKP3K	6			6.2			
3 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap DJPB dan DJKP3K				6.5	6.75						
4 Nilai Inisiatif anti korupsi DJPB dan DJKP3K				7.5	7.75						
5 Nilai evaluasi atas implementasi RB lingkup DJPB dan DJKP3K				75	80						
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE											
2 Tersedianya pedoman pengawasan internal yang implementatif			6 Persentase kegiatan pengawasan internal berbasis risiko lingkup DJPB dan DJKP3K	100%	100%						
3 Terselenggaranya pengawasan internal KKP lingkup DJPB dan DJKP3K serta pengawasan akuntabilitas kinerja lingkup KKP yang berkualitas			7 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPB dan DJKP3K	70%	80%						
			8 Berkurangnya materialitas TATD (Temuan audit yang tidak dapat ditindaklanjuti) lingkup DJPB dan DJKP3K	10%	5%						

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)	
				2013	2014	2013	2014
			9 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan AKIP lingkup KKP yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi	70%	80%		
			10 Nilai temuan material BPK pada Satker DJPB dan DJKP3K yang telah diaudit oleh Itjen	1%	1%		
		4 Terselenggaranya pengendalian pengawasan internal yang efektif lingkup Inspektorat III	11 Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan yang memenuhi standar pelaksanaan pengawasan lingkup DJPB dan DJKP3K	80%	90%		
			12 Persentase jumlah laporan pengawasan yang memenuhi standar pelaporan pengawasan lingkup DJPB dan DJKP3K	80%	90%		
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE							
		5 Tersedianya SDM Inspektorat III yang kompeten dan profesional	13 Indeks Kesenjangan Kompetensi pegawai Inspektorat III	60%	50%		
		6 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses lingkup Inspektorat III	14 <i>Service Level Agreement</i> di Inspektorat III	70%	75%		
			15 Persepsi user terhadap kemudahan akses di Inspektorat III (skala Likert 1-5)	4	4.25		
		7 Terwujudnya good governance dan clean government lingkup Inspektorat III	16 umlah rekomendasi aparat pengawas eksternal dan internal yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan lingkup Inspektorat III	100%	100%		
			17 Nilai AKIP Inspektorat III	A	A		
			18 Nilai integritas Inspektorat II	6.5	6.75		
			19 Nilai Inisiatif anti korupsi Inspektorat III	7.5	7.75		
			20 Nilai Penerapan RB Inspektorat III	75 (Setara Level 4)	80 (setara level 4)		
			21 Nilai Evaluasi SPI Inspektorat III	75	80		
		8 Terkelolanya anggaran secara optimal lingkup Inspektorat III	22 Persentase penyerapan DIPA Inspektorat III	>95%	>95%		
D	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Ditjen P2HP dan Badan Litbang KP serta Pembangunan KP					4,960	4,206
CUSTOMER PERSPECTIVE							
	1 Terwujudnya good governance dan clean goverment		1 Batas toleransi materialitas temuan BPK, BPKP, dan Itjen dari total anggaran lingkup DJP2HP & BalitbangKP	≤ 1%	≤ 1%		
			2 Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja lingkup DJP2HP & BalitbangKP	6	6,2		
			3 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap DJP2HP & BalitbangKP	6.5	6.75		
			4 Nilai Inisiatif anti korupsi DJP2HP & BalitbangKP	7,5	7,75		
			5 Nilai evaluasi atas implementasi RB lingkup DJP2HP & BalitbangKP	75	80		
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE							
	2 Tersedianya pedoman pengawasan internal yang implementatif		6 Persentase kegiatan pengawasan internal berbasis risiko lingkup DJP2HP & BalitbangKP	100%	100%		
	3 Terselenggaranya pengawasan internal KKP lingkup DJP2HP dan BALITBANG KP serta pengawasan RB lingkup KKP		7 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJP2HP & BalitbangKP	70%	80%		
			8 Berkurangnya materialitas TATD (Temuan audit yang tidak dapat ditindaklanjuti) lingkup DJP2HP & BalitbangKP	10%	5%		
			9 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan RB lingkup KKP yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi	70%	80%		
			10 Nilai temuan material BPK pada Satker DJP2HP dan BalitbangKP yang telah diaudit oleh Itjen	1%	1%		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)					
				2013	2014	2013	2014				
		4 Terselenggaranya pengendalian pengawasan internal yang efektif lingkup Inspektorat IV	11 Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan yang memenuhi standar pelaksanaan pengawasan lingkup DJP2HP & BalitbangKP	80%	90%						
			12 Persentase jumlah laporan pengawasan yang memenuhi standar pelaporan pengawasan lingkup DJP2HP & BalitbangKP	80%	90%						
		LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE									
		5 Tersedianya SDM Inspektorat IV yang kompeten dan profesional	13 Indeks Kesenjangan Kompetensi pegawai Inspektorat IV	60%	50%						
		6 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses lingkup Inspektorat IV	14 <i>Service Level Agreement</i> di Inspektorat IV	70%	75%						
			15 Persepsi user terhadap kemudahan akses di Inspektorat IV (skala Likert 1-5)	4	4.25						
		7 Terwujudnya good governance dan clean government lingkup Inspektorat IV	16 umlah rekomendasi aparat pengawas eksternal dan internal yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan lingkup Inspektorat IV	100%	100%						
			17 Nilai AKIP Inspektorat IV	A	A						
			18 Nilai integritas Inspektorat IV	6.5	6.75						
			19 Nilai Inisiatif anti korupsi Inspektorat IV	7.5	7.75						
			20 Nilai Penerapan RB Inspektorat IV	75 (Setara Level 4)	80 (setara level 4)						
		21 Nilai Evaluasi SPI Inspektorat IV	75	80							
		8 Terkelolanya anggaran secara optimal lingkup Inspektorat IV	22 Persentase penyerapan DIPA Inspektorat IV	>95%	>95%						
		E	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dengan Tujuan Tertentu pada Pelaksana Pembangunan KP dan Pengawasan pada Unit Kerja Itjen					5,284	4,000		
				CUSTOMER PERSPECTIVE							
				1 Terwujudnya good governance dan clean government	1 Batas toleransi materialitas temuan BPK, BPKP, dan Itjen dari total anggaran lingkup Itjen			≤ 1%	≤ 1%		
					2 Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja lingkup Itjen			6	6,2		
					3 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Itjen			6.5	6.75		
					4 Nilai Inisiatif anti korupsi DJP2HP & BalitbangKP			7,5	7,75		
5 Nilai evaluasi atas implementasi RB lingkup Itjen	75				80						
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE											
2 Tersedianya pedoman pengawasan internal yang implementatif	6 Persentase kegiatan pengawasan internal berbasis risiko lingkup Itjen			100%	100%						
3 Terselenggaranya pengawasan internal KKP lingkup DJP2HP dan BALITBANG KP serta pengawasan RB lingkup KKP	7 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Itjen dan persentase jumlah rekomendasi Auditi dengan Tujuan Tertentu (ATT) yang dimanfaatkan untuk kinerja KKP			70%	80%						
	8 Berkurangnya materialitas TATD (Temuan audit yang tidak dapat ditindaklanjuti) lingkup Itjen			10%	5%						
	9 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan LK dan PBJ lingkup KKP yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi			70%	80%						
	10 Nilai temuan material BPK pada Satker Itjen yang telah diaudit oleh Itjen			1%	1%						
4 Terselenggaranya pengendalian pengawasan internal yang efektif lingkup Inspektorat V	11 Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan yang memenuhi standar pelaksanaan pengawasan lingkup Itjen			80%	90%						
	12 Persentase jumlah laporan pengawasan yang memenuhi standar pelaporan pengawasan lingkup Itjen			80%	90%						

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)		
				2013	2014	2013	2014	
		<i>LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE</i>						
		5 Tersedianya SDM Inspektorat V yang kompeten dan profesional	13 Indeks Kesenjangan Kompetensi pegawai Inspektorat V	60%	50%			
		6 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses lingkup Inspektorat V	14 <i>Service Level Agreement</i> di Inspektorat V	70%	75%			
			15 Persepsi user terhadap kemudahan akses di Inspektorat V (skala Likert 1-5)	4	4.25			
		7 Terwujudnya good governance dan clean government lingkup Inspektorat V	16 umlah rekomendasi aparat pengawas eksternal dan internal yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan lingkup Inspektorat V	100%	100%			
			17 Nilai AKIP Inspektorat V	A	A			
			18 Nilai integritas Inspektorat V	6.5	6.75			
			19 Nilai Inisiatif anti korupsi Inspektorat V	7.5	7.75			
			20 Nilai Penerapan RB Inspektorat V	75 (Setara Level 4)	80 (setara level 4)			
			21 Nilai Evaluasi SPI Inspektorat V	75	80			
		8 Terkelolanya anggaran secara optimal lingkup Inspektorat V	22 Persentase penyerapan DIPA Inspektorat V	>95%	>95%			
F	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Kelautan dan Perikanan					30,622	27,076	
		<i>CUSTOMER PERSPECTIVE</i>						
		1 Tersedianya SDM Itjen KKP yang kompeten dan profesional	1 Indeks Kesenjangan Kompetensi pegawai lingkup Set Itjen	30%	20%			
		2 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses lingkup Itjen	2 <i>Service Level Agreement</i> (SLA) lingkup Itjen	70%	75%			
			3 Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi (skala likert 1-5)	4	4.25			
		3 Terwujudnya good governance dan clean government lingkup	4 Tingkat ketaatan terhadap SAP Itjen	100%	100%			
			5 Tingkat kepatuhan terhadap SPI Itjen	100%	100%			
			6 Kecukupan pengungkapan BAS dalam LK Itjen	cukup	cukup			
			7 Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Itjen	100%	100%			
			8 Nilai perencanaan Kinerja Itjen	27	27.5			
			9 Nilai Pengukuran Kinerja Itjen	15.5	15.5			
			10 Nilai Pelaporan Kinerja Itjen	11.5	12			
			11 Nilai Evaluasi Program Itjen	4	4.5			
			12 Nilai Pencapaian Kinerja Itjen	15.5	16			
			13 Nilai Penerapan RB KKP	75 (Setara Level 4)	80 (setara level 4)			
		4 Terkelolanya anggaran secara optimal lingkup Itjen	14 Persentase penyerapan DIPA Itjen KKP	>95%	>95%			
		5 Terwujudnya citra positif Itjen KKP	15 Indeks persepsi pegawai KKP terhadap Itjen di setiap Eselon I	3	4			
		<i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</i>						
		6 Tersedianya kebijakan pengawasan internal berbasis risiko	16 Persentase kegiatan pengawasan internal berbasis risiko	100%	100%			
		7 Terselenggaranya RB lingkup Itjen sesuai roadmap RB Itjen	17 Persentase rencana aksi RB di Itjen KKP yang telah terpenuhi	100%	100%			
		8 Terselenggaranya pengelolaan anggaran yang optimal	18 Persentase kesesuaian rencana belanja dengan bagan akun standar	100%	100%			
			19 Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pengadaan B/J sesuai jadwal	100%	100%			

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)			
				2013	2014	2013	2014		
			20	Persentase ketepatan waktu penyampaian LK (bulanan, triwulanan, semester, tahunan)	100%	100%			
		9	Terkelolanya informasi pengawasan internal di lingkup Itjen	21	Persentase Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) yang terintegrasi dibanding total TIK yang ada	25%	40%		
		10	Terwujudnya kerja sama pengawasan yang implementatif	22	Jumlah perjanjian yang telah diimplementasikan	1	2		
<i>LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE</i>									
		11	Tersedianya SDM lingkup Set. Itjen yang kompeten dan profesional	23	Indeks Kesenjangan Kompetensi lingkup Sekretariat Itjen	60%	50%		
		12	Tersedianya informasi lingkup Set. Itjen yang valid, handal dan mudah diakses	24	<i>Service Level Agreement</i> Set Itjen	70%	75%		
				25	Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5) Set Itjen	4	4.25		
		13	Terwujudnya good governance dan clean government lingkup Set. Itjen	26	Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi	100%	100%		
				27	Nilai AKIP Set Itjen	A	A		
				28	Nilai Penerapan RB Set Itjen	75 (Setara Level 4)	80 (setara level 4)		
		14	Terkelolanya anggaran Set. Itjen secara optimal	29	Persentase penyerapan DIPA Set Itjen	>95%	>95%		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)	
				2013	2014	2013	2014
PROGRAM							
10	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP					626,301	397,731
		CUSTOMER PERSPECTIVE					
		1 Tersedianya SDM KKP yang kompeten dan profesional	1 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III	60%	50%		
		2 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses	2 <i>Service Level Agreement</i> (SLA) Sistem Informasi	70%	75%		
			3 Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi (skala likert 1-5)	4	4.25		
		3 Terwujudnya good governance & clean government	4 Tingkat ketaatan terhadap SAP	100%	100%		
			5 Tingkat kepatuhan terhadap SPI	100%	100%		
			6 Kecukupan pengungkapan BAS dalam LK KKP	cukup	cukup		
			7 Nilai perencanaan Kinerja	27	27.5		
			8 Nilai Pengukuran Kinerja	15.5	15.5		
			9 Nilai Pelaporan Kinerja	11.5	12		
			10 Nilai Evaluasi Program	4	4.5		
			11 Nilai Pencapaian Kinerja	15.5	16		
			12 Nilai Penerapan RB KKP	75 (Setara Level 4)	80 (setara level 4)		
		4 Terkelolanya anggaran secara optimal	13 Persentase penyerapan DIPA	> 95%	> 95%		
		5 Terwujudnya citra positif KKP di masyarakat	14 Rasio jumlah pemberitaan yang negatif dibanding total pemberitaan tentang KKP	20%	10%		
		6 Terwujudnya kerja sama internasional dan antarlembaga yang implementatif	15 Jumlah perjanjian yang telah diimplementasikan	24	25		
		INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE					
		7 Terselenggaranya penempatan SDM KKP berbasis kompetensi	16 Persentase unit kerja yang mengimplementasikan penempatan SDM KKP berbasis kompetensi dibanding total unit kerja yang ada di KKP	20%	40%		
		8 Terintegrasinya sistem informasi KKP	17 Persentase Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) yang terintegrasi dibanding total TIK yang ada	25%	40%		
		9 Terselenggaranya RB KKP sesuai roadmap RB KKP	18 Persentase program dan kegiatan RB yang dilaksanakan dibanding jumlah program dan kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai <i>road map</i> RB per tahun	100%	100%		
		10 Terselenggaranya pengelolaan anggaran yang optimal	19 Persentase pengendalian dokumen anggaran	100%	100%		
			20 Persentase ketepatan pencatatan transaksi keuangan dan BMN	100%	100%		
			21 Persentase ketepatan waktu penyampaian LK (bulanan, triwulanan, semester, tahunan)	100%	100%		
		11 Terselenggaranya publikasi dan pelayanan komunikasi dengan media dan lembaga yang optimal	22 Persentase terpublikasinya program dan kegiatan KKP melalui media dibanding jumlah publikasi program dan kegiatan KKP	80%	85%		
			23 Persentase jumlah sosialisasi program dan kegiatan KKP pada lembaga/stakeholder dibanding jumlah kegiatan sosialisasi yang ada	80%	85%		
		12 Terlaksananya pengembangan dan pembinaan kerja sama internasional dan antarlembaga bidang KP	24 Meningkatnya jumlah dokumen kerja sama dan perjanjian internasional bidang kelautan dan perikanan yang disepakati	50	60		
			25 Meningkatnya jumlah Kerja Sama Teknik bidang kelautan dan perikanan	3	5		
			26 Meningkatnya rasio antara kerja sama yang telah diimplementasikan dengan total kerja sama yang disepakati	50%	55%		
		LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE					
		13 Tersedianya SDM lingkup Setjen yang kompeten dan profesional	27 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III	60%	50%		
		14 Tersedianya informasi lingkup Setjen yang valid, handal dan mudah diakses	28 <i>Service Level Agreement</i> Setjen	70%	75%		
			29 Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5) Setjen	4	4.25		
		15 Terwujudnya good governance & clean government lingkup Setjen	30 Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi	100%	100%		
			31 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Setjen	Nilai AKIP A	Nilai AKIP A		
			32 Nilai integritas Setjen	6.5	6.75		
			33 Nilai Inisiatif anti korupsi Setjen	7.5	7.75		
			34 Nilai Penerapan RB Setjen	75 (Setara Level 4)	80 (setara level 4)		
		16 Terkelolanya anggaran Setjen secara optimal	35 Persentase penyerapan DIPA Setjen	> 95%	> 95%		
KEGIATAN							

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)		
				2013	2014	2013	2014	
A	Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monev Pembangunan KP					64,160	34,500	
		CUSTOMER PERSPECTIVE						
	1	Terwujudnya good governance & clean government	1	Nilai Perencanaan Kinerja	27	27.5		
			2	Nilai Pengukuran Kinerja	15.5	16		
			3	Nilai Pelaporan Kinerja	11.5	12		
			4	Nilai Evaluasi Program	4	4.5		
			5	Nilai Pencapaian Kinerja	15.5	16		
			6	Nilai Penerapan RB KKP	75 (Setara Level 4)	80 (setara level 4)		
	2	Terwujudnya keterpaduan program dan kegiatan strategis lingkup KKP, lintas K/L dan Pemda	7	Persentase program dan kegiatan strategis KKP yang dilakukan bersama-sama oleh unit Eselon I lingkup KKP dibanding roadmap program dan kegiatan strategis KKP	75%	100%		
			8	Persentase dukungan program dan kegiatan dari K/L dan Pemda dibanding total kebutuhan dukungan program dan kegiatan	25%	30%		
		INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE						
	3	Terselenggaranya program dan kegiatan peningkatan AKIP sesuai roadmap RB KKP	9	Persentase program dan kegiatan Peningkatan AKIP yang dilaksanakan dibanding jumlah program dan kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai roadmap RB KKP	100%	100%		
	4	Terselenggaranya program dan kegiatan monev RB sesuai roadmap RB KKP	10	Persentase program dan kegiatan monev RB yang dilaksanakan dibanding jumlah program dan kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai roadmap RB KKP	100%	100%		
	5	Tersedianya kebijakan keterpaduan program dan kegiatan strategis lingkup KKP, lintas K/L dan Pemda	11	Persentase kebijakan keterpaduan program dan kegiatan strategis lingkup KKP yang diterbitkan dibanding dengan total program dan kegiatan strategis	100%	100%		
	6	Terselenggaranya penyusunan anggaran yang efektif dan akuntabel	12	Persentase blokir anggaran pada DIPA	<7,5%	<5%		
			13	Persentase output cadangan pada DIPA lingkup KKP	<2,5%	<2%		
			14	Persentase penyelesaian dokumen rencana kerja dan anggaran lingkup KKP tepat waktu yang disampaikan ke Kemkeu dibanding total yang dibuat	100%	100%		
	7	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang akuntabel dan tepat waktu	15	Persentase laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaporkan secara <i>online</i> dibanding total laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dibuat	100%	100%		
			16	Persentase hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang ditindaklanjuti dibanding total hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan	70%	80%		
		LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE						
	8	Tersedianya SDM lingkup Biro Perencanaan yang kompeten dan profesional	17	Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon III dan IV Biro Perencanaan	60%	50%		
	9	Tersedianya informasi lingkup Biro Perencanaan yang valid, handal dan mudah diakses	18	<i>Service Level Agreement</i> Biro Perencanaan	70%	75%		
			19	Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5) Biro Perencanaan	4	4.25		
	10	Terwujudnya good governance & clean government lingkup Biro Perencanaan	20	Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi lingkup Biro Perencanaan	100%	100%		
			21	Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Biro Perencanaan	Nilai AKIP A	Nilai AKIP A		
			22	Nilai Inisiatif anti korupsi Biro Perencanaan	7.5	7.75		
			23	Penerapan RB Biro Perencanaan	75 (Setara Level 4)	80 (setara level 4)		
	11	Terkelolanya anggaran Biro Perencanaan secara optimal	24	Persentase penyerapan DIPA Biro Perencanaan	> 95 %	> 95 %		
B	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas KKP					399,433	276,498	
		CUSTOMER PERSPECTIVE						
	1	Tersedianya prasarana kantor pusat KKP yang memadai	1	Persentase penyelesaian gedung kantor pusat baru (GMB IV) (%)	40%	100%		
	2	Terwujudnya pengelolaan BMN lingkup KKP yang optimal	2	Persentase pencapaian standar pelayanan dalam pengelolaan BMN lingkup KKP sesuai SOP (%)	25%	60%		
	3	Terwujudnya pengelolaan rumah tangga kantor pusat KKP yang optimal	3	Persentase pencapaian standar pelayanan dalam pengelolaan rumah tangga kantor pusat KKP sesuai SOP (%)	80%	85%		
	4	Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan, administrasi persuratan dan kearsipan KKP yang optimal	4	Persentase pencapaian standar pelayanan ketatausahaan pimpinan sesuai SOP (%)	80%	85%		
			5	Persentase pencapaian standar pelayanan administrasi persuratan dan kearsipan KKP serta ketatausahaan Biro sesuai SOP (%)	80%	85%		
		INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE						

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)		
				2013	2014	2013	2014	
		5 Terselenggaranya pengelolaan BMN lingkup KKP sesuai ketentuan	6 Persentase BMN yang terdokumentasi sesuai dengan ketentuan	40%	60%			
		6 Terselenggaranya pengelolaan rumah tangga kantor pusat KKP secara optimal	7 Persentase pemeliharaan (perbaikan, penghijauan dan instalasi) sarana dan prasarana kerumah tanggaan	80%	90%			
			8 Presentase pengamanan objek vital dan aset negara kantor pusat KKP	100%	100%			
			9 Presentase pelayanan kesehatan bagi pegawai KKP sesuai kebutuhan	90%	100%			
			10 Presentase pelaksanaan olah raga dan kesenian pegawai sesuai ketentuan	80%	90%			
		7 Terselenggaranya pengelolaan ketatausahaan pimpinan sesuai ketentuan	11 Persentase pelaksanaan ketatausahaan Menteri sesuai ketentuan	85%	85%			
			12 Persentase pelaksanaan ketatausahaan Sekjen, SAB & SKM sesuai ketentuan	85%	85%			
			13 Persentase pelaksanaan keprotokolan yang handal	85%	85%			
			14 Persentase pelaksanaan persandian KKP yang handal	85%	85%			
		8 Terselenggaranya pengelolaan administrasi persuratan dan kearsipan KKP serta ketatausahaan Biro sesuai ketentuan	15 Persentase unit kerja yang menyelenggarakan tata naskah dinas dan kearsipan sesuai ketentuan	80%	85%			
			16 Persentase penyelesaian pembangunan sistem informasi persuratan dan kearsipan yang handal	80%	85%			
			17 Persentase pelaksanaan ketatausahaan Biro sesuai ketentuan	80%	85%			
		LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE						
		9 Tersedianya SDM lingkup Biro Umum yang kompeten dan profesional	18 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon III dan IV Biro Umum	60%	50%			
		10 Tersedianya informasi lingkup Biro Umum yang valid, handal dan mudah diakses	19 <i>Service Level Agreement</i> Biro Umum	70%	75%			
			20 Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5) Biro Umum	4	4.25			
		11 Terwujudnya good governance & clean government lingkup Biro Umum	21 Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi	100%	100%			
			22 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Biro Umum	Nilai AKIP A	Nilai AKIP A			
			23 Nilai Inisiatif anti korupsi Biro Umum	7.5	7.75			
			24 Nilai Penerapan RB Biro Umum	75 (Setara Level 4)	80 (setara level 4)			
		12 Terkelolanya anggaran Biro Umum secara optimal	25 Persentase penyerapan DIPA Biro Umum	> 95%	> 95%			
C	Pembinaan dan Koordinasi Penyiapan Produk Hukum dan Penataan Organisasi KKP					16,790	10,000	
		CUSTOMER PERSPECTIVE						
		1 Terwujudnya good governance & clean government	1 Nilai penerapan RB KKP	75 (Setara Level 4)	80 (setara level 4)			
		2 Terwujudnya naskah kerjasama dan perjanjian internasional dan antar lembaga yang efektif	2 Persentase penyelesaian naskah kerjasama dan perjanjian internasional dan antar lembaga	80%	90%			
		INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE						
		3 Terselenggaranya Program dan kegiatan penataan perundang-undangan sesuai roadmap RB KKP	3 Persentase program dan kegiatan penyusunan peraturan perundangan yang dilaksanakan dibanding jumlah program dan kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai roadmap RB per tahun	100%	100%			
		4 Terselenggaranya Program dan kegiatan Penataan organisasi sesuai roadmap RB KKP	4 Persentase program dan kegiatan penataan organisasi yang dilaksanakan dibanding jumlah program dan kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai roadmap RB per tahun	100%	100%			
		5 Terselenggaranya Program dan kegiatan Penataan tata laksana sesuai roadmap RB KKP	5 Persentase program dan kegiatan penataan tata laksana yang dilaksanakan dibanding jumlah program dan kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai roadmap RB per tahun	100%	100%			
		6 Tersusunnya naskah kerjasama dan perjanjian internasional dan antar lembaga tepat waktu	6 Persentase penyelesaian naskah kerjasama dan perjanjian internasional dan antar lembaga	80%	90%			
		LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE						
		7 Tersedianya SDM lingkup BHO yang kompeten dan profesional	7 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon III dan IV BHO	60%	50%			
		8 Tersedianya informasi lingkup BHO yang valid, handal dan mudah diakses	8 <i>Service Level Agreement</i> BHO	70%	75%			
			9 Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5) BHO	4	4.25			
		9 Terwujudnya good governance & clean government lingkup BHO	10 Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi	100%	100%			
			11 Nilai LAKIP BHO	Nilai AKIP A	Nilai AKIP A			
			12 Nilai Inisiatif anti korupsi BHO	7.5	7.75			
			13 Nilai Penerapan RB BHO	75 (Setara Level 4)	80 (setara level 4)			
		10 Terkelolanya anggaran BHO secara optimal	14 Persentase penyerapan DIPA BHO	> 95%	> 95%			
D	Pembinaan Pelaksanaan dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan KKP					24,243	11,500	
		CUSTOMER PERSPECTIVE						

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)					
				2013	2014	2013	2014				
		1 Terwujudnya good governance & clean government	1 Tingkat ketaatan terhadap SAP	100%	100%						
			2 Tingkat kepatuhan terhadap SPI	100%	100%						
			3 Kecukupan pengungkapan BAS dalam LK KKP	cukup	cukup						
			4 Nilai Penerapan RB KKP	75 (Setara Level 4)	80 (setara level 4)						
		2 Terkelolanya anggaran secara optimal	5 Persentase penyerapan DIPA	> 95%	> 95%						
		INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE									
		3 Terselenggaranya Program dan kegiatan Peningkatan pengawasan internal sesuai roadmap RB KKP	6 Persentase program dan kegiatan Peningkatan Pengendalian Internal yang dilaksanakan dibanding jumlah program dan kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai roadmap RB KKP per tahun	100%	100%						
		4 Terselenggaranya pengelolaan anggaran yang optimal	7 Persentase pengendalian dokumen anggaran	100%	100%						
			8 Persentase ketepatan pencatatan transaksi keuangan dan BMN	100%	100%						
			9 Persentase ketepatan waktu penyampaian LK (bulanan, triwulanan, semester, tahunan)	100%	100%						
			10 Jumlah satuan biaya Keluarnya yang ditetapkan Kementerian Keuangan setiap tahun	5	10						
			11 Batas waktu maksimal penyelesaian basis data pejabat pengelola anggaran setiap tahun	30 November	30 November						
			12 Batas waktu maksimal pengendalian bulanan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Tgl 5 setiap bulan	Tgl 5 setiap bulan						
			13 Batas waktu maksimal pengendalian bulanan penyerapan anggaran	Tgl 5 setiap bulan	Tgl 5 setiap bulan						
		LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE									
		5 Tersedianya SDM lingkup Biro Keuangan yang kompeten dan profesional	14 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon III dan IV Biro Keuangan	60%	50%						
		6 Tersedianya informasi lingkup Biro Keuangan yang valid, handal dan mudah diakses	15 Service Level Agreement Biro Keuangan	70%	75%						
			16 Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5) Biro Keuangan	4	4.25						
		7 Terwujudnya good governance & clean government lingkup Biro Keuangan	17 Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi	100%	100%						
			18 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Biro Keuangan	Nilai AKIP A	Nilai AKIP A						
			19 Nilai Inisiatif anti korupsi Biro Keuangan	7.5	7.75						
20 Nilai Penerapan RB Biro Keuangan	75 (Setara Level 4)		80 (setara level 4)								
8 Terkelolanya anggaran Biro Keuangan secara optimal	21 Persentase penyerapan DIPA Biro Keuangan	> 95%	> 95%								
E	Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian KKP			12,873	11,000						
		CUSTOMER PERSPECTIVE									
		1 Tersedianya SDM KKP yang kompeten dan profesional	1 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III	60%	50%						
		2 Terintegrasinya informasi kepegawaian KKP yang valid dan handal	2 Persepsi kepuasan pengguna terhadap informasi kepegawaian yang diberikan (skala likert 1-4)	3	3.3						
		3 Terwujudnya good governance & clean government	3 Nilai Inisiatif anti korupsi Setjen	7.5	7.75						
			4 Nilai Penerapan RB KKP	75 (Setara Level 4)	80 (setara level 4)						
		INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE									
		4 Terselenggaranya penempatan SDM KKP berbasis kompetensi	5 Persentase unit kerja yang mengimplementasikan penempatan SDM KKP berbasis kompetensi dibanding total unit kerja yang ada di KKP	20%	40%						
		5 Terwujudnya pembinaan, pengembangan dan pengelolaan administrasi Kepegawaian sesuai kebutuhan	6 Persentase Penetapan Kenaikan Pangkat dibanding dengan jumlah usulan	100%	100%						
			7 Persentase SK Pengangkatan, pemindahan, pembebasan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional dibanding dengan jumlah usulan	100%	100%						
			8 Jumlah Jenis Jabatan fungsional tertentu	24	24						
		6 Terwujudnya pengolahan dan penyajian data informasi kepegawaian yang akurat	9 Jumlah Dokumen Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Jabatan, Daftar Urut Kepangkatan, dan Daftar Riwayat Hidup	10	10						
		7 Terselenggaranya Program dan kegiatan Manajemen Perubahan Bidang SDM aparatur sesuai roadmap RB KKP	10 Persentase program dan kegiatan manajemen perubahan SDM yang dilaksanakan dibanding jumlah program dan kegiatan yg harus dilakukan sesuai roadmap RB KKP per tahun	100%	100%						
		LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE									
		8 Terselenggaranya Program dan kegiatan Penataan SDM aparatur sesuai roadmap RB KKP	11 Persentase program dan kegiatan penataan SDM aparatur yang dilaksanakan dibanding jumlah program dan kegiatan yg harus dilakukan sesuai roadmap RB KKP per tahun	100%	100%						

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)			
				2013	2014	2013	2014		
		9	Tersedianya SDM lingkup Biro Kepegawaian yang kompeten dan profesional	12 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon III dan IV Biro Kepegawaian	60%	50%			
		10	Tersedianya informasi lingkup Biro Kepegawaian yang valid, handal dan mudah diakses	13 <i>Service Level Agreement</i> Biro Kepegawaian	70%	75%			
				14 Persepsi user terhadap kemudahan akses	4	4.25			
		11	Terwujudnya good governance & clean government lingkup Biro Kepegawaian	15 Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi	100%	100%			
				16 Nilai LAKIP Biro Kepegawaian	Nilai AKIP A	Nilai AKIP A			
17 Nilai Inisiatif anti korupsi Biro Kepegawaian	7.5			7.75					
18 Nilai Penerapan RB Biro Kepegawaian	75 (Setara Level 4)	80 (setara level 4)							
12	Terkelolanya anggaran Biro Kepegawaian secara optimal	19 Persentase penyerapan DIPA Biro Kepegawaian	> 95%	> 95%					
F	Pengembangan dan Pembinaan Kerja Sama Internasional dan Antarlembaga Bidang KP						26,331	15,105	
		<i>CUSTOMER PERSPECTIVE</i>							
		1	Terwujudnya kerja sama internasional dan antarlembaga yang implementatif	1 Jumlah perjanjian yang telah diimplementasikan	27	27			
		<i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</i>							
		2	Tersedianya hasil analisis dan evaluasi kerja sama bilateral, multilateral dan antarlembaga yang akuntabel	2 Jumlah hasil analisis dan evaluasi kerja sama bilateral, multilateral, dan antarlembaga	59	63			
		3	Terlaksananya Pengembangan dan Pembinaan Kerja Sama Internasional dan Antarlembaga Bidang Kelautan dan Perikanan	3 Jumlah dokumen kerja sama dan perjanjian internasional bidang kelautan dan perikanan yang disepakati	59	63			
				4 Jumlah Kerja Sama Teknik bidang kelautan dan perikanan	3	5			
				5 Rasio antara kerja sama yang telah diimplementasikan dengan total kerja sama yang disepakati	45%	50%			
		<i>LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE</i>							
		4	Tersedianya SDM lingkup PUSKITA yang kompeten dan profesional	6 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon III dan IV PUSKITA	60%	50%			
		5	Tersedianya informasi lingkup PUSKITA yang valid, handal dan mudah diakses	7 <i>Service Level Agreement (SLA)</i> PUSKITA	70%	75%			
				8 Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5) PUSKITA	4	4.25			
		6	Terwujudnya good governance & clean government lingkup PUSKITA	9 Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi	100%	100%			
				10 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja PUSKITA	Nilai AKIP A	Nilai AKIP A			
				11 Nilai Inisiatif anti korupsi PUSKITA	7.5	7.75			
				12 Nilai Penerapan RB PUSKITA	75 (Setara Level 4)	80 (setara level 4)			
7	Terkelolanya anggaran lingkup PUSKITA secara optimal	13 Persentase penyerapan DIPA PUSKITA	> 95%	> 95%					
G	Pengembangan dan Pembinaan Data Statistik dan Informasi KP						62,221	24,127	
		<i>CUSTOMER PERSPECTIVE</i>							
		1	Tersedianya Informasi KP yang valid, handal dan mudah diakses	1 Persentase partisipasi aktif unit eselon I lingkup KKP dalam menggunakan layanan SIDATIK	30%	100%			
				2 <i>Service Level Agreement (SLA)</i>	70%	75%			
				3 Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi (skala likert 1-5)	4	4.25			
		2	Terwujudnya good governance & clean government	4 Nilai integritas Setjen	6.5	6.75			
				5 Nilai Penerapan RB KKP	75 (Setara Level 4)	80 (setara level 4)			
		3	Terwujudnya citra positif KKP di masyarakat	6 Rasio jumlah pemberitaan yang negatif dibanding total pemberitaan sektor KP	20%	10%			
		<i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</i>							
		4	Terlaksananya Pengolahan dan penyajian data dan statistik kelautan dan perikanan yang akuntabel	7 Persentase data yang diperoleh tepat waktu dibanding total data yang diperoleh	60%	80%			
				8 Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengolah data statistik (hari kerja)	14	14			
				9 Rasio data statistik yang dihasilkan dibanding total data yang dianalisis	80%	85%			
				10 Persentase data yang disajikan tepat waktu dibanding total data yang disajikan	50%	67%			
5	Terintegrasinya sistem informasi KKP yang terpadu	11 Persentase Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) yang terintegrasi dibanding total TIK yang ada	25%	40%					
		12 Persentase pemenuhan TIK terhadap total permintaan TIK	80%	85%					

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		ALOKASI (JUTA)	
				2013	2014	2013	2014
		6 Terselenggaranya Program Penataan Organisasi untuk kegiatan implementasi e-Gov sesuai roadmap RB KKP	13 Persentase Program Penataan Organisasi untuk kegiatan implementasi e-Gov yang dilaksanakan dibanding jumlah program dan kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai roadmap RB KKP per tahun	80%	85%		
		7 Terselenggaranya Program dan kegiatan peningkatan pelayanan publik sesuai roadmap RB KKP	14 Persentase Program dan kegiatan peningkatan pelayanan publik yang dilaksanakan dibanding jumlah program dan kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai roadmap RB KKP per tahun	80%	85%		
		8 Terselenggaranya publikasi dan pelayanan komunikasi dengan media dan lembaga yang optimal	15 Persentase terpublikasinya program dan kegiatan KKP melalui media dibanding jumlah publikasi program dan kegiatan KKP	80%	85%		
			16 Persentase jumlah sosialisasi program dan kegiatan KKP pada lembaga/stakeholder dibanding jumlah kegiatan sosialisasi yang ada	80%	85%		
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE							
		9 Tersedianya SDM lingkup Pusdatin yang kompeten dan profesional	17 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon III dan IV Pusdatin	60%	50%		
		10 Tersedianya informasi lingkup Pusdatin yang valid, handal dan mudah diakses	18 <i>Service Level Agreement</i> (SLA) Pusdatin	70%	75%		
			19 Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi (skala likert 1-5) Pusdatin	4	4.25		
		11 Terwujudnya good governance & clean government lingkup Pusdatin	20 Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi	100%	100%		
			21 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Pusdatin	Nilai AKIP A	Nilai AKIP A		
			22 Indeks Kepuasan Masyarakat Pusdatin	6.5	6.75		
			23 Nilai Inisiatif anti korupsi Pusdatin	7.5	7.75		
			24 Nilai Penerapan RB Pusdatin	75 (Setara Level 4)	80 (setara level 4)		
		12 Terkelolanya anggaran Pusdatin secara optimal	25 Persentase penyerapan DIPA Pusdatin	> 95%	> 95%		

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

